

PARTAI AKP DAN IDEOLOGI ISLAM DI TURKI MODERN (2001-2007)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

M. SYA'RONI ROFII
05370002

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DR. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG,**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Republik Turki awalnya merupakan pusat kekuasaan Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani (*Ottoman Empire*) yang membawahi negara-negara Islam seantero dunia, namun kemudian berubah drastis pada tahun 1924, dengan diproklamirkannya Republikanisme oleh Mustafa Kemal Attaturk.

Sekulerisme yang menjadi ideologi negara kemudian berakibat kepada kontrol berlebihan negara atas aktifitas keagamaan warga negaranya yang mayoritas beragama Islam, sehingga menimbulkan keresahan tersendiri bagi muslim Turki, terutama kalangan wanita yang dilarang mengenakan jilbab di sekolah-sekolah, universitas-universitas dan gedung pemerintahan. Bagi sebagian peneliti tradisi sekulerisme Turki sangat berbeda dengan sekulerisme di sebagian besar negara-negara Barat, Turki bagi mereka dikategorikan lebih ke arah tipologi radikal.

Di tengah keresahan akan kontrol pemerintah atas aktifitas warga negara dalam menjalankan keyakinannya dengan didukung oleh militer dan beberapa alat negara lainnya yang seringkali mengintervensi wilayah politik atas nama sekulerisme secara berlebihan, timbul respon dari kalangan menengah muslim yang memilih jalur politik untuk bernegosiasi dengan kondisi yang ada, salah satu kelompok itu adalah Partai AKP (*Adalet Kalkinma Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan, Justice and Development Party*). Sebuah partai berbasis massa Islam yang secara resmi berdiri tahun 2001 dan mencatat prestasi gemilang di pentas demokrasi Turki.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) ditujukan untuk menganalisa fenomena tersebut dengan beberapa variabel kunci di antaranya : mengungkapkan latar belakang berdirinya partai AKP? Seperti apa garis perjuangan partai AKP dan bagaimana partai AKP memperjuangkan nilai-nilai Islam dan menginterpretasikan demokrasi ala Muslim di tengah arus sekulerisme? Dari deskripsi tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif.

Penelitian ini berhasil mengungkapkan beberapa fenomena penting dalam pentas politik di Turki. Bahwa di Turki terjadi tarik ulur yang kuat antara kekuatan Islamis-Sekuler dalam merebut kekuasaan; kalangan Islamis di Turki di bawah bayang-bayang sekulerisme sangat tertekan bila dilihat dari psikologi sosial; AKP sebagai salah satu varian dari perjuangan Islam politik di Turki merupakan antiklimaks dari kedidayaan kalangan sekuler, hal itu terjadi karena kepandaian elit AKP dalam memainkan perannya dalam panggung politik modern dengan wadah demokrasi, partai ini sangat akomodatif dalam mengakomodasi beragam kepentingan sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas Islam di tengah arus sekulerisme sehingga menjadikannya sebagai salah satu partai besar.



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/57/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *PARTAI AKP DAN IDEOLOGI ISLAM DI TURKI MODERN (2001-2007)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Sya'roni Rofii

NIM : 05370002

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP. 150276308

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si,
NIP. 150256649

Penguji II

Subaidi, S.Ag, M.Si,
NIP. 150368335

Yogyakarta, 28 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.,
NIP: 150240524



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 3 Eks

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Sya'roni Rofii

NIM : 05370002

Judul : **PARTAI AKP DAN IDEOLOGI ISLAM DI TURKI MODERN
(2001-2007)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah-Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebaga salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta 05 Desember 2008
7 Dzulhijjah 1429 H

Pembimbing I

Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP: 150276308



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 3 Eks

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Sya'roni Rofii
NIM : 05370002
Judul : **PARTAI AKP DAN IDEOLOGI ISLAM DI TURKI MODERN
(2001-2007)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah-Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebaga salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta 05 Desember 2008
7 Dzulhijjah 1429 H

Pembimbing II


Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag.
NIP. 150 289 435

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-

س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-

ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

— [َ]	Fathah	a	A
— _ِ	Kasrah	i	I
— [ُ]	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى..... [َ]	Fathah dan ya	ai	a dan i
و..... [َ]	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى..... [َ] ا..... [َ]	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ى..... [َ]	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ى..... _ِ			Kasrah dan ya
ى..... _ِ			i dengan garis di atas
و..... [ُ]	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول – yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah “t”
- Ta' Marbūtah mati adalah “h”
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah
طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا – rabbana
نعم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jalalu
 النعم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa ma_ Muhammadun illa rasul

MOTTO

**“....BIARKAN BURUNG TERBANG TINGGI DI ATAS AWAN,
KARENA ITU MERUPAKAN BUKTI KUASA TUHAN,
NAMUN BUKAN TIDAK MUNGKIN BAGI MAKHLUK TUHAN YANG LAIN
UNTUK TERBANG DAN BISA MENJADI LEBIH DARI SEKEDAR BURUNG,
DENGAN KEKUATAN SAYAP CITA-CITA...”**



PERSEMBAHAN

*Karya ini penyusun persembahkan kepada:
Ayahanda dan Ibunda tercinta,
Saudara-saudaraku tersayang,
Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dan, setiap orang yang bercita-cinta menjadikan politik sebagai alat
untuk menebar rahmat Tuhan bagi seluruh alam*

KATA PENGANTAR



إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena dengan hidayah dan inayah-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad Saw. yang telah memberikan contoh bagaimana menjadi wakil Allah di muka bumi dan patut menjadi tauladan hidup dari masa ke masa.

Penelitian ini berjudul “Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern”, sebuah judul yang merupakan hasil tentatif dialektika antara mahasiswa dan pembimbing di bawah bendera nilai-nilai etika ilmiah dengan hasil akhir dari proses dialektis itu adalah sepakat dengan judul di atas. Sedangkan pada ranah objek penelitian, penyusun sedari awal telah mempertimbangkan untuk mengkaji sebuah negeri dimana kejayaan Islam pernah berkibar, episentrum khilafah Islamiyah, sekaligus sebagai kiblat transnasional umat Islam sedunia dalam sejarah.

Akan tetapi, Turki kini bukanlah tempat seperti dua belas abad yang lalu, Turki Modern menampakkan dinamikanya sendiri bercengkrama dengan iklim Negara-Bangsa, nasionalisme, demokrasi dan temuan-temuan baru lainnya.

Sebenarnya penyusun tidak memiliki harapan terlalu besar dari penelitian ini, namun paling tidak mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi publik tanah air perihal perkembangan politik (khususnya menyangkut politik Muslim) di negeri yang sejak 1923 mendeklarasikan diri sebagai Negara Sekuler. Sekaligus tambahan informasi bagi masyarakat Indonesia dalam melihat dunia lain yang sedang bergelut dengan demokrasi dan modernisasi.

Terlepas dari proses panjang penelitian yang melelahkan ini penyusun tentunya patut berterima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan hingga selesai dan selama penulis berada di lingkungan civitas akademika. Untuk itu penyusun sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Amin Abdullah Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; sekaligus guru dan teman yang sedikit banyak telah menginspirasi dan mengarahkan penyusun untuk melirik dunia penerjemahan.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah (Pidana dan Tata Negara Islam) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah sekaligus sebagai pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun, sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, selaku pembimbing I yang telah rela meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwalnya yang padat untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun, sampai skripsi ini selesai.
6. Bapak Drs. Abdul Madjid, AS, selaku Penasehat Akademik, yang telah menjadi wali murid akademis penyusun dengan membimbing dan menasehati sehingga penyusun bisa kuliah dengan baik sesuai rencana.
7. Ayahanda tercinta, Drs. Anhar, M.Pd, yang telah menunjukkan dan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan, Ibunda tercinta, Hasanah, S.Pd, yang sedari kecil telah mengajarkan banyak hal baru dalam kehidupan dunia ini. Ucapan Terima Kasih tak

tehingga karena kasih sayang dan perjuangan keras beliau berdua yang tak kenal lelah dan tanpa pamrih untuk membiayai sekolah penyusun. Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas amal jariyah beliau melebihi amal tersebut.

8. M. Ahsan Isnaini, M. Khairul Jihadi, M. Nurcholis Haqqy (alm.) Nurhasani Restu Zarpati, mudah-mudahan dengan limpahan do'a kedua orang tua mempermudah langkah kita menggapai cita-cita yang digariskan Tuhan.
9. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan UGM, Perpustakaan Daerah DIY atas pelayanan referensi; Pustakawan St. Kolese Ignatius Kota Baru, LIP (Lembaga Indonesia Prancis) dan Yayasan LKiS yang telah melayani dengan baik sehingga objek materil yang sangat penting bagi penyusunan skripsi ini dapat diakses.
10. Staf Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah yang membantu banyak hal terkait administrasi kampus.
11. Segenap Dosen dan Karyawan, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah atas interaksi yang hangat selama penyusun kuliah di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Keluarga besar di perantauan, Kontrakan Demangan (Yonk, Zaky, Azmul, Enonk, Yayom, Ayet, Zayedi, Demank, Ijank, dll); Galaxy Kost (Taufik, Dhany, Rosyid, Ayenk, Amir, Pak Aji, Kang Asep n wife, Asep Pahru, Pak Ahmad, Olick dan alumni-alumni Galaxy lintas generasi); Alumnus MAKN Mataram everywhere; Keluarga Besar Mbak Anik dan Pak Ambiah yang telah menerima kami sebagai keluarga di Kota Pelajar ini.
13. Rekan-rekan Jinayah Siyasah Angkatan 2005. Thanks for everything.
14. Rekan-rekan di organisasi DPC PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Yogyakarta; LPM ARENA, PSKH Fak. Syari'ah UIN, HMI-MPO Komfak Syari'ah, BEM-J JS,

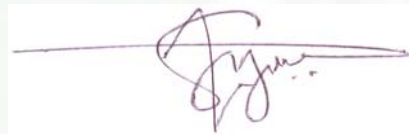
LESAN, terima kasih atas kerjasamanya dan karena bersama kalian penyusun bisa lebih dewasa dan lebih memahami perbedaan dan keragaman di antara kita dalam kehidupan.

15. Mas Al-Fayyad sang juru bicara Jacques Derrida atas kritikan dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
16. Dr. Baskara T. Wardaya, atas motivasinya dan barangkali inspirasi analisisnya.
17. (dr.) Baiq Nurlatifah, dirimu memang bagian dari teka-teki kehidupan.
18. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebut satu per satu yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan tersebut.

Demikian yang penyusun bisa sampaikan, dan ketidaksempurnaan skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun, sehingga sangat menanti kritik dan saran dari sidang pembaca. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 05 Desember 2008

Penyusun



M. Sya'roni Rofii

NIM. 05370002

DAFTAR ISI

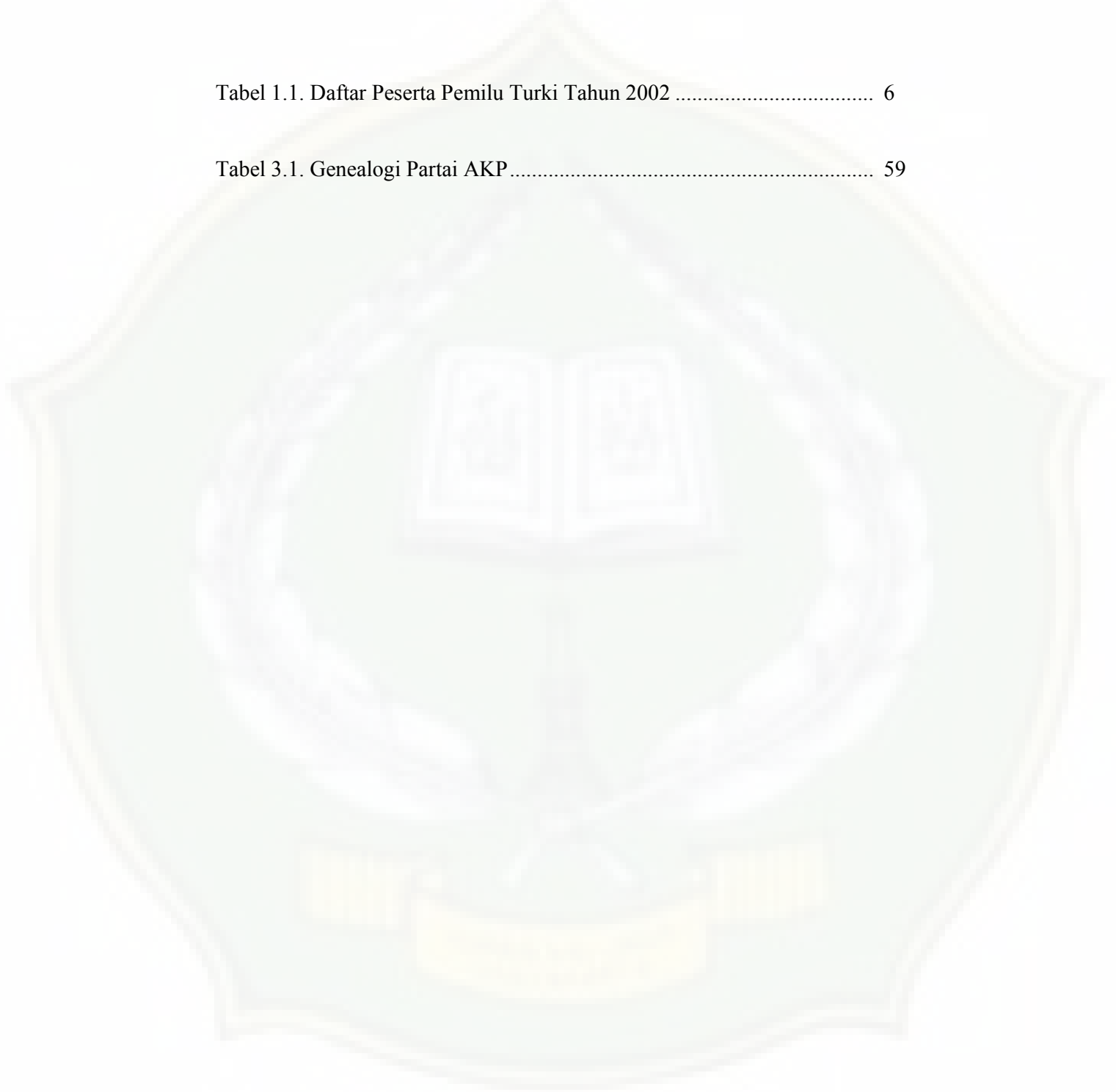
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II ISLAM DAN SEKULERISME DI TURKI MODERN	20
A. Sejarah Lahirnya Turki Sebagai Negara Modern.....	20
B. Pergulatan Islam dan Sekulerisme di Turki	33

BAB III PROFIL PARTAI AKP	51
A. Sejarah Berdirinya AKP.....	51
B. Tokoh-tokoh AKP.....	59
C. Karakteristik AKP.....	68
D. Manifesto Politik AKP.....	72
BAB IV KIPRAH AKP DALAM DUNIA PERPOLITIKAN TURKI	77
A. Kiprah AKP dalam Pemerintahan	77
1. Kebijakan Politik	79
2. Kebijakan Ekonomi	83
3. Kebijakan Sosial-Keagamaan	89
B. Posisi AKP vis a vis Partai Politik Lain	92
C. Posisi AKP vis a vis Golongan Sekuler	94
D. Konfigurasi Politik Pasca Kehadiran AKP	
di Panggung Politik Turki.....	99
BAB V PENUTUP.....	103
A. KESIMPULAN	103
B. SARAN-SARAN	105
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	113
<i>TERJEMAHAN</i>	
<i>PROFIL TURKI</i>	
<i>TURKI DALAM BENTANG WAKTU</i>	
<i>ATRIBUT KAMPANYE PARTAI AKP</i>	
<i>TABEL PEROLEHAN SUARA</i>	
<i>RIWAYAT HIDUP</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Peserta Pemilu Turki Tahun 2002 6

Tabel 3.1. Genealogi Partai AKP 59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Kunjungan Kerjasama Turki-Iran	83
Gambar 4.2. Grafik Kerjasama Turki Dengan Pihak Luar Negeri	89
Gambar 2.3. Presiden Gul Bersama Istri.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada semacam romantisme sejarah bagi umat Islam ketika berbicara tentang Turki, Turki bagi umat Islam di seantero dunia adalah bagian penting dari potongan sejarah gemilang peradaban Islam, di negeri itu telah tercatat prestasi sejarah Islam, pernah menjadi pusat kekuasaan dunia Islam yang tidak terkalahkan hampir selama delapan abad dan juga sangat disegani Eropa.¹ Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 yang kemudian beralih nama menjadi Istanbul adalah saksi sejarah akan kebesaran Dinasti Utsmani² yang sampai kini masih menyisakan luka bagi masyarakat Eropa.

Turki merupakan salah satu bagian terpenting dari sejarah Islam modern, kebesaraan peradaban Islam menjadi kian berpengaruh dan berdiri sejajar dengan peradaban lain ketika pijarnya terang benderang di Turki, realitas masa lalu itu sangat mungkin dan mendukung untuk terjadi, sebab, secara geografis Turki memiliki letak yang strategis sehingga menjadikannya sebagai jembatan antara Timur dan Barat. Negara ini memang berada di dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814. 578 kilometer persegi, 97% wilayahnya terletak di benua Asia dan

¹ Komaruddin Hidayat dalam pengantar buku karangan Binnaz Toprak, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), hlm. xv.

² Namun perlu dicatat bahwa prestasi dinasti Utsmani tidak jauh berbeda dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di dunia, ada masa kejayaan atau keemasan ada pula masa kemunduran. Keemasan itu sedikit banyak terjadi pada masa Sultan Sulaiman I yang oleh karena kesuksesannya itu ia dijuluki : *The Great, The Magnificent, al-Qanuni*. Baca Ali Mufrodi dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 2*, bab "Kerajaan Usmani" (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 241-242.

sisanya berada di benua Eropa.³ Turki berada enam puluh persen di Asia dan sisanya berada di Eropa,⁴ persinggungan dengan Eropa menjadikan negara ini berbeda dengan negara berpenduduk muslim lainnya di belahan dunia lain.

Namun sejarah yang masih diingat dan akan terus diingat oleh umat muslim sedunia itu pun, sejarah kegemilangan khilafah, akhirnya berakhir juga, sebab rakyat Turki dengan dimotori oleh Mustafa Kemal Attaturk secara resmi pada tanggal 3 Maret tahun 1924 menghapus khalifah di bumi Turki setelah setahun sebelumnya mendeklarasikan diri berbentuk Republik.⁵

Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal, Turki mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler, posisi agama berada di ruang privat dengan di bawah kontrol negara. Sekulerisme bagi Musatafa Kemal adalah pilihan paling tepat untuk membawa Turki menjadi negara lebih baik,⁶ sejajar dengan negara-negara Barat, khususnya Eropa. Sekulerisme baginya adalah motor penggerak kemajuan

³ Wawancara dengan Duta Besar Turki Mr Aydin Evrigen dalam *majalah Azzikra*, No. 20, Tahun 2 (Juli 2006). hlm. 33.

⁴ Uniknya, seperti ditulis Komaruddin Hidayat, banyak dari penduduk negeri ini, khususnya warga Istanbul, memiliki kebiasaan sarapan di Asia, makan siang di Eropa, dan makan malam serta tidur di Asia lagi. Dan terkadang oleh orang Barat mereka dianggap "*the sick man of Europe*", sebetulnya sindiran antropologis yang menandakan perbedaan kultur dan dinamika kemasyarakatan bangsa Barat (Eropa) dengan selain Barat, bagi mereka Barat lebih dinamis sedang sebagian yang lain sebaliknya, cenderung statis penuh mistis spiritual.

⁵ Tentang proses pengambil alihan kekuasaan dari tangan khalifah yang resmi dan likaliku perjuangan Musatafa Kemal bersama golongannya dalam meraih posisi puncak bisa dilihat dalam Ali Mufrodi dalam (Taufik Abdullah,ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 2*, bab "Kerajaan Usmani" (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 231-262; Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, alih bahasa Karsidiningrat, cet.ke-2 (Jakarta: Gramedia, 2003). Menyangkut format perpolitikan modern serta ketegangan sipil-militer menjadi kajian komprehensif dilakukan oleh Feroz Ahmad, *The Making of Modern Turkey* (London: Routledge, 1993).

⁶ Gagasan Mustafa Kemal juga banyak dipengaruhi oleh konsepsi rasional yang dibangun oleh Ziya Gokalp yang juga kalangan nasionalis. Mencoba mengadopsi peradaban Barat untuk memajukan Turki, Gokalp adalah *Think Tank* sekulerisme-nasionalisme Turki. Lihat Ziya Gokalp, *The Principles of Turkism*, alih bahasa Robert Devereux (Leiden: E.J.Brill, 1968), hlm.38-42.

pembangunan, sebaliknya, Islam di mata Mustafa Kemal adalah statis dan hanya menghambat pembangunan. Sehingga tidak memberikan ruang kebebasan bagi apa pun yang berbau Islam. Gagasan sekulerisme semakin kokoh karena, konstitusi Turki menghendaki itu, dengan dikawal oleh militer, yang berada di bawah kontrol Musatafa Kemal. Militer adalah tangan besi kekuasaannya untuk mendukung gagasannya.

Namun secara perlahan kedigdayaan militer dalam mengawal konstitusi warisan Mustafa Kemal perlahan mencair dan mengarah pada perubahan-perubahan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di Turki. Gelombang demokratisasi di seluruh penjuru dunia pada tahun 1980-an diiringi gelombang kesadaran politik masyarakat sipil di berbagai belahan dunia, dan khusus untuk Turki keinginan untuk menjadi bagian dari Uni Eropa prasyaratnya adalah menjalankan demokrasi utuh, turut membuka mata banyak orang di Turki. Mereka yang melihat gagasan sekulerisme ala Mustafa Kemal telah kehilangan orientasi mencoba bermain melalui jalur politik secara sehat, mereka mendirikan partai dan mengikuti pemilu secara konstitusional.

Hal ini juga dijadikan sebagai momentum kebangkitan Islam politik, oleh kalangan menengah muslim, pengusung ide-ide Islam. Meski demikian, dalam perjalanannya demokrasi ala Turki masih saja didominasi oleh Partai penguasa beraliran nasionalis sekuler, mereka cukup berpengaruh di Mahkamah Nasional, pengikut setia almarhum Mustafa Kemal. Akibatnya, banyak partai-partai berideologi Islam dibekukan karena alasan berideologi Islam yang menurut mereka tidak sesuai dengan konstitusi Turki, di sini intervensi militer juga sangat

kuat. Kasus penjegalan yang menimpa Necmekin Erbakan tahun 1997 saat memimpin adalah salah satu contoh ketegangan nasionalis-Islamis yang masih saja mewarnai kultur politik Turki.⁷

Partai AKP (*Adalalet ve Kalkinma Partisi*, Partai Keadilan dan Pembangunan) adalah salah satu wajah baru di kancah perpolitikan negeri itu. Partai yang berbasis Islam ini merupakan partai yang didirikan oleh Recep Tayyip Erdogan bersama Abdullah Gul pada tanggal 14 Agustus tahun 2001.⁸ Kedua pendiri partai ini tadinya juga merupakan kader partai Refah, partai pimpinan Necmekin Erbakan yang juga berbasis massa Islam. Dalam proses politiknya, partai yang mengkonsolidasikan diri dalam setahun untuk persiapan pemilu dan kadernya banyak diisi kalangan menengah ini menunjukkan grafik kemenangan yang cukup signifikan jika dilihat dari usianya yang masih sangat muda.

Dalam berbagai pemilu, perolehan suara partai-partai Islam selalu menunjukkan peningkatan, yakni pada pemilu tahun 1991 meraih 11,9 persen suara, tahun 1994 meraih 19,1 persen, 1995 memperoleh 21,1 persen suara. Hanya pada pemilu 1999, perolehan suara partai Islam menurun, yakni hanya 15,6 persen. Perolehan suara partai Islam melalui AKP kembali meningkat tajam pada pemilu 2002, yakni berhasil menguasai 363 dari 550 kursi parlemen.⁹

⁷ Perseteruan antara kaum religius dan sekuler yang didukung militer seperti "pertarungan hidup dan mati" meminjam istilah Fawaz A. Gerges dalam *Amerika dan Islam Politik, Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan*, alih bahasa Hamid Basyaib (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm.269-272.

⁸ "History of The Justice and Development Party," <http://www.akparti.org/turk.htm>, akses tanggal 17 Maret 2008.

⁹ "Political Parties in Turkey", <http://www.allaboutturkey.com>; "Results of Parliamentary Election 3 November 2002" <http://www.eng.akp.org>, akses tanggal 20 Maret 2008.

Kegemilangan AKP itu kemudian terulang lagi pada pemilu dini legislatif tahun 2007.¹⁰ Partai pimpinan Recep Tayyip Erdogan itu, kini memegang jabatan-jabatan strategis yakni jabatan Presiden diduduki oleh Abdullah Gul, Perdana Menteri diduduki Recep Tayyip Erdogan dan menguasai mayoritas kursi di parlemen setelah pemilu Juli 2007.¹¹

¹⁰ "Political Parties and Election System", <http://www.turkishembassy.org>., akses tanggal 20 Maret 2008.

¹¹ Ozel Dosyalar, "Turkey: 22 July 2007-Election Results," <http://www.bbc.turkish>, 20July%202007%20-20Election/Results.htm, akses tanggal 17 Maret 2008.

Tabel 1.1: Daftar Peserta Pemilu Turki Tahun 2002

Breakdown and Percentage of Votes and Breakdown of Seats at the Turkish Grand National Assembly

Name of Party	Votes Gained	Percentage of Votes	Seats in the Parliament
AK Parti (Justice and Development Party)	10,804,458	34.41	365
CHP (The Republican People's Party)	6,096,488	19.42	177
DYP (True Path Party)	2,997,065	9.55	
MHP (Nationalist Action Party)	2,613,936	8.33	
GP (Young Party)	2,275,855	7.25	
DEHAP (Democratic People's Party)	1,929,004	6.14	
ANAP (Motherland Party)	1,601,322	5.10	
SP (Happiness Party)	779,934	2.48	
DSP (Democratic Left Party)	385,714	1.23	
YTP (New Turkey Party)	360,678	1.15	
BBP (Great Unity Party)	319,622	1.02	
Independents	301,359	0.96	8
YP (Homeland Party)	294,167	0.94	
IP (Worker's Party)	162,908	0.52	
BTP (Independent Turkey Party)	149,445	0.48	
ODP (Freedom and Solidarity Party)	105,849	0.34	
LDP (Liberal Democratic Party)	89,503	0.29	
MP (Nation Party)	69,340	0.22	
TKP (Turkish Communist Party)	60,410	0.19	

Sumber : <http://www.turkishembassy.org>. Kedutaan Besar Turki di Washington

Dari beberapa kontestan politik lainnya AKP bertengger di urutan teratas dengan perolehan suara terbanyak dan sangat sulit untuk terwujud oleh sebuah partai baru menyingkirkan partai kuat pendukung pemerintahan beserta elemen-elemen sekulerisme seperti CHP (Partai Rakyat Republik) yang juga merupakan warisan Mustafa Kemal, kalau bukan didukung oleh faktor-faktor yang saat ini berkembang dalam wacana publik Turki.

Namun jika dilihat secara sepintas dari garis perjuangannya, kemenangan tersebut merupakan akumulasi dari pilihan politik partai AKP yang mencoba mengambil inisiatif lain dalam format perpolitikan, bisa jadi karena pilihan untuk menyesuaikan diri dengan kultur demokrasi yang berkembang di Turki dengan sokongan militer begitu kuat menyebabkan partai AKP sedikit kooperatif dengan aturan main, disamping kader partai ini sedikit "trauma" dengan rentetan pembekuan partai-partai beraliran Islam oleh institusi pemerintah.

Kemenangan yang diraih partai AKP sebagai partai baru setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: pertama, partai ini merupakan partai baru yang lebih moderat dengan menyesuaikan diri dengan kultur demokrasi militeristik ala Turki, sebuah partai alternatif dengan kemasan baru memiliki komitmen untuk melayani masyarakat, terlihat dari program yang ditawarkan dalam kampanye, termasuk mengakomodasi beragam elemen di Turki.

Kedua, sosok Recep Tayyip Erdogan cukup berpengaruh dalam perolehan suara, sebab Erdogan selaku ikon AKP terkenal sebagai muslim taat dan memiliki komitmen untuk memperjuangkan isu-isu Islam bagi konstituen

Islam, sedangkan bagi konstituen yang lain seperti kalangan Kurdi terpatri kepercayaan pada diri Erdogan yang juga mantan Walikota Istanbul berhasil membawa kota Istanbul lebih bersih dan lebih baik.

Ketiga, komitmen partai AKP akan sekulerisme Turki dan program politik yang ditawarkan salah satunya menyangkut akses keanggotaan Uni Eropa juga menjadi daya tawar tersendiri bagi partai ini, meskipun banyak kalangan yang menentang dan khawatir akan masa depan sekulerisme Turki jika berada di bawah kekuasaan AKP.

Namun secara garis besar keberadaan partai AKP menyiratkan beberapa hal menyangkut perkembangan di Turki kontemporer, partai AKP hadir sebagai sebuah representasi ideologi Islam di ruang demokrasi dengan kultur militeristik berarti juga kebangkitan kembali spirit Islam politik yang selama ini diredam, "diintimidasi" dan selalu dicurigai oleh kalangan sekuler dengan tanpa memberikan ruang kebebasan dan kesetaraan di bawah naungan konstitusi, disamping arah perkembangan Turki saat ini yang dihadapkan pada persoalan ekonomi, sosial, politik di belantika internasional berhadapan dengan isu HAM, demokrasi dan beragam konsensus internasional lainnya. Dan barangkali saat ini faktor-faktor menyangkut perkembangan masyarakat, demokrasi, ideologi Islam, Sekulerisme, masa depan Turki dan faktor lainnya menjadi pertanyaan besar dan perlu mendapat perhatian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah, bagaimana korelasi antara kondisi sosial-politik Turki kontemporer yang kokoh dengan benteng sekulerisme dengan kemenangan telak partai AKP yang berbasis massa Islam dalam dua kali pemilu sejak pertama kali berdiri? Yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa yang melatar belakangi berdirinya partai AKP dan mengapa partai ini memilih kompromi dengan sekulerisme di arena demokrasi Turki, padahal spirit perjuangan mereka adalah ingin memperjuangkan Islam?
- b. Signifikansi fakta sosial-politik mempengaruhi kemenangan telak partai AKP dalam pemilu dan mengalahkan partai lain yang lebih memiliki komitmen atas sekulerisme-kemalisme ?
- c. Seperti apa garis perjuangan partai AKP dan bagaimana partai AKP memperjuangkan nilai-nilai Islam dan menginterpretasikan demokrasi ala Muslim di tengah arus sekulerisme?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan perkembangan politik Turki kontemporer yang melibatkan elit politik Muslim dalam kancah demokrasi dan sekulerisme.

- b. Mendeskripsikan latar belakang berdirinya AKP dan pengaruhnya bagi umat muslim Turki dan kemajuan Turki.

Dan diharapkan berguna untuk :

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi cakrawala pengetahuan bagi peneliti, analis politik, khususnya mahasiswa yang konsentrasi pada disiplin ilmu politik dan dinamika Islam kontemporer, terlebih bagi Mahasiswa Jinayah-Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi publik tanah air tentang perkembangan politik kontemporer Turki, menjadi bahan pembelajaran bagi elit politik muslim tanah air khususnya yang ingin berkompetisi di ruang demokrasi, sekaligus menjadi tambahan referensi bagi para pemangku kebijakan bidang politik luar negeri.

D. Telaah Pustaka

Kajian akademis tentang perkembangan politik Turki kontemporer di tanah air sangatlah jarang, sebab kajian yang banyak dilakukan lebih menekankan pada laboratorium historis Turki, entah berkaitan dengan era sekularisasi pada

pola pikir seperti yang pernah ditulis oleh Mukti Ali,¹² proses transisi dari masa khalifah ke generasi selanjutnya yang lagi-lagi masih berada pada lingkaran transisi dari Turki Usmani ke era Mustafa Kemal.¹³

Namun selain kajian di atas, telah ada beberapa kupasan-kupasan akademis tentang perkembangan Turki kontemporer seperti yang ditulis oleh Menderes Cinar, dalam kajiannya di jurnal *The Muslim World* Cinar mendeskripsikan tentang proses politik yang berlangsung di Turki pasca kemenangan partai AKP pada pemilu 2002, di sana ia mengungkapkan beberapa fenomena kepemimpinan sebuah partai yang awalnya berada satu frame dengan partai Refah kemudian mencari jalur alternatif sesuai iklim politik yang berkembang, ia mencoba mengantarkan pembaca pada dinamika transformasi di Turki di bawah kepemimpinan partai AKP.¹⁴ Kajian yang sama juga dilakukan oleh Rafiullah Azmi,¹⁵ Azmi menitik beratkan kajiannya pada genealogi partai AKP dan garis perjuangannya sebagai salah satu aktor politik di Turki dan pada posisi demikian ada tanggungjawab atau peluang untuk mendialogkan kesesuaian Islam

¹² Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di Turki* (Jakarta : Penerbit Jambatan, 1995).

¹³ Seperti penelitian mahasiswa antara tahun 2001-2007 yang dilakukan Dede Kusmanto, *Respon Ulama Terhadap Pembaharuan di Turki Usmani (1839-1909)* (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2001); Siti Rokhimah, *Tanzimat di Turki Tahun 1839-1871* (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2002); Siti Maesaroh, *Peranan Midhat Pasha Dalam Pembentukan Konstitusi 1876* (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2001); Bahas Haddy Putra, *Gerakan Turki Usmani Muda dan Kontribusinya Dalam Pembaruan di Turki Pada Tahun 1865-1883*, Skripsi S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁴ Menderes Cinar, "Turkey's Transformation Under the AKP Rule," *The Muslim World*, Vol. 96 (Juli 2006), hlm. 469-486.

¹⁵ Rafiullah Azmi, "The Rise of the AKP: A Challenge before Turkey," *Islam and the Modern Age*, Vol. 33 (April 2002), hlm. 95-104.

dan Demokrasi¹⁶ lebih-lebih pasca tragedi 11 September 2001 yang sempat membangkitkan tensi ketegangan menyangkut Islam dan Barat.

Sebuah buku terbit tahun 2006 di Utah merupakan kajian komprehensif tentang perkembangan politik Turki, sebuah sketsa tentang kepemimpinan partai AKP dengan didukung unit-unit komplementer meliputi AKP sebagai partai pro-Islam, eksistensi AKP berdampingan dengan arus sekularisasi, relasi dengan militer, singkatnya, buku yang disunting M. Hakan Yavuz tersebut membahas tentang identitas, ideologi, kepemimpinan serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan partai AKP dalam posisinya sebagai partai yang berkuasa.¹⁷

Kajian-kajian di atas lebih banyak menekankan pada proses politik yang berlangsung pasca kemenangan partai AKP tahun 2002, sehingga perkembangan yang terjadi belakangan seperti hasil pemilu 2007 tidak terdokumentasikan, disamping itu kajian yang ada hanya menjadikan partai AKP sebagai salah satu suplemen dan mengkaji secara singkat. Oleh karena itu, dalam hal ini penyusun mencoba menghadirkan fenomena partai AKP sebagai objek material untuk dikupas secara komprehensif dan fokus pada partai AKP dari sejak berdiri sampai dinamika terkini untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.

¹⁶ Menyangkut persoalan ini Abdullahi Ahmad An-Na'im termasuk dalam kategori pengkaji Turki sebagai salah satu sampel komparasi, dalam tulisannya An-Na'im meletakkan Turki sebagai salah satu contoh negara yang sedang dihadapkan pada pilihan untuk menyesuaikan diri dengan iklim demokrasi dan sebisa mungkin menginterpretasikan nilai-nilai Islam dalam alam demokrasi dan elemen-elemen modernisme lainnya. Lihat Abdullahi Ahmad An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler : Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah* (Bandung : Mizan Pustaka, 2007), hlm. 341-390.

¹⁷ M. Hakan Yavuz, *The Emergence of a New Turkey, Democracy and the AK Parti* (Utah : The University of Utah Press, 2006).

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan di Turki saat ini tidak terlepas dari proses akulturasi dan transformasi dengan nilai-nilai Barat (Eropa), kedekatan dengan negeri-negeri Eropa sejak abad empat belas sampai hari ini ditandai dengan penyerapan pengetahuan bidang militer, konstitusi dan kenegaraan, proses itu banyak terjadi melalui sektor pendidikan, kebijakan untuk mengirim orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk memperdalam ilmu pengetahuan di Perancis misalnya, mengenalkan mereka, warga Turki tersebut berkenalan dan bersentuhan dengan ide-ide modernitas, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, kesehatan, industri dan beragam nilai lainnya.

Keyakinan akan nilai-nilai modern dalam bernegara seperti mendirikan partai politik tentunya merupakan fenomena tersendiri dalam suatu masyarakat yang sedang berubah dan mencoba mengadopsi peradaban lain yang terlebih dahulu menikmati iklim demokrasi dengan sistem kepartaian (salah satunya Eropa Barat, tempat dimana partai pertama kali lahir).¹⁸

Partai politik menurut Miriam Budiarto adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita bersama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik—(biasanya) dengan cara konstitusional—untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹⁹

¹⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-22 (Jakarta : Gramedia, 2002), hlm. 160-161.

¹⁹ *Ibid.*

Di sisi lain, sebagaimana ditulis Huntington, masyarakat yang telah membangun pranata politik modern dalam skala luas, serta diimbangi dengan adanya kemampuan tinggi dalam mengendalikan perluasan basis peran serta politik dibanding waktu-waktu sebelumnya, dianggap akan lebih stabil.²⁰

Oleh karena itu, partai AKP termasuk dalam kategori partai yang dihadapkan pada pilihan politik untuk mewujudkan visi politiknya, maka harus mengorganisir diri secara organisatoris untuk selanjutnya mengikuti prosedur demokrasi sesuai pranata politik yang berkembang dan terbentuk di Turki.

Kebudayaan masyarakat Turki dengan mayoritas Islam-Sunni disandingkan dengan ide sekulerisme Turki yang dicanangkan Mustafa Kemal pun ada semacam gejolak sosial tatkala interpretasi sebagian elit Turki menganggap bahwa keberhasilan semata-mata dipandang sebagai satu-satunya alat kemajuan dan menapikan aspek ideologis yang melekat pada kultur dan pola pikir mayoritas warganya, selama ini, mereka diasingkan dari keberagaman mereka,²¹ banyak refresi kultural dan ideologis warga oleh negara secara konstitutif. Gejala sekulerisme itu, akhirnya akan menemukan masa-masa ketika letupan besar mendekonstruksinya. Salah satu pilihannya hari ini adalah, Turki harus bermain secara sehat dalam dinamika demokrasi, demokrasi menghendaki setiap warga negara untuk berpartisipasi secara konstitutif. Pilihan itu nyatanya coba dikompromikan oleh beberapa elit muslim yang menjunjung tinggi nilai

²⁰ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah*, alih bahasa Sahat Simamora, *cet. Ke-2* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 472.

²¹ Mustafa Erdogan dalam Atilla Yayla, (ed.), *Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar* (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2004), hlm.88-91.

Islam dengan mendirikan partai sesuai keinginan konstitusi, hal ini termasuk salah satu langkah penting bagi partai untuk memikat hati konstituennya. Partai AKP seperti dideskripsikan sebelumnya memiliki kedekatan kultur dengan konstituen yang terasing dari budaya dimaksud.

Menurut Dale F. Eickelman²² politik muslim melibatkan perlombaan dan persaingan penafsiran simbol dan kontrol atas lembaga, baik formal maupun informal, yang membuat dan mempertahankan simbol dan lembaga-lembaga tersebut (begitu juga dengan lembaga politik, semisal Partai Politik). Penafsiran tersebut tentunya melibatkan dimensi ruang dan waktu yang membawa kepada perbedaan yang signifikan. Bagaimanapun juga, layaknya semua tradisi keagamaan, prinsip-prinsip Islam harus terus menerus diinterpretasikan kembali. Hasilnya adalah fleksibilitas gagasan dan peyatuan waktu dan tempat.²³

Namun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa secara teoritis sisi sejarah dari proses yang berjalan saat ini, patut dianggap sebagai sebuah ranah dialektika antara fenomena-fenomena sebelumnya dengan yang saat ini terjadi.²⁴

Dalam hal ini penyusun memiliki keyakinan dengan didukung teori-teori yang ada, bahwa proses politik dengan meletakkan partai AKP sebagai salah satu aktor politik muslim di arena demokrasi Turki tentunya perlu diletakkan secara proporsional, partai AKP sebagai partai berbasis Islam dengan garis

²² Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Politik Muslim, Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 5.

²³ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁴ Terkadang sejarah juga menjadi bagian dari tolok ukur, titik balik dan interdependensi dari peristiwa yang satu dengan yang lain. Memunculkan frame sejarah sekaligus menjadi pengasan waktu bahwa peruses politik tentatif telah terjadi dan terdokumentasikan berdasarkan catatan waktu (tahun). Sebab, dalam politik kejadian hari esok sangat sulit untuk diprediksi. Bisa jadi hari ini berkuasa keesokan hari lengser.

perjuangannya yang memiliki komitmen dengan nilai-nilai Islam memiliki kesempatan yang sama dengan partai lainnya untuk menanamkan visi dan misi partai dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan versi mereka. Setiap partai dalam pranata modern juga dianggap sebagai salah satu elemen penting penyalur aspirasi konsituennya. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menggunakan instrumen-instrumen teoritis di atas untuk menelaah dinamika menyangkut partai AKP dan dampak yang ditimbulkan.

F. Metode Penelitian.

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan perkembangan politik yang melibatkan partai AKP sebagai salah satu elemen demokrasi di lingkungan sekulerisme berwajah militeristik dikaitkan dengan aspek sosial, budaya dan politik masyarakat Turki saat ini, dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang terfokus pada tipe penelitian bersifat diskriptif analitis.

Untuk mendapatkan jawaban dari persoalan di atas, penyusun telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian kepustakaan. Sehingga penyusun tekankan bahwa penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif, sehingga memerlukan ketajaman pemilihan dan pemisahan data, untuk selanjutnya disajikan secara induktif, deskriptis-analitis.

Landasan berfikir metode kualitatif adalah paradigma positivisme Max Weber, Imanuel Kant, dan Wilhelm Dilthey. Objek penelitiannya adalah makna-makna dibalik tindakan yang mendorong timbulnya gejala sosial.²⁵

Penelitian deskriptif merupakan bentuk yang lazim digunakan dalam penelitian, yang pada umumnya berupa studi awal atau studi yang bersifat eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa sosial, memberikan informasi awal tentang *issue* yang ditanyakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang mendukung dalam penelitian tersebut.²⁶ Penelitian deskriptif juga berpatron pada bentuk penelitian dengan memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.²⁷

Hadari Nawawi menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang sedang diselidiki.²⁸

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara megumpulkan buku-buku serta karya

²⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, cet.ke-2 (Yogyakarta :Pustaka Pelajar 2006), hlm.47.

²⁶ Satirios Sarantakos, *Sosial Research* (Melbourne: Mac millan Education Australia Pty Ltd, 1993), hlm. 7.

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia 1989), hlm..30

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet ke-11 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.63.

ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber primer dalam penelitian ini adalah berbentuk data-data dari situs resmi Partai AKP, yang termasuk di dalamnya berisi tentang manifesto perjuangan partai AKP, buku-buku yang memuat tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, Turki kontemporer.
2. Sumber sekunder, meliputi penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti terdahulu menyangkut Turki.
3. Sumber tersier, meliputi buku-buku, koran, majalah, jurnal-jurnal, ataupun internet yang terkait dengan tema dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara pertama Pengumpulan data. Yaitu mengumpulkan data, yang berhubungan dengan kondisi sosial politik Turki yang memiliki tradisi sekulerisme; kedua klasifikasi data. Yaitu usaha untuk memilah data agar supaya memudahkan dalam memahami data; ketiga interpretasi data. Data yang telah diklasifikasi kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk memperoleh artikulasi sesuai kebutuhan penyusun dan yang keempat dilakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini direncanakan terdiri dari lima bab, diawali dengan bab *pertama*, yaitu pendahuluan. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab

pertama latar belakang masalah, yaitu mendiskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan didapatkan gambaran yang jelas mengenai latar belakang mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Sub bab *kedua*, rumusan masalah, sub bab *ketiga* tujuan dan manfaat penelitian, sub bab *keempat* tinjauan pustaka, sub bab *kelima* kerangka teori, sub bab *keenam* metode penelitian, sub bab *ketujuh* sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang sejarah lahirnya Turki sebagai negara modern yang diikuti dengan penerapan ideologi sekuler secara massif sekaligus di dalamnya mendeskripsikan secara leksikal atau terminologis tentang akar sekulerisme serta akibat-akibatnya bagi warga negara Turki. Bab *ketiga*, mendeskripsikan tentang profil partai AKP menyangkut sejarah berdirinya, tokoh-tokoh AKP, kemudian karakteristik partai AKP serta manifesto perjuangannya.

Bab keempat, bab ini sekaligus menjadi ruang analisis untuk membedah fenomena partai AKP dilihat dari sudut pandang konfigurasi politik Turki secara umum, mengulas kiprah partai AKP dalam pemerintahan dalam rangka mewujudkan fatsoen politiknya; mengulas tentang relasi antara partai AKP dengan partai-partai yang telah lama dan baru berdiri dalam demokrasi Turki kontemporer; relasi partai AKP dengan kalangan Islamis, kalangan sekuler maupun kelompok-kelompok lain yang berpotensi memiliki suara dan dampak signifikan dalam politik.

Adapun Bab Lima atau bab penutup berisi kesimpulan dari analisis kasus secara umum dan dilanjutkan dengan saran-saran menyangkut dinamika ilmiah selanjutnya.

BAB II

ISLAM DAN SEKULERISME DI TURKI MODERN

A. Sejarah Lahirnya Turki Sebagai Negara Modern

Terbentuknya negara modern di Barat merupakan turunan dari ide-ide modernitas, tidak dapat dipungkiri bahwa proses interaksi antara komunitas yang satu dengan yang lain menyebabkan timbulnya dampak signifikan bagi kepentingan internal kelompok, hal serupa juga terjadi pada ranah konsepsi negara modern. Ide negara modern di Barat juga menginspirasi Mustafa Kemal untuk merubah keadaan di Negerinya. Kondisi demikian juga dikuatkan oleh kenyataan adanya sejumlah kalangan Turki yang pernah tinggal di Eropa menjelang abad ke-19²⁹ yang menyerap konsepsi tanah air dan bangsa (*nation-state*).³⁰ Adapun periode negara-bangsa adalah abad ke-19, pada abad ini saat dimana ide tentang negara-bangsa digagas sebagai sistem politik modern. Lewat revolusi Perancis, sistem pemerintahan demokratis modern diperkenalkan untuk pertama kalinya

²⁹ Pada tahun-tahun berikutnya, menjelang abad ke-20, terlihat dinamika perubahan yang begitu cepat terjadi di Turki, semangat zaman yang telah mengalami proses industrialisasi dimulai atau ditandai dengan masuknya kereta api di wilayah Turki, tepatnya kota Salonika, daerah Macedonia sebuah kota perdagangan yang ramai dilalui orang asing, saat Mustafa Kemal berusia belasan tahun.. Dalam bukunya, *Attaturk: The Rebirth of Nation*, Patrick Kinross mengutip kenang-kenangan seorang penghuni: "Abad [ke-19] ini sedang mendekati akhir. Dengan diam-diam dunia Barat merayap masuk, mencoba memikat Timur dengan keajaibannya.... Dipamerkannya di depan mata kami sihir ilmu pengetahuan dan mukjizat temuan dan ciptaannya. Kami menangkap selintas kecemerlangannya dan dengan malu-malu mendengarkan nyanyian merdu dewi lautnya. Ibarat orang dusun yang ikut dalam sebuah jamuan besar, kami merasa rendah diri dan tingkah kami kikuk....", Patrick Kinross dalam Goenawan Mohamad, Catatan Pinggir, "Turki" (Majalah Tempo Edisi. 27/XXXIII/27 Agustus - 02 September 2007).

³⁰ Pada pertengahan abad 19 banyak ditemukan istilah-istilah seperti tanah air, bangsa, dan konsep-konsep terkait modenisme lainnya diserap dalam bahasa Arab dan Turki. Pada saat yang sama kosep Eropa tentang patria mulai mempengaruhi kata watan dalam bahasa Arab, atau vatan dalam bahasa Turki. Serapan-serapan itu kemudian mengkristalkan pandangan politis baru tentang tanah air.

dengan semangat *Liberty (Kebebasan)*, *Egality (Persamaan)*, dan *Fraternity (Persaudaraan)*, bukan tradisi etnis atau *clan* dengan sistem pemerintahan yang mengikuti garis keturunan.³¹ Dalam upaya menghadirkan harapan bagi rakyatnya pemerintah mengadopsi simbol-simbol etnis dan agama ke dalam ideologi negaranasionalisme. Dalam era tersebut negara-negara dipandang sebagai lembaga yang bisa menjanjikan "keselamatan" warganya. Pembentukan negara-bangsa melewati proses sekulerisasi nilai-nilai religius tradisi.³²

Pola pembangunan bangsa yang modern sepanjang politik dalam dunia Islam, seperti ditulis Jhon L. Esposito,³³ memperlihatkan tiga kecenderungan atau orientasi yang umumnya ada pada wilayah-wilayah Muslim : negara sekuler, negara berasaskan Islam, dan negara Muslim. Turki sendiri lebih memilih jalan sekuler secara total, memisahkan Islam dari negara dan justru membatasi agama hanya untuk kehidupan pribadi. Negara-negara lain seperti Arab Saudi dan Pakistan secara resmi mengumumkan ciri Islam bagi negaranya dan mengutamakan pelaksanaan Hukum Islam; komitmen Islam itu bukan cuma digunakan untuk kepentingan di dalam negeri, tapi juga sebagai alat untuk mempermudah urusan-urusan dengan negara-negara Muslim lainnya. Kebanyakan wilayah-wilayah Muslim, lanjut Esposito, muncul sebagai negara Muslim. Disamping mengikuti konsep pembangunan bernegara dari Barat untuk urusan politik, sosial dan hukum, juga mengelaborasi alat-alat kelengkapan konstitusional

³¹ Lihat Rebeka Harsono, "Cultural Studies, Nasionalisme dan Etnisitas" dalam Nirwan Ahmad Arsuka (ed.), *Bentara Esei-esei 2002* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 499.

³² *Ibid.*

³³ Jhon L. Esposito, *Islam dan Politik*, alih bahasa H.M. Joesoef Sou'yb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 9.

khas Islam. Bagi sebagian lainnya, Islam diumumkan sebagai agama resmi dalam negara, dan Syari'at dinyatakan sebagai sumber hukum. Dalam menetapkan kepala negara haruslah berasal dari kalangan Muslim yang dalam mengemban tugas juga memiliki wewenang untuk mengurus urusan keagamaan. Negara-negara seperti Tunisia, Aljazair, Mesir, Suriah, Iran, Yordania dan Malaysia merefleksikan hal tersebut.³⁴

Turki, yang pernah menjadi pusat imperium Utsmaniyah, kemudian memberikan satu-satunya contoh ikhtiar untuk membangun negara sekuler sepenuh-penuhnya dalam dunia Islam. Perang kemerdekaan Turki pada tahun 1919, di bawah pimpinan Mustafa Kemal, bertujuan menciptakan di Turki sebuah negara nasional. Sekalipun pada mulanya Mustafa Kemal melandaskan tujuan perjuangannya pada Islam, namun tujuan lain yang hendak dicapai adalah mengusir imperialisme Barat, membangun negara sekuler yang modern, dan sama sekali bukan untuk menghidupkan kembali imperium Islam warisan Utsmaniyah. Agama dan kultur Islam tidak ditolak, tapi dasar negara baru dari rakyat Turki "*People of Turkey*" adalah "kesadaran nasional" dan "kedaulatan nasional". Pencopotan wilayah Utsmaniyah di sana sini dan perpalingan golongan-golongan minoritas serta pengungsiannya menyebabkan cuma tinggal 97,3 % masyarakat Muslim Turki, suatu kebudayaan yang homogen pada aspek kultur dan etnis. Mempunyai kebudayaan, bahasa dan wilayah yang sama sehingga memungkinkan

³⁴ Dalam tipologi ini Indonesia tidak termasuk dalam catatan Esposito, bisa jadi karena aturan yang berlaku di Indonesia secara resmi menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan untuk memutuskan siapa Kepala Negara didasarkan pada pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam agama.

untuk menciptakan nasionalisme Turki.³⁵ Sejak tahun 1924 sampai kepada wafatnya pada tahun 1938, Mustafa Kemal melakukan serangkaian pembaharuan yang berujung pada sekularisasi, ia membangun pondasi kenegaraan yang memisahkan antara urusan agama, politik dan kenegaraan dalam kelembagaan. Kesultanan pada tahun 1922 secara resmi dihapuskan: sesudah itu Majelis Nasional Turki menghapuskan khilafah. Pada tahun yang sama jabatan, Syaikh-ul-Islami, yang memiliki otoritas pada bidang keagamaan pada ranah negara, serta Departemen Urusan Agama dan Waqaf diakhiri tugasnya. Ketentuan di dalam *Undang-Undang Kesatuan Pendidikan* menetapkan seluruh pendidikan bersifat sekuler, pada kesempatan yang sama pula menghapuskan sistem pendidikan Islam tradisional yang telah lama berkembang di Turki. Titik kulminasi disertai pondasi program Kemal Attaturk dirumuskan pada tahun 1928 saat amandemen Undang-Undang dilakukan secara resmi menghapuskan kalimat: "*Agama Resmi dalam negara Turki adalah Islam,*" dan hal-hal lain dalam konstitusi yang berkaitan dengan Islam. Selanjutnya konstitusi mengumumkan bahwa Republik Turki adalah negara Sekuler.

Sejalan dengan perjalanan waktu Mustafa Kemal juga berusaha melakukan monopolisasi atas kekuasaan negara dengan Partai Rakyat Republik (PRR), dengan partai ini, seperti disebutkan Mustafa Erdogan,³⁶ Mustafa Kemal melakukan penyusupan ke segala ruang masyarakat sipil. Pemeberontakan Kurdi tahun 1925, yang pecah di bagian timur Anatolia, memberikan elit penguasa

³⁵ *Ibid.* Hlm. 9.

³⁶ Mustafa Erdogan, "Islam Dalam Politik Turki: Pencarian Demokrasi Tanpa Islam," dalam Atila Yayla, (ed.), *Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar* (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2004), hlm. 96-97.

alasan untuk menekan segala bentuk oposisi dan elemen swatantra masyarakat, terutama yang aspirasinya berasal dari keyakinan agama. Setelah tahun 1925, negara Republik perlahan-lahan berubah menjadi alat PRR untuk mengubah struktur sosial dan kultur masyarakat Turki secara radikal sesuai cetak biru PRR untuk masyarakat sekuler-nasionalis dan untuk menciptakan manusia baru, atau dalam istilahnya Mustafa Erdogan sebagai manusia baru, *homo Kemalikus*. Dengan alasan ini, pers bebas ditekan, sistem pendidikan dimonopoli oleh negara (Undang-Undang Penyatuan Pendidikan, 1924), properti keagamaan dibawa ke bawah kendali ketat pemerintah (1924), dan semua perkumpulan sipil yang berpotensi untuk tetap independen dari negara dilarang atau dibubarkan. Jadi, tempat-tempat pertemuan agama dibubarkan tahun 1925, klub-klub Api Turki dilarang tahun 1931 dan Asosiasi Perempuan Turki dibubarkan tahun 1935. Untuk mempercepat upaya kontrol pemerintah juga menciptakan jaringan Rumah Rakyat. Hal-hal ini diharapkan akan mampu melancarkan proses indoktrinasi garis-garis sekuler-nasionalis, dengan tujuan menghegemoni secara kultur dan ideologi terhadap masyarakat oleh negara.

Tampaknya motor penggerak modernisme Turki mencoba mengadaptasi nilai-nilai bangsa lain yang kelihatannya lebih maju dibandingkan dengan bangsanya, Mustafa Kemal, dalam proyek modernisasinya berpijak pada spirit filosofis kebangsaan yang kuat dan berbasis pada aksentuasi identitas nasional. Masa transisi dari era kekhalifahan menuju bentuk baru tentunya membutuhkan elemen-elemen pendukung pada aspek teoritis-filosofis sebagai pandangan pembangunan. Ada beberapa prinsip atau sila yang melatarbelakangi proses

perjuangan Kemalisme di Turki, seperti Pancasila di Indonesia, prinsip tersebut antara lain: republikanisme, nasionalisme, populisme, sekulerisme, etatisme dan revolusionisme.³⁷

Untuk yang pertama republikanisme, sila ini bertujuan untuk mengalihkan garis demarkasi yang tadinya kekuasaan tertinggi berpusat kepada khalifah atau sultan kemudian dialihkan menjadi kekuasaan berada di tangan rakyat dengan representasi Parlemen. Republik Turki yang diproklamirkan pada 29 Oktober 1923 menandai berakhirnya Kesultanan Utsmani yang kemudian beralih menjadi Republik Turki. Hal tersebut kemudian mendapatkan eksese negatif atau lebih tepatnya reaksi keras dari Sultan dan sebagian besar kalangan ulama. Kebencian para Sultan di Arab terhadap kelahiran Republik Turki ditengarai lebih karena kekhawatiran mereka bagi semangat penghapusan dinastiisme lalu digantikan dengan parlemen rakyat.

Kedua, nasionalisme juga merupakan kekuatan kritik perlawanan terhadap ideologi Ottomanisme dan Islamisme yang secara geografis dan etnis meliputi berbagai wilayah, agama dan suku bangsa mulai dari Iran, Irak, Balkan, Afrika Utara, bahkan pengaruhnya pernah sampai Aceh.³⁸ Kemenangan republikanisme dan nasionalisme pada masa-masa tersebut disebabkan oleh ada kecenderungan pada awal abad ke-20 saat itu Kesultanan Utsmani (Ottoman Empire) kekuasaannya semakin merosot. Otot-otot birokrasi dan para pendukungnya kian melemah, sementara kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan militer Barat mulai

³⁷ Komarudin Hidayat dalam Pengantar, Binnaz Toprak. *Islam Dan Perkembangan Politik di Turki* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. xviii.

³⁸ *Ibid.*

bangkit. Kebangkitan dan supremasi Barat baru disadari oleh penguasa Ottoman ketika Jerman dan kawan-kawannya, termasuk Dinasti Utsmani, kalah dalam Perang Dunia I.

Kekalahan yang diderita pihak Ottoman pada PD I lantas menyebabkan ketidakpercayaan (*distrust*) banyak kalangan di Turki akan masa depan dinasti, sebaliknya dukungan terus meningkat kepada kalangan "pembaharu" dengan bendera nasionalisme-Turkisme, Mustafa Kemal semakin yakin akan dukungan massa untuk menghidupkan semangat kebangsaan, bukannya Kesultanan dan keislaman, karena, menurut Mustafa Kemal, hanya ideologi dan bendera kebangsaan yang mampu membangkitkan masyarakat dan bangsa Turki untuk mempertahankan identitas dan kehormatan dirinya di hadapan ancaman Eropa, terutama Inggris. Untuk mewujudkan semangat ini maka rakyat harus diberi ruang yang lebih luas dan hak-hak politiknya harus dihargai karena mereka inilah sesungguhnya pemilik, pewaris dan penerus perjuangan bangsa Turki.

Ketiga, untuk mendukung itu semua, maka ditetapkanlah sila populisme yang berarti kerakyatan, yaitu *the governance of the people, with the people, for the people*. Prinsip ini jelas berbeda dengan masa Kesultanan karena yang memegang dan mengendalikan politik adalah Sultan, bukannya rakyat.

Keempat, sila etatisme. Pemikiran ini berasal dari Barat yang berkembang di abad ke-19, yaitu campur tangan negara terhadap perencanaan dan pengaturan ekonomi rakyat, sebagai kritik terhadap paham ekonomi liberalisme. Di Turki, prinsip etatisme tidak hanya diberlakukan pada aspek ekonomi saja melainkan juga pada aspek sosial dan politik.

Kelima, sila sekulerisme, sebagai salah satu prinsip ideologi Kemalisme yang mengundang kontroversi dan caci maki serta kemarahan para ulama. Gejala sekulerisme di Turki sebenarnya merupakan bentuk kritik kalangan nasionalis-republikanis atas kedigdayaan Sultan dalam banyak hal, Sultan telah menggunakan simbol ulama dan agama untuk melestarikan legitimasi politiknya. Dinasti Utsmani bukanlah tipologi kekuasaan yang hanya berbasis pada dukungan kekuatan militer yang tangguh tetapi juga didukung oleh kepandaian penguasa dalam upaya meraih legitimasi dengan bersandar pada agama. Memang pada awalnya, penggunaan simbol keagamaan bisa diterima oleh rakyat bahkan memiliki daya panggil ideologis untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Utsmani.

Upaya untuk membangun negara nasional Turki mengarah pula pada proses Turkinisasi dalam bidang Islam. Tujuannya ialah untuk menggantikan Islam Arab, yang dianggap konservatif, merosot dan lebih banyak memikirkan masa lalu daripada masa kini, dengan Islam Turki yang modern. Pembaharuan diperkenalkan dengan mewajibkan bahasa Turki menggantikan bahasa Arab, sebagai bahasa agama. Penolakan terhadap pan-Islamisme dari pihak Utsmaniyah pada masa silam itu menyebabkan Islam di Turki merupakan agama nasional. Attaturk menggalakkan program peyalinan Al-Qur'an ke dalam bahasa Turki dan penggunaannya dalam Muazzin yang menyerukan azan shalat lima kali setiap hari, begitu juga saat khotib berkhotbah pada Shalat Jum'at.

Ikhtiar lain yang bertujuan untuk memperkuat pondasi republikanisme dan nasionalisme merembet kepada penciptaan sejarah baru dengan memutus sejarah

masa lalu yang dianggap banyak menghasilkan tipe pemikiran dan paradigma tradisional yang jauh tertinggal dari Barat. Sejarah Utsmaniyah diredam dengan menuliskan sejarah baru dengan corak identitas dan nasionalisme Turki. Begitu juga dengan ibukota yang tadinya berada di Istanbul dipindahkan ke daerah pedalaman Anatolia, yakni Ankara. Pengaruh Parsi dan Arab ditolak sebagai suatu simbol keterbelakangan dan kolot. Mungkin pembaharuan yang teramat radikal adalah menggantikan huruf Arab dengan huruf Latin. Perubahan ini secara efektif telah menjadikan angkatan muda Turki secara otomatis terputus dari warisan keagamaan dan kesusastraan Islam masa lampau yang berkembang pada masa kebesaran dan kemegahan imperium Utsmaniyah dalam literatur bahasa Arab dan huruf Arab. Perubahan tulisan ini memerlukan program massif bagi pembaharuan pendidikan supaya mampu membaca dan menulis huruf Turki yang baru. Bahasa Turki merupakan satu-satunya bahasa yang dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan, penulisan surat-surat resmi, dan publikasi-publikasi yang dicetak. Bahkan secara konsisten menginginkan terhapusnya serapan-serapan dari bahasa Arab dari peradaban bahasa Turki.

Seperti diutarakan pada bab pendahuluan bahwa selain motor penggerak modernisasi radikal oleh Mustafa Kemal sebagai garda depan, terdapat pula kalangan sutradara yang banyak memainkan pengaruhnya melalui jalur pemikiran dan konsepsi, salah satunya adalah Ziya Gokalp (1876-1924), seorang *Think Thank* dari proyek sekulerisme dan modernisme Turki. Ia adalah pendukung dan perumus utama Turkisme. Gokalp dianggap sebagai pemikir paling awal dan paling berpengaruh di kalangan para pemikir Turki abad ke-20. Seorang ideolog

nasionalis Turki. Menurut dia, Kekhalifahan Utsmaniyah harus menanamkan kesadaran bangsa-bangsa non-Turki yang berasal dari pecahan kekhalifahan.³⁹

Bila dilihat secara sekilas, Ziya Gokalp yang terlahir dengan nama Mehmed Diya' di Dyarbakr pada sekitar 1875 atau 1876, mulai dikenal dengan nama Ziya Gokalp pada 1911. Ia banyak bersinggungan dengan ide patriotisme dan konstitusionalisme ketika ayahnya masih hidup dan saat duduk di bangku sekolah lanjutan modern untuk mempelajari ilmu-ilmu modern dan bahasa Perancis. Ia juga belajar bahasa Arab, Parsi, dan ilmu-ilmu tradisional Islam dari pamannya dan, melalui interaksi seperti itu, ia kemudian banyak mengenal karya dan khazanah Islam menyangkut teologi dan filosofi dan mengenal banyak tokoh sufi. Pada tahun 1879 saat berada di Istanbul ia dipenjara selama satu tahun dan dikirim kemabali ke Dyarbakr. Setelah pecah Revolusi tahun 1908 Gokalp muncul sebagai salah satu penulis liberal dan dosen terkemuka di Dyarbakr. Pada tahun 1909 ia pergi ke Salonika sebagai anggota delegasi ke konvensi Komite untuk Persatuan dan Kemajuan (*Committee of Union and Progress*), dimana ia terus aktif hingga terpilih sebagai salah seorang anggota Komite Pusat. Sejak 1912 hingga 1919 Gokalp tinggal di Istanbul, dan disanalah ia menemukan fase kehidupannya yang paling penting dalam perjalanan karirnya. Dalam masa itu gagasannya tentang nasionalisme Turki dan Kekhalifahan Utsmaniyah menguat. Seusai Perang Dunia I, Gokalp dibuang ke Malta oleh penguasa Inggris. Setelah dibebaskan pada tahun 1921 ia bergabung dengan gerakan nasionalis di bawah pimpinan Mustafa Kemal. Ia wafat tahun 1924 ketika masih menjabat sebagai

³⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996), hlm. 27-45.

anggota Dewan Nasional Utama.⁴⁰ Dalam beberapa karya tulisnya Gokalp banyak mengangkat isu-isu nasionalisme (Turkisme) dan hubungannya dengan Islam dan westernisasi. Secara garis besar Gokalp dalam tulisannya mengajarkan bagaimana seharusnya bangsa Turki mengadopsi nilai-nilai yang ada pada peradaban Barat, dan bagaimana upaya adaptasi itu bisa selaras dan sesuai dengan latar belakang Turki dan Islam. Ia hendak mengelaborasi antara tradisi yang telah lama berkembang di Turki dengan nilai-nilai baru (seperti nasionalisme) dari peradaban modern kala itu (Barat).

Keterlibatan dalam alur Perang Dunia I atau II mau tidak mau harus diikuti oleh para pemimpin Turki, lebih tepatnya penerus Turki Utsmani, sebab secara geografis negara mereka sangat dekat dari episentrum api peperangan, negara Eropa. Secara geopolitik mereka juga mewarisi sejarah penaklukan di daratan Eropa oleh pendahulu Turki, generasi awal Ottoman Empire. Sehingga perang sangat berdampak pada stabilitas dalam negeri Turki. Di tengah instabilitas itu militer pada tahun 1913 melakukan konspirasi dengan dipimpin oleh kaum Buruh, yang ideologinya didasarkan pada pandangan positivisme, nasionalisme serta solidarisme, menghentikan proses politik demokratis dan mencoba menindas segala gerakan oposisi, apakah itu Islam, liberal, sosialis, atau kelompok sipil etnis. Perang Dunia I diikuti dengan penangkapan pejabat pemerintah lama Ottoman oleh kaum Buruh dan proses parlementer berhenti sementara sampai akhir 1919, ketika pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat (Meclis-i Mebusan) diselenggarakan. Namun, segera setelah majelis baru Ottoman mulai

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 31-32.

beroperasi mereka harus menghentikan kerjanya (April 1920) di bawah tekanan angkatan bersenjata Inggris yang menduduki Istanbul. Sesudahnya Sultan (khalifah) membubarkannya secara resmi.⁴¹

Pembubaran parlemen mendorong organisasi pembebas nasional Anatolia, di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal, untuk memprakarsai Majelis Agung Nasional (MAN) di Ankara tanggal 23 April 1920. MAN ditujukan sebagai alat perjuangan pembebasan khalif-sultan dan negeri tersebut dari kekuasaan penjajah asing. MAN memfokuskan usahanya untuk mengklaim otoritas eksklusif atas “urusan neagra”, dan, sebenarnya, ia menunjukkan banyak perhatian kepada penjagaan legitimasi demokratis, walaupun ada situasi darurat karena perang kemerdekaan. Karena alasan ini, MAN hampir tidak bisa meloloskan undang-undang yang menjadikan Kemal Panglima Tertinggi angkatan bersenjata nasionalis, suatu kekuasaan yang seharusnya merupakan bagian otoritas kedaulatan MAN sendiri.

Segera setelah berakhirnya “perjuangan nasional”, cara kerja bidang politik mulai berubah, dan kepentingan demokratis untuk legitimasi dan pluralisme perlahan-lahan digantikan oleh metode-metode yang lebih autokrat yang diprakarsai oleh Mustafa Kemal dan rekan-rekan dekatnya. Langkah pertama ke arah ini terjadi ketika mayoritas MAN, di bawah pengaruh Mustafa Kemal, meloloskan undang-undang untuk pemilihan umum awal yang merupakan pelanggaran ketentuan dalam konstitusi 1921. Dilaksanakan pada musim panas 1923, pemilihan umum menghasilkan “pembersihan” oposisi parlemen

⁴¹ Mustafa Erdogan, “Islam Dalam Politik,” hlm. 94.

“Kelompok Kedua” (Ikinci Group), yang selama ini terus menentang usaha-usaha Musata Kemal untuk menguasai MAN. Dengan demikian MAN kehilangan ciri representative demokratisnya, dan hal ini pada akhirnya memudahkan Mustafa Kemal dan rekan-rekan dekatnya memanipulasi agenda MAN dan mendominasi kebijakan negara tersebut. Pada era ini, Mustafa Kemal mengkonstruksi kekuasaan yang hegemonik dengan menafikan eksistensi kalangan lain, oposisi dilarang bersuara dalam pemerintahan Turki. Bahkan, tantangan politis pertama, datang dari Partai Progresif Republikan menuduh Kemal melakukan monopoli kekuasaan politik dan membentuk pemerintahan yang autokratis, mereka adalah teman-teman Kemal sendiri yang berjuang bersama selama perang pembebasan. Akibatnya partai yang beroposisi itu dilarang pemerintah pada tahun 1925, hanya beberapa tahun sesudah pembentukannya, dan tokoh-tokoh partai ini dihukum penjara seumur hidup dalam suatu pengadilan militer. Bisa jadi karena takut dianggap autokratis Kemal kemudian membentuk partai oposisi Partai Republikan Bebas pada tahun 1930 dengan A. Fethi sebagai pemimpin umum, partai yang dipimpin sendiri oleh teman dekat Kemal yang diproyeksikan menjadi partai oposisi dengan garis liberal untuk mengkritik rezim, negara atau presiden, Mustafa Kemal sendiri, namun kritik tersebut di bawah kendali Kemal, sehingga partai oposisi itu lebih tepat disebut sebagai partai oposisi boneka.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi pemerintahan modern, yang melibatkan partisipasi sistem politik modern seperti parlemen, majelis agung atau

lembaga kepresidenan di Turki telah memiliki akar sejak awal berdirinya Republik Turki.⁴²

B. Pergulatan Ideologi Islam dan Sekulerisme di Turki Modern

Seperti diterangkan di atas bahwa arah pembangunan nasional di Turki mengacu pada ide-ide rasionalitas yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat, salah satunya adalah Sekulerisme. Namun sebelum mengeksplorasi pengalaman bernegara di Turki dengan Sekulerismenya ada baiknya untuk penyusun terangkan lebih jauh akan basis teori dari Sekulerisme.

Sekuler, secara leksikologis, istilah sekuler berasal dari kata Latin *saeculum* yang berarti ganda, ruang dan waktu. Ruang merujuk pada pengertian duniawi, sedangkan waktu menunjuk pada pengertian sekarang atau zaman kini.⁴³ Jadi kata *saeculum* berarti masa kini atau zaman kini. Dan zaman kini atau masa kini menunjuk pada peristiwa di dunia ini, atau juga berarti peristiwa masa kini. Atau boleh dikatakan bahwa makna "sekuler" lebih ditekankan pada aspek waktu atau periode tertentu di dunia yang dipandang sebagai sebuah proses sejarah.

⁴² Hal serupa juga terjadi pada periode sebelum Republik Turki berdiri, yakni era Tanzimat 1839 sebuah usaha reorganisasi oleh generasi penerus Turki yang dikenal dengan Gulhane Hatt-I Humayumu (Maklumat Kerajaan Gulhane) dan Islahat Fermani 1859 (maklumat reformasi). Disusul dengan Monarki Konstitusional diberlakukan oleh Abdulhamit II, ia juga memberlakukan suatu konstitusi monarki semi parlementer tahun 1876. Walaupun konstitusi itu dicabut namun kemudian diberlakukan lagi karena desakan Young Turk (gerakan Turki Muda) pada tahun 1908, dan pada tahun-tahun berikutnya konstitusi diamandemen untuk menyesuaikan dengan konstitusi monarki parlementer gaya Barat.

⁴³ Lihat Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 18.

Konotasi ruang dan waktu (*spatio-temporal*) dalam konsep sekuler ini secara historis terlahirkan dari dalam sejarah Kristen Barat. Di Barat pada Abad Pertengahan, telah terjadi langkah-langkah pemisahan antara hal-hal yang menyangkut masalah agama dan non-agama (bidang sekuler). Sekuler yang diidentikkan dengan kekinian dan cenderung duniawi perlahan memperloeh kemerdekaannya dari intervensi Gereja (agama).

Istilah Sekuler kemudian berkembang, seperti pada abad ke19 diartikan sebagai sesuatu yang diletakkan pada ranah kekuasaan, Gereja tidak berhak ikut campur dalam urusan politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Meskipun saat itu telah mulai memunculkan reaksi keras dari beberapa kalangan seperti Robertson dari Brighton, yang pada 1863 mengatakan, "Kita mengecap suatu bidang kehidupan sebagai sekuler, dan kemudian agama menjadi hal yang kabur tidak riil."⁴⁴

Dari pengertian sekuler yang diartikan sebagai pertentangan antara masalah agama dan non-agama, dan sekuler yang berarti *wordly not religious ot spiritual* (duniawi, tidak bersifat religius atau spiritual), maka sebenarnya semua hal dapat dipertentangkan dengan agama. Kehidupan dunia yang tidak suci dipertentangkan dengan kehidupan Gerejani yang suci; kehidupan dunia dan negara yang menerima perubahan dan perkembangan dipertentangkan dengan kehidupan Gerejani yang suci.

Sekulerisasi, pengertian sekulerisasi sering diartikan sebagai pemisahan antara urusan negara (politik) dan urusan agama, atau pemisahan antara urusan

⁴⁴ Brighton dalam Pardoyo, Sekulerisasi..", hlm. 19.

duniawi dan ukhrawi (akhirat). Sekularisasi, sebagaimana yang telah berkembang sejak Abad Pertengahan, menunjukkan arah perubahan dan penggantian hal-hal yang bersifat adi-kodrati dan teologis menjadi hal-hal yang bersifat alamiah, dalam dunia ilmu pengetahuan yang menjadi serba ilmiah dan argumentatif. Seorang pengamat sosial politik Barat menulis, "*The trend a new way a secular and rational interpretation us known as 'secularization'.*"(kecenderungan mengenai cara melakukan interpretasi yang bersifat sekuler dan rasional itulah yang dikenal sebagai sekularisasi).⁴⁵

Dengan demikian, sekularisasi dapat diartikan sebagai pembebasan manusia dari agama dan metafisika. Artinya, terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religius yang suci, dari pandangan dunia yang semu, atau dari semua mitos supra-natural. Kemudian manusia mengalihkan perhatiannya lepas dari dunia tersebut ke arah dunia kekinian dan kedisinian.

Sekulerisme, dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekulerisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu.

Sekulerisme juga merujuk ke pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus di dasarkan dari apa yang di

⁴⁵ *Ibid.*

anggap sebagai bukti konkrit dan fakta, alih-alih berdasarkan pengaruh keagamaan.

Tujuan dan argumen yang mendukung sekulerisme beragam. dalam Laisisme Eropa, di usulkan bahwa sekulerisme adalah gerakan menuju modernisasi dan menjauh dari nilai-nilai keagamaan tradisional. Tipe sekulerisme ini, pada tingkat sosial dan filosofis seringkali terjadi selagi masih memelihara gereja negara yang resmi, atau dukungan kenegaraan lainnya terhadap agama.

Istilah sekulerisme pertamakali digunakan oleh penulis Inggris George Jacob Holyoake pada tahun 1846.⁴⁶ Walaupun istilah yang digunakannya adalah baru, konsep kebebasan berpikir yang darinya sekulerisme didasarkan, telah ada sepanjang sejarah. Ide-ide sekuler yang menyangkut pemisahan filosofi dan agama dapat dirunut baik ke Ibnu Rushdi dan aliran filosofi Averoisme. Holyoake menggunakan istilah sekulerisme untuk menjelaskan pandangannya yang mendukung tatanan sosial terpisah dari agama, tanpa merendahkan atau mengkritik sebuah kepercayaan beragama. Sebagai seorang Agnostik, Holyoake berpendapat bahwa "sekulerisme bukanlah argumen melawan Kristianitas namun terpisah dari itu. sekulerisme tidak mengatakan bahwa tidak ada tuntunan atau penerangan dari ideologi lain, namun memelihara bahwa ada penerangan dan tuntunan di dalam kebenaran sekuler, yang kondisi dan sangsinya berdiri secara mandiri dan berlaku selamanya. Pengetahuan sekuler adalah pengetahuan yang didirikan di dalam hidup ini, berhubungan dengan hidup ini, membantu

⁴⁶ Holyoake mendefinisikan sekulerisme sebagai sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah (duniawi) dan lepas dari agama atau prinsip supranatural (hal-hal ghaib). Lihat Pardoyo, *Sekularisasi*. Hlm. 257.

tercapainya kesejahteraan di dunia ini, dan dapat di uji oleh pengalaman di dunia ini."

Barry Kosmin dari Institut Penkajian sekulerisme di dalam Masyarakat dan Budaya membagi sekulerisme mutakhir menjadi dua jenis, sekulerisme keras dan lunak. Menurutnya, "sekuleris keras menganggap pernyataan keagamaan tidak mempunyai legitimasi secara epistemologi dan tidak dijamin baik oleh agama dan pengalaman." Namun, dalam pandangan sekulerisme lunak, "pencapaian kebenaran mutlak adalah mustahil dan oleh karena itu, toleransi dan skeptisme harus menjadi prinsip dan nilai yang dijunjung dalam diskusi antara ilmu pengetahuan dan agama.

Dalam istilah politik, sekulerisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan perbedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas.

Sekulerisme, seringkali di kaitkan dengan Era Pencerahan di Eropa, dan memainkan peranan utama dalam Peradaban Barat. Prinsip utama Pemisahan gereja dan negara di Amerika Serikat, dan Laisisme di Perancis, didasarkan dari sekulerisme.

Periodisasi kemunculan trend sekulerisme seperti angin perubahan yang melanda kawasan Eropa berada pada spektrum Reformasi, Renaissance, serta Gerakan Protestanisme, dan kemudian disusul dengan era Pencerahan. Oleh karena itu “sekularisasi-sekulerisme” mempunyai akar kuat dalam sejarah filsafat Barat. Apalagi jika dikaitkan dengan munculnya paham yang mengagungkan akal (rasionalisme). Sehingga paham ini tidak hanya bangga akan kemampuan, akan tetapi membuat manusia semakin congkak dan angkuh, kemudian mengesampingkan hal-hal yang di luar jangkauan akalnya. Dengan begitu realitas Tuhan menjadi dikesampingkan. Ada yang meragukannya (agnostisisme), bahkan ada yang menentang (ateisme).

Pada perkembangan berikutnya, paham atau aliran filsafat yang bercorak positivistik semakin menghantarkan kepada pemikiran yang serba ilmiah, rasionalistis, dan materialistis. Hal ini pula yang telah ikut menghantarkan kepada pemikiran yang bercorak sekularistis. Orang tidak lagi memandang agama sebagai ukuran moral dalam perilaku maupun dalam pengambilan keputusan, serta tidak lagi menghiraukan nilai agama, sebab telah digantikan dengan nilai yang bersifat utilities, hedonistis, dan pragmatis. Dari segi pemikiran ataupun tindakan, menampakkan kecenderungan dikotomis antara yang duniawi dan ukhrawi, antara yang material dan spiritual, antara yang sacral dan profan, dan antara yang imanensial dan transendental.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 251.

Kebanyakan agama menerima hukum-hukum utama dari masyarakat yang demokratis namun mungkin masih akan mencoba untuk mempengaruhi keputusan politik, meraih sebuah keistimewaan khusus atau. Aliran agama yang lebih fundamentalis menentang sekulerisme. Penentangan yang paling kentara muncul dari Kristen Fundamentalis dan juga Islam Fundamentalis. Pada saat yang sama dukungan akan sekularisme datang dari minoritas keagamaan yang memandang sekularisme politik dan pemerintah sebagai hal yang penting untuk menjaga persamaan hak.

Negara-negara yang umumnya dikenal sebagai sekuler di antaranya adalah Kanada, India, Perancis, Turki, dan Korea Selatan, walaupun tidak ada dari negara ini yang bentuk pemerintahannya sama antara satu dengan yang lainnya.

Proses sekulerisasi yang dilakukan di Turki oleh sebagian kalangan dianggap sebagai suatu keberhasilan sekaligus sebagai ijtihad baru manusia dalam menentukan nasibnya, sebagian yang lain justru menganggap sekulerisasi di Turki adalah kegagalan.

Pihak yang mendukung seperti presiden Sukarno⁴⁸, Mohammad Arkoun, beralasan bahwa sekulerisme merupakan proses yang tepat untuk memerdekakan agama dari negara dan memerdekakan negara dari agama. Sukarno yang dikenal

⁴⁸ Pemilihan Sukarno sebagai pihak yang mendukung lebih karena kapasitasnya sebagai tokoh nasional yang sangat menentukan arah perjuangan nasional di Indonesia, barangkali karena kekaguman Sukarno kepada Mustafa Kemal ia kemudian mengadopsi beberapa nilai yang dianggap sesuai dengan jalan revolusi Indonesia saat ia menjadi *top leader*. Termasuk Sukarno kontroversial dalam gagasan Pancasilannya.

sebagai pengagum Mustafa Kemal dari tulisannya⁴⁹ dapat dilihat bahwa Sukarno sangat mendukung gagasan sekulerisme di Turki karena dengan diadakannya pemisahan antara keduanya maka eksistensi agama, khususnya Islam, mengarah pada hal-hal yang lebih segar, tidak kolot, modernis dan menyesuaikan dengan semangat zaman. Justru kalau agama berada di bawah tangan pemerintah maka akan terjadi ketergantungan. Sukarno kemudian menguatkan argumennya dengan mengutip beberapa penulis seperti Halide Edib Haoum yang menulis: "Kalau Islam terancam bahaya kehilangan pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena tidak diurus pemerintah, tetapi ialah justru karena diurus oleh pemerintah. Umat Islam terikat kaki tangannya dengan rantai kepada politik pemerintah. Hal ini satu halangan yang besar sekali buat kesuburan Islam di Turki dan bukan saja di Turki, tetapi dimana-mana saja, di mana tangan pemerintah dalam urusan agama, di situ menjadilah halangan besar yang tak dapat dienyahkan."⁵⁰

Senada dengan kutipan di atas disusul dengan anggapan serupa oleh Mahmud Essad Bey,⁵¹ yang mengatakan perlunya memerdekakan agama dari belenggu pemerintah, agar menjadi subur: "Manakala agama dipakai buat pemerintah, ia selalu dipakai sebagai alat penghukum di tangan raja-raja, orang-orang zalim dan orang-orang tangan besi. Manakala zaman modern memisahkan

⁴⁹ Lihat misalnya tulisan Sukarno, "Apa Sebab Turki Memisah Agama dan Negara," dalam Imam Toto K. Raharjo (ed.) *Bung Karno dan Tata Dunia Baru* (Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2001), hlm. 108. Tulisan tentang Turki tersebut ditulis oleh Sukarno untuk majalah *Panji Islam* tahun 1940 saat dirinya dalam masa pembuangan di Ende.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 110.

⁵¹ *Ibid.*

urusan dunia dari banyak kebencanaan, dan ia memberikan kepada agama itu satu singgasana yang mahakuat di dalam kalbunya kaum yang terpercaya.” Kemudian dilanjutkan lagi dengan mengutip Mustafa Kemal: ”Saya merdekakan Islam dari ikatannya negara, agar supaya agama Islam bukan tinggal agama memutarakan tasbih di dalam masjid saja, menjadilah satu gerakan yang membawa kepada perjuangan.”⁵²

Lebih jauh Sukarno menganggap jalan sekulerisme pilihan yang tepat untuk konteks saat itu, yakni tahun 1914-1918 masa-masa pasca perang dunia, kondisi internasional masih kental dengan aroma peperangan sehingga jika Turki dengan komando Mustafa Kemal tidak mengambil tindakan cepat, dari segi militer tidak memperkuat diri, dari sisi spiritual tidak mengokohkan mental dengan semangat nasionalisme realistis untuk membebaskan Turki dari serangan asing, maka ceritanya akan lain, malah Turki akan dihabisi oleh kekuatan militer asing. Islam sebagai agama dan ulama sebagai penjaga moralnya, saat itu, tulis Sukarno mengutip Mustafa Kemal cenderung melemahkan perlawanan sebab tidak mampu memberikan tawaran yang tepat untuk keluar dari krisis transisi di tengah situasi perang, alih-alih mendukung mereka (kalangan agama) malah memakruhkan hal-hal yang bersifat modernis⁵³, apalagi khalifah yang secara *de facto* terkooptasi oleh pihak Inggris.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Modern dalam kondisi saat itu lebih bersifat perlengkapan perang, persenjataan militer. Ulama Turki suatu kali pernah mengharamkan penggunaan mortir dalam perang dengan alasan yang sebetulnya kurang tepat dan tidak realistis.

Mustafa Kemal hendak menjadikan Turki sebagai negara yang membebaskan kepada rakyatnya bebas menentukan sendiri agama apa yang hendak dianut, agama apa saja yang hendak dipilih, negara hanya menjadi pihak akomodasionis. Tindakan sekulerisme Mustafa Kemal kemudian oleh Sukarno dikembalikan lagi kepada penilaian masing-masing, baginya, biarkan sejarah yang membuktikan apakah Kemal benar atau salah, apakah ia durhaka⁵⁴ kepada Islam atau bijaksana, tetapi Sukarno secara eksklusif hendak menjelaskan kepada publik tentang gagasan sekulerisme Turki dan agar tidak menghakimi Mustafa Kemal secara sepihak.

Mohammed Arkoun⁵⁵ sendiri tidak mendukung dan tidak pula menolak sepenuhnya atas gagasan sekulerisme yang terjadi di Turki. Arkoun malah melihat sikap Attaturk untuk melaksanakan Sekulerisme sebagai sikap netral terhadap agama dan melembagakan kode hukum Swiss di Turki. Lantas ia

⁵⁴ Sukarno dalam tulisannya menguraikan banyak hal menarik tentang kekagumannya dengan gagasan dan sosok Mustafa Kemal. Ia mendeskripsikan tentang Kemal sebagai sosok yang sangat membenci orang-orang yang selalu berpikir melayang ke awan-awan dan tidak realistis, mereka yang selalu mengagumkan masa lalu Nabi beserta kesuksesan empat orang khalifahnyanya. Baginya empat belas abad yang lalu sangat berbeda dengan kondisi Turki dalam kepungan bangsa asing dan membutuhkan solusi cepat bukan malah bermain dengan terminologi, makruh atau tidak, halal atau haram.

Untuk pemikiran Sukarno sendiri sebenarnya ia adalah presiden dengan pemikiran jalan tengah, ia adalah Islamis namun bebaju nasionalis. Mengendaki Islam modernis yang segar dan bersemangat modernis, bukan Islam loyo. Sekulerisme menurutnya perlu agar terdapat independensi dari agama, tidak ada masalah apakah negara mau mengurus agama atau tidak namun yang jelas tanpa intervensi negara pun agama akan tetap eksis, seperti pengalaman negara-negara Barat dengan tradisi sekulerismenya. Ia mengilustrasikan tatakala negara bebas menentukan pilihan untuk tidak mengurus agama maka nantinya tergantung kepada pemeluk agama masing-masing. Jika anggota parlemen berasal dari kalangan agama maka produk aturannya akan berbau agama, jika anggota parlemennya berbenda politik Islam dan menyuguhkan Islam yang bersemangat maka tentunya produknya akan lebih segar dan bermanfaat, sebaliknya kalau anggota parlemen dengan bendera Islam namun tidak semangat maka produk aturan bernuansa Islam sulit untuk diharapkan.

⁵⁵ Lihat Muhammed Arkoun, *Rethinking Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LPMI, 1996), hlm. 33-37.

mempertanyakan apakah tindakan-tindakan tersebut harus dianggap sebagai fenomena terpisah atau sebagai indikasi bahwa dunia muslim sedang berkembang menuju sekulerisme demokratik dan pluralistik seperti yang dahulu dialami oleh Barat Kristen.

Di satu sisi, lanjut Arkoun, Turki sendiri diragukan kapasitasnya untuk menjadi bagian dari negeri Barat, Turki dianggap belum mampu sepenuhnya menjalankan Sekulerisme seperti sikap Dewan Eropa menanggapi kemungkinan Turki untuk bergabung dalam masyarakat Eropa. Sedangkan pada internal Turki, Attaturk oleh warga negaranya dianggap sebagai pahlawan, lebih mampu memperadabkan Turki, dan tanpa ragu melepaskan negaranya dari belenggu konservatisme Turki Utsmani dan mengantarkan menuju modernitas dengan suatu metode atau keyakinan, yang sebetulnya bisa diperdebatkan.

Disamping persoalan di atas, Arkoun juga menyatakan perlunya membedah akar pemikiran yang berkembang saat itu, agar dapat mengevaluasi segala hal maka perlu dipetakan, Islam seperti apa yang dikenal Attaturk di Turki antara tahun 1881 dan 1938—yakni, selama persiapan aksi? Dan pada waktu yang sama, konsepsi sekulerisme apa yang dapat diakses olehnya.

Secara garis besar, tulis Arkoun, pandangan tentang Islam tahun 1880 dan 1940⁵⁶ menunjukkan fenomena kenaifan dalam kesadaran diri Muslim. Lawatan

⁵⁶ Masa-masa ini juga bisa disebut sebagai masa transisi di berbagai belahan dunia. Di Turki sendiri latar belakang psikologis samapai Periode Perang Dunia II masih agak kaget dalam memilih trend yang tepat dalam mengelaborasi konsepsi bernegara modern. Arkoun mencontohkan Abdullah Cevet, editor surat kabar Turki, *Ichtihad*, menulis secara naif tnetang zaman menjelang revolusi Attaturk: "Tidak ada peradaban kedua; peradaban berarti peradaban Eropa dan harus diimpor dengan segala bunga dan putiknya." Sedangkan pada ranah tipologi sekulerisne diasosiasikan dengan Revolusi Perancis yang meyakini mereka dapat mengganti pemujaan Kristen dengan pemujaan Wujud Tertinggi Kebebasan.

beberapa warga Muslim, mayoritas kaum muda⁵⁷ yang dikirim untuk belajar, ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas di Eropa telah menghantarkan mereka untuk menjalani kekagetan budaya (*shock culture*) yang sebelumnya tidak dijumpai dalam kehidupan mereka. Di negara-negara Eropa mereka mendapati segala sesuatu yang kontras dengan nilai tradisionalisme, kondisi sosial yang memprihatinkan, aroma pasca penjajahan masih kental dan kemunduran-kemunduran pada aspek kehidupan lainnya. Kondisi Eropa sangatlah menjanjikan kota-kota seperti Paris, London, Berlin, Brussels, Roma dan Marseille menginspirasi⁵⁸ banyak pelajar dari negara-negara "selain" Eropa untuk menggali beragam nilai dan selanjutnya ditransformasikan dalam pengalaman bernegara di negeri masing-masing, salah satunya gagasan Sekulerisme.

Berbeda dengan Sukarno dan Arkoun, Nurcholis Majid⁵⁹ atau Cak Nur justru melihat proses modernisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal dan rekan-rekannya sebagai bentuk kegagalan,⁶⁰ ia menyalahkan Mustafa Kemal yang terlalu mengkambing hitamkan Islam sebagai penyebab utama kemunduran Turki. Kaum modernis menurutnya telah menghukum Islam⁶¹ sebagai agama yang tidak kompatibel dengan modernitas.

⁵⁷ Attaturk sendiri pada masa mudanya masuk di Akademi Militer Toulouse di Prancis.

⁵⁸ Muhammed Arkoun, *Rethinking Islam*, hlm. 33-37.

⁵⁹ Pemilihan tokoh yang mendukung dan yang menolak seperti, salah satu, disebutkan pada Sukarno, namun secara keseluruhan didasarkan pada aspek representasi, mencari pendapat yang tidak sama untuk dijadikan bahan komparasi dalam melihat lingkaran diskursus Sekulerisme di Turki dari masa ke masa.

⁶⁰ Nurcholish Majid, "Turki: Contoh Kegagalan Modernisasi," dalam Budi Munawar Rahman, (ed.), *Ensiklopedi Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Paramadina bekerjasama dengan Mizan, 2007), hlm. 3504-3505.

Seharusnya, sebut Cak Nur, Islam tidak dipersalahkan melainkan Islam sebagai ideologi keagamaan yang berisi nilai-nilai harus diinterpretasikan untuk menggali sumber autentik yang lebih dinamis di dalamnya. Sehingga dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan peradaban. Anjuran seperti itu dikuatkan dengan argumen yang merekomendasikan untuk mendengarkan saran-saran dari kalangan modernis-Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh.⁶²

Ada semacam anomali sejarah juga dalam kasus Turki,⁶³ jika dilihat dari segi geografis sebenarnya Turki harus menjadi salah satu negara maju setara dengan negara-negara tetangganya, sebab Turki sangat dekat dengan lingkaran adi kuasa kemajuan di dunia, yakni Eropa, logikanya semakin dekat suatu negara dengan ide kemajuan maka semakin dekat pula ia dalam merencanakan proses kemajuan. Namun bukan kemajuan yang diperoleh, Turki malah ditinggal jauh

⁶¹ Gerakan kaum nasionalis seperti dicatat Binnaz Toprak, di bawah kepemimpinan Kemal bertujuan menciptakan (a) sebuah ideologi gerakan yang bisa memberi legitimasi politik kepada rezim nasional serta tujuan-tujuannya, (b) otoritas negara yang menguasai para anggota individu di masyarakat dan kelompok-kelompok etnis, kelompok agama atau kelompok-kelompok lainnya, dan (c) identitas nasional yang berfungsi sebagai agen bagi mobilisasi masyarakat.

Dalam ketiga hal ini, teologi dan tradisi-tradisi Islam dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kaum nasionalis Kemalis. *Pertama*, karena signifikansi teologis bahwa Islam menempatkan agama sebagai basis struktur-struktur sosial, legal dan politik, tidak selaras dengan ideologi Republik sekuler. *Kedua*, walaupun pemikiran Islam sangat menekankan otoritas negara dan kewajiban individu untuk mematuhi, konsep otoritas yang sah terletak pada pendirian bahwa otoritas itu mesti mencerminkan kehendak Tuhan, bukannya kedaulatan rakyat atau formula tertentu lainnya. Konsep Republik yang berdasarkan pada kedaulatan bangsa tidak sesuai dengan Islam. *Ketiga*, definisi Islam mengenai keberagaman individu dalam komunitas Mukmin sangat bertentangan dengan konsep identitas nasional yang menyingkirkan definisi-definisi religius mengenai keanggotaan kelompok. Lihat Binnaz Toprak, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 68-69.

⁶² Cak Nur dalam kesempatan yang sama juga menyetarakan antara Al-Afghani, Abduh dan Sukarno. Dalam hal ini Sukarno terlihat sebagai modernis-Islam, dalam pandangan Sukarno memang Islam bukan untuk dihakimi dan dihempaskan dari ruang modernitas, yang lebih tepat adalah menangkap “Api Islam”, dan meninggalkan abunya, sebagaimana terekam dalam sejarah kegemilangan Islam selama berabad-abad tanpa menggusur peran agama.

⁶³ Nucholis Madjid, “Turki...”, hlm. 3505

oleh negara-negara lain yang lebih jauh dari lingkaran elit dunia, Jepang⁶⁴ yang saat ini menjadi salah satu raksasa dunia sangat jauh secara geografis dengan Eropa, tetapi spirit kemajuan mereka setara dengan Eropa.

Kembali kepada diskursus mengenai setuju dan tidak setuju dengan gagasan sekulerisme di Turki, pandangan yang juga menganggap sekulerisasi di Turki sebagai bentuk ekspresi modernisasi berlebihan adalah Mustafa Erdogan,⁶⁵ ia melihat sekulerisasi yang ada di Turki sebagai yang radikal, ia berpendapat bahwa negara telah mensubordinasikan Islam sebagai agama dan terlarang dalam aktifitas publik dengan kontrol secara berlebihan. Negara telah memandang Islam sebagai penyebab utama status kurang berkembangnya Turki. Bahkan lebih jauh negara ingin menghancurkan Islam dan budayanya yang merupakan kekuatan di Turki. Permusuhan terhadap Islam terjadi sejak kepemimpinan Mustafa Kemal kemudian dilanjutkan oleh para pewaris setia sekulerisme, mereka ini sering disebut sebagai elit Kemalis, dengan unturnya sebagian besar dari kalangan militer.

Elit Kemalis pun dalam melaksanakan permusuhannya terhadap Islam dengan bangga mengatakan didasarkan atas prinsip Sekulerisme. Padahal lanjut Erdogan mengutip Kedouire, sekulerisme Turki berbeda dengan model Barat:

⁶⁴ Jepang maju menurut Cak Nur karena mereka mampu mengadaptasi Ilmu Pengetahuan secara maksimal dan sangat detil dalam hal perencanaan baik kultur maupun struktur. Turki, setidaknya ketika dibawah kendali Kemal ada rencana untuk melakukan modernisasi namun terhalang oleh sistem kebudayaan keagamaan setempat. Seperti alasan di atas, terlalu menghakimi Islam dan tidak didukung oleh subsidi fatwa yang memiliki semangat kemajuan dan modernitas dekat dengan asimilasi sains dan agama oleh kalangan agamawan (*rijal al-din*).

⁶⁵ Mustafa Erdogan, "Islam Politik..", hlm. 104.

”(ini) bukanlah kondisi yang dapat ditemukan dalam politik Eropa modern dan biasanya digambarkan dalam frase ‘suatu gereja bebas dalam negara bebas’.”⁶⁶

Agar lebih jelas tentang kebijakan elit Kemalis terhadap Islam ada baiknya untuk melihat catatan D.E. Smith tentang kebijakan Sekularisasi dalam dunia modern dengan beberapa tipologi: *pemisahan pemerintahan, ekspansi pemerintahan, transvaluasi pemerintahan dan dominasi pemerintahan*. Hal tersebut dapat dilihat sebagai tahap-tahap, walaupun proses sekularisasi tertentu dapat mengikuti atau tidak mengikuti semua tahap. Pada tahap pertama, pemerintah dipisahkan dari ideologi agama dan struktur kerohanian. ”Sekularisasi pemisahan pemerintahan melibatkan pemutusan hubungan antara agama dan pemerintahan. Pemisahan pemerintahan sering mengakibatkan mengkerutnya pemerintahan, ketika pemerintah berhenti melakukan praktek-praktek keagamaan. Dalam tahap ekspansi pemerintahan, negara mulai menyelenggarakan fungsi-fungsi pengatur dalam lingkup sosio-ekonomi yang tadinya dilakukan oleh struktur-struktur keagamaan. Pemerintahan melebarkan fungsinya dengan mengorbankan agama. Sekularisasi transvaluasi pemerintahan, yaitu aspek atau tahap ketiga, melibatkan dukungan atau penciptaan nilai-nilai politik sekuler. Melalui proses sekularisasi transvaluasi pemerintahan, negara melakukan sekularisasi budaya politik, dasar legitimasi, dan identitas nasional.

Menurut Smith, walaupun ketiga aspek sekularisasi ini adalah universal dalam pembangunan pemerintahan-pemerintahan modern dalam satu setengah abad terakhir, hanya dalam masyarakat keagamaan yang sangat kuatlah dapat

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

dilihat dicobanya suatu bentuk sekularisasi yang lebih radikal: dominasi pemerintahan atas keyakinan, praktek agama, serta struktur kerohanian. Hal ini melibatkan ekspansi pemerintahan ke dalam ruang lingkup yang diakui sebagai lingkup agama murni untuk menghancurkan atau secara radikal merubah agama. Dengan kata lain, sekularisasi dominasi pemerintahan melibatkan serangan terbuka pemerintah terhadap dasar keagamaan budaya umum dan pembebanan paksa ideologi sekuler pada budaya politik. Dalam pengingkaran segala otonomi dalam lingkup keagamaan, negara beroperasi dengan dasar pikiran totaliter, walaupun filosofi keseluruhannya tidak selalu secara eksplisit totaliter.

Dalam kasus Turki, sekulerisme Kemalis berpijak bukan pada pemisahan antara agama dan negara tetapi pada kontrol pemerintah atas agama. Menurut Leven Koker, negara berusaha mengganti sistem nilai Islam dengan sistem yang "ilmiah". Negara Republik mengikuti "dominasi pemerintahan", atau sekularisasi radikal, pola seperti yang diutarakan Smith sendiri dan ahli Turki, Liter Turan. Dengan sejumlah reformasi radikal, termasuk di dalamnya penghapusan khalifah, menyatakan tidak sahnya tarikat (sufi), menghilangkan Islam dari konstitusi sebagai agama negara dan menggantikan hukum Islam dengan adaptasi kode Sipil Swiss, mensekulerkan dan memonopoli pendidikan, menghapuskan pakaian tradisional dan keagamaan, dan mengganti huruf Arab dengan huruf Latin, pemerintahan Kemalis secara sistematis melucuti Islam sebagai dasar tradisional kehidupan Turki tahun 1920 dan 1930-an. Dalam era ini, sekulerisme radikal⁶⁷

⁶⁷ Sekulerisme radikal politik Turki didasarkan pada ideologi Kemalis, yang berkembang selama masa awal Republik. Pembentukan Kemalisme sebagai suatu ideologi tampak sebagai suatu fenomena kompleks, yang sebagian besar dipengaruhi oleh positivisme abad kesembilan belas, yang berdaya tarik tinggi bagi Turki Muda, salah satu diantaranya adalah M. Kemal.

menjadi salah satu prinsip utama negara baru Attaturk dan ekspresi agama ada di bawah pengawasan dan kontrol ketat pemerintah, segala otonomi untuk Islam diabaikan.

Belakangan ide sekulerisme di Turki menjadi polemik tersendiri, terlebih oleh mereka, warga negara Turki yang muslim dikekang kebebasannya untuk melaksanakan perintah agama yang mereka anut. Mereka bingung dengan tipologi sekulerisme Turki. Segala hal berbau agama akan dianggap melakukan penghinaan atas ideologi Kemalisme-Sekulerisme. Mengenakan simbol agama, seperti dialami umat Islam Turki diasosiasikan sebagai Islam politik. Mempolitisasi agama sangat dilarang. Negara dengan stukturnya kelihatannya dari sejak negara Republik berdiri terdapat semacam kecurigaan terhadap Islam, bahkan bermusuhan terhadap agama, kepercayaan yang kuat dalam ilmu pengetahuan positif sebagai sarana kemajuan, nasionalisme, serta komitmen keras pada sekularisasi politik membentuk ideologi elit Kemalis yang berkuasa.

Sementara itu, respon atas sekulerisme radikal itu bermacam-macam, ada yang bersifat sistemik ada pula yang bersifat acak tanpa terorganisir. Sistemik dalam hal ini berarti sekelompok orang dari kalangan menengah (*middle clas*) Turki yang merasa ada kejanggalan dalam perkembangan sekulerisme di negara mereka, bagi mereka sekulerisme bukannya mendatangkan kenyamanan bagi

Kemalisme menggabungkan visi positivisme Pencerahan dan kekhasan yang muncul dari proyek penciptaan suatu negara baru yang didasarkan terutama pada garis-garis sekuler dan bukan pada masyarakat Islam tradisional. Hal inilah yang menyebabkan kaum Kemalis membantu kemajuan sosial dan politik melalui pencarian positivisme akan ilmu pengetahuan, yang diharapkan akan menggantikan politik-politik yang berpusat pada Tuhan dengan pandangan publik tercerahkan. Sehingga undang-undang yang diberlakukan dalam dua decade pertama Republik dirancang untuk menggantikan komunalisme Islam dengan bentuk solidaritas sosial baru yang dibangun sesuai garis kemajuan. Menurut mereka, kekhusukkan dengan Islam adalah irrasional dan Islam adalah kebalikan dari pencerahan.

semua melainkan kecurigaan dan kebencian antara yang satu dengan yang lain, elit Kemalis mencurigai dan membenci kalangan Islamis, sehingga terjadi oposisi biner dan kontraproduktif dengan arah pembangunan nasional Turki yang ingin setara dengan negara-negara Eropa. Oleh karena itu, kelompok Islamis tersebut membentuk lingkaran oposisi halus atas tindakan pemerintah dengan jalur alternatif (selain birokrasi) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan seperti dilakukan oleh Fetullah Gulen atau kalangan pengusaha muslim kelas menengah Turki yang tergabung dalam MUSIAD, gerakan mereka atau respon mereka atas sekulerisme itu tidak terkesan politis karena mengambil alih lahan-lahan sosial serta tidak sensitif menyangkut sekulerisme.

Adapun oposisi yang secara terang-terangan adalah menggunakan jalur politik, memposisikan diri setara dengan elit Kemalis dalam belantika suksesi kepemimpinan untuk jabatan-jabatan strategis baik di eksekutif maupun legislatif. Mereka yang memilih jalur politik mendirikan partai-partai politik dengan beragam corak dan warna, baik secara ideologis maupun filosofis. Ada beberapa partai politik yang secara terang-terangan menentang ide sekulerisme negara bahkan menyodorkan ide penggantian ideologi negara dengan ideologi Islam, salah satunya pernah dilakukan oleh partai Refah, selain itu ada juga yang memilih untuk bersikap lunak dengan pemerintah serta menggunakan pendekatan yang lebih moderat dan lebih akomodasionis dalam bingkai demokrasi dan konstitusi modern, sikap ini dipilih oleh partai AKP.

BAB III

PROFIL PARTAI AKP

A. Sejarah Berdirinya Partai AKP

Pada BAB II dideskripsikan perihal sekulerisme di Turki yang cenderung ke arah tipologi radikal, yakni negara melakukan kontrol berlebihan atas agama atau perilaku keagamaan. Banyak hal dilakukan oleh para pemeluk agama, dalam hal ini pemeluk Islam, yang selalu dicurigai oleh elit Kemalis untuk tetap eksis dengan kepercayaan yang diyakini dalam kehidupan sehari-hari.

Iklim politik dengan nuansa otoriter di Turki juga mendapat respon signifikan dari kalangan menengah Muslim yang lebih mengerti dunia politik. Sehingga mereka memilih jalur politik untuk bernegosiasi dengan sistem yang telah lama berkembang dan dibangun secara mapan di Turki. Partai AKP seperti dideskripsikan secara singkat pada akhir BAB II adalah salah satu kelompok elit politik Muslim Turki yang mencoba untuk berkompetisi di kancah perpolitikan untuk merepresentasikan nilai-nilai keislaman⁶⁸ moderat yang mereka pahami dan yakini di tengah arus sekulerisme radikal.

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa partai ini merupakan entitas yang tidak lahir begitu saja, namun melalui proses sejarah yang melibatkan banyak faktor, "bayi" bernama AKP memiliki geneologi kuat dengan partai

⁶⁸ Namun kelihatannya untuk alasan keamanan baik dari serangan militer maupun kekhawatiran berlebihan dari musuh politik mereka yang sekuler, mereka tidak menampakkan sisi keislaman yang bersifat formalistis.

berbasis Islam yang sebelumnya cukup konfrontatif dengan rezim berkuasa, yakni partai Islam pimpinan Necmettin Erbakan.

Untuk partai-partai Islam setidaknya ada beberapa kali pelarangan oleh pihak negara, salah satunya yang dipimpin oleh Erbakan, kepemimpinan dan ketokohan Erbakan tampaknya merefleksikan sebuah pandangan politik yang tidak cukup membantu untuk bermain dalam kancah politik Turki sebab cara Erbakan cenderung konservatif dan tidak terlalu akomodatif dengan kelompok lain yang tidak satu frame dengan dirinya, sehingga setiap kali ada pelarangan sekaligus pembubaran lantas diikuti dengan mendirikan partai baru namun masih saja menggunakan dan mengedepankan corak Islam, beragam varian wajah dari masa ke masa, demi kontinuitas kepartaian dalam berpolitik guna menyesuaikan diri dengan kehendak negara yang menginginkan agar agama dijauhkan dari aktifitas politik dicoba dilakukan oleh Erbakan dan rekan-rekannya. Sayangnya beberapa kali reformasi kepartaian di bawah tangan Erbakan bisa dikatakan selalu gagal, ia tidak berhasil menyelamatkan partainya dari hegemoni pihak pemerintah dan semakin tidak melunakkan sikap negara dengan dukungan militer terhadap diri dan organisasi politik Erbakan yang terlanjur memiliki kesan "Islamis anti-sekuler" di mata elit sekuler.

Kelahiran partai AKP jika ditelusuri lebih jauh, mencakup beragam aspek yang terjadi dan berkembang dalam spektrum politik Turki kontemporer dengan tradisi sekulerisme radikal. Secara garis besar, eksistensi dan visibilitas partai

Islam di kancah perpolitikan Turki mulai nampak antara 1961-1980,⁶⁹ disamping dibukanya keran kebebasan untuk mengekspresikan kembali nilai-nilai yang oleh sebagian masyarakat Turki dipendam, berkat nada konstitusi baru yang relatif liberal dan mempermudah kelompok-kelompok keagamaan yang dulunya tertindas untuk menyuarakan tuntutan mereka. Dalam atmosfir yang tampaknya mendukung ini, beberapa politisi berorientasi Islam yang dipimpin Necmettin Erbakan mendirikan sebuah partai bernama Partai Orde Nasional (PON) pada tahun 1969. Tapi tidak lama berselang, oleh Mahkamah Konstitusi PON dibubarkan dengan dasar pertimbangan "mempergunakan Islam untuk tujuan politik." Pengadilan menganggap PON sebagai partai yang anti sekuler sebagaimana yang berlaku dan diyakini di Turki, sekulerisme bagi mereka, bukan hanya pemisahan agama dan negara, tetapi juga dominasi negara atas agama (Islam). Sebagai akibatnya, elit sekuler menolak memberikan kebebasan politik dan sipil kepada orang yang menyatakan terinspirasi keyakinan Islam.⁷⁰ Konsepsi demokrasi ini telah sering mengasingkan bukan hanya kalangan Islam yang dicap fundamentalis tetapi juga meresahkan kalangan politisi moderat. Dengan kata lain, Erbakan dan rekan-rekannya salah dalam beranggapan bahwa orientasi "liberal" rezim juga merangkul Islam.

Tidak ingin menyerah begitu saja ke bawah kaki elit sekuler, rekan-rekan dekat atau lebih luas lagi mencakup kader-kader partai yang setia dengan Erbakan

⁶⁹ Mustafa Erdogan, *Islam Dalam Politik Turki: Pencarian Demokrasi Tanpa Islam*, dalam Atila Yayla, (ed.), *Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar* (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2004), hlm. 100-105.

⁷⁰ *Ibid.*

mereformasi kembali partai mereka yang terlarang oleh negara, pada tahun 1972 mereka mengganti nama lama dengan mengusung nama baru yakni Partai Keselamatan Nasional (PKN). Menurut Iikay Sunar dan Binatz Toprak,⁷¹ dalam hal latar belakang sosio-ekonominya, partai tersebut mewakili protes orang-orang yang menghendaki peran ekonomi dan politik yang lebih besar dalam dunia modernitas yang berkembang. Namun retorika PKN pro Islam dan ia tampak sebagai konservatif-religius. Awalnya partai ini berusaha menolong orang-orang beragama, yang telah diasingkan dari ruang politik dan publik semenjak masa-masa awal Republik, untuk mempengaruhi proses politik dan merasa diri bagian dari sistem, atau menunjukkan iktikad sebagai warga negara sejati. Meskipun PKN lebih lunak dan tidak impresif jika dibandingkan dengan fosil sebelumnya (PON) namun intelektual Kemalis, cendekia dan militer melihatnya sebagai partai yang tidak dapat ditoleransi dalam sistem sekuler. Sehingga, PKN dibubarkan oleh pemerintahan militer tahun 1981.

Angin segar kembali didapat oleh kalangan Islamis ketika tampuk kekuasaan Presiden dipegang oleh Turgut Ozal yang datang dari elemen Partai Tanah Air pada tahun 1983. Ozal termasuk kalangan muslim moderat namun mengikuti iklim sekulerisme, ia semasa memimpin membawa angin baru demokrasi di Turki, sejumlah aturan dikeluarkannya semata-mata untuk mengakomodasi sekian kepentingan yang ada di Turki, ia bahkan sempat mempertanyakan kelayakan negara memiliki suatu ideologi, kelayakan militer mengontrol kebijakan negara serta kebijakan atas Kurdi oleh pemerintah-

⁷¹ *Ibid.*

pemerintah sebelumnya.⁷² Dalam masa-masa kepresiden Ozal kalangan Islam cukup diuntungkan untuk mengkonsolidasikan diri untuk mencapai tujuan kebijaksanaanya degan motor partai politik.⁷³

Pasca wafatnya Turgut Ozal tahun 1983, warisan atmosfer politik yang tadinya kondusif untuk membangun demokrasi yang sebenarnya, mulai dirampas dan perlahan dibajak oleh kalangan militer dengan mengambil alih kebijakan yang dianggap sebagai langkah pengawalan sekulerisme.

Selama tahun-tahun pemerintahan Ozal ada beberapa momen penting yang berpihak pada kalangan Islam,⁷⁴ dengan didirikannya Partai Kesejahteraan/Partai Refah (PK) berpikiran Islam, didirikan oleh beberapa rekan Erbakan juga setelah Dewan Keamanan Nasional mengizinkan pembentukan partai politik. PK sendiri merupakan kelanjutan dari PKN masa pra-1980, PK memiliki daya tarik tersendiri di mata publik terbatas dan memperoleh sedikit keberhasilan pemilihan pada masa Ozal. Namun setelah kematian Ozal, partai tersebut memenangkan pemilihan walikota/kotaperaja yang diselenggarakan pada bulan Maret 1994.⁷⁵

⁷² *Ibid.*

⁷³ Selain pada bidang politik, Ozal cukup membantu kalangan Islam pada akses-akses penduduk sipil beragama dalam meraih pekerjaan layanan sipil. "yang tampak paling menarik bagi sejumlah besar warga Turki adalah kemampuan Ozal untuk menegaskan kembali komitmennya kepada Islam dalam lingkungan sekuler dimana ia merasa nyaman," tulis Taylor. Alan R. Taylor, *The Islamic Question in the Middle East Politics* (Boulder and London, Westview Press, 1988), hlm. 91.

⁷⁴ Ozal membangun jembatan baru antara negara, masyarakat dan agama. Ia bahkan memperkenalkan tradisi buka puasa bersama selama bulan Ramadhan pada lingkup administrasinya dan menjadi Perdana Menteri Turki pertama melaksanakan ibadah haji ke Mekkah (1988)—ia juga memfilmkan kegiatan ibadahnya itu dan mempublikasikannya secara maksimal. Semasa memimpin, Adnan Menderes, yang dieksekusi oleh kudeta militer tahun 1960, direhabilitasi. Saat ini banyak jalan dan pusat perbelanjaan mencantumkan namanya.

⁷⁵ Saat-saat dimana Recep Tayyip Erdogan memenangkan pilkada. Hal ini sekaligus menjadi titik balik karir politik Erdogan di belantika demokrasi Turki selanjutnya.

Selanjutnya PK memperoleh 21 % suara pada pemilihan parlemen Desember 1995, jumlah suara yang lebih tinggi daripada yang diperoleh partai politik lainnya.

Partai AKP sendiri berdiri tanggal 14 Agustus 2001⁷⁶ dideklarasikan oleh para kader partai yang tadinya tumbuh dan berkembang di bawah didikan Necmettin Erbakan, Erbakan yang juga seorang ilmuwan pernah tinggal di Jerman itu tak ubahnya guru politik beberapa kalangan muslim Turki. Kelahiran partai AKP juga merupakan bentuk komitmen Erdogan bersama teman-teman yang seide dengannya untuk menjadikan partai sebagai motor penting dalam permainan politik yang elegan bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai moral keislaman tanpa harus konfrontatif dengan pihak negara.

Erbakan sendiri di mata Erdogan adalah guru idola yang sangat ia hormati bahkan ia kadang-kadang mencium tangan Erbakan sebagai bentuk penghormatan, meskipun pada kesempatan lain Erdogan memprotes itu sebagai simbol perbudakan, "Hand kissing as a symbol of slavery."⁷⁷ Benturan antara Erdogan dan Erbakan pernah terjadi pada tahun 1978 saat Kongres PKN. Ketika kongres berlangsung, Erdogan mencoba menggalang dukungan massa dari kader partai untuk mendukung langkahnya menduduki jabatan eksekutif partai, mencoba meruntuhkan kebijaksanaan Erbakan. Seperti pada akhir tahun 1970-an, ia

⁷⁶ "History of Justice and Development Party," dalam <http://www.akparti.org/eng>, akses tanggal 28 Maret 2008.

⁷⁷ Turan Yilmaz., *Tayyip: Kasimpasa' dan Siyasetin On Saflarinma* (Ankara; Umit. 2001), dalam Martin Heper dan Sule Toktas, "Islam, Modernity, and Democracy in Contemporary Turkey: The Case of Recep Tayyip Erdogan," *The Muslim World*, Vol. 93 (April 2003), hlm.174.

mencoba memfokuskan diri pada aspek reformasi bidang politik pada internal partai dengan pendekatan politik modern daripada pendekatan spiritual pada tubuh partai.

Pada tahun 1991,⁷⁸ Erdogan tidak setuju dengan tindakan PK berkoalisi dalam pemilihan umum dengan Partai Pekerja Nasional (*Milyetci Calisma Partisi-MCP*). Saat itu Erdogan menjadi salah satu petinggi partai. Akhirnya, sejak pertengahan tahun 1990-an sampai seterusnya, Erdogan secara terbuka mengkritik hegemoni Erbakan di institusi partai PK.

Pada kongres partai PK tanggal 14 bulan Mei, 1996, Erdogan menyerang dengan mengatakan bahwa kondisi yang ada di Turki, menghendaki pemimpin yang mendominasi harus segera disingkirkan oleh akar-rumput demokrasi, dan saat itu juga PK harus mencari pemimpin. Pada tahun 1998, dalam pidatonya di kota Trabzon bagian timur Laut Hitam, Erdogan menyatakan seseorang tidak lama lagi akan memberikan intruksi politik dari "menara gading." Sebagai buntut dari pelarangan aktifitas politik bagi Erbakan, Erdogan lantas menyindirnya dengan ucapan, "*Five years from now Erbakan Would at most remain a sage*" ("Lima tahun dari sekarang Erbakan hanyalah salah seorang guru kebijaksanaan)."⁷⁹

Ketika kondisi politik di Turki masih juga memiliki karakter yang tidak pernah berubah dengan berbagai serangan yang mengarah kepadanya, kebanyakan tentang tuduhan akan menjadikan Turki berbasis Islam dan antisekulerisme, baik

⁷⁸ Rentang waktu pra- 1990-an Erdogan masih setia menggeluti karir politiknya bersama Erbakan, sehingga setiap kali partai Islam yang memiliki akar kuat dengan Erbakan berganti warna Erdogan tetap setia menjadi kader partai, evolusi PON, PKN, PK menjadi bagian dari proses politik partai Islam yang diikuti Erdogan.

⁷⁹ Martin Heper dan Sule Toktas, "*Islam*", hlm. 174.

oleh pemerintah maupun pihak media massa, termasuk mengarah kepada partai, Erdogan merasa perlu ada langkah nyata untuk keluar dari "isolasi" sistemik yang dilancarkan oleh nalar kolektif sekuleris Turki.⁸⁰ Pada Saat yang sama juga, ia berusaha berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk menebarkan nilai-nilai moral Islam kepada banyak orang. Ketika ia dihadapkan pada skisma politik di internal Partai Refah,⁸¹ ia memaparkan argumentasi bahwa hanya ada satu tujuan dalam politik dan itu adalah usaha untuk menjunjung tinggi moralitas. Maka, ia dan beberapa orang kader partai mengusung semangat perubahan dengan "Gerakan Kebajikan" (*Movement of the Virtuous, Erdemliler Hareketi*) yang kemudian dikulminasikan dalam formasi politik Partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan, *Adalet ve Kalkinma Partisi, Justice and Development Party*) tanggal 14 Agustus 2001, partai ini diidentikan sebagai partai reformis dalam bahasa Turki disebut **Yenilkciler**, Erdogan terpilih sebagai ketua umum, ketika partai AKP dideklarasikan Erogan menyatakan "AKP bukanlah partai politik poros religius."⁸² Sebagai ikon pendiri partai selain Erdogan, Abdullah Gul juga memiliki peran penting dalam pendirian partai, disamping kader lainnya.

⁸⁰ Ziya Onis, "The Political Economy of Turkey's AKP," dalam Hakan Yavuz (ed.), *The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Party* (Salt Lake City: University of Utah Press, 2006), hlm. 212.

⁸¹ Tahun 1997 menjadi akhir dari kepemimpinan Erbakan menduduki kursi perdana menteri, setelah militer melakukan kudeta sistemik. Kursi tersebut dicapai berkat koalisi dengan Partai Jalan Sejati (Trues Path Party) Tansu Ciller.

⁸² Dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Justice and Development Party \(Turkey\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_and_Development_Party_(Turkey))", akses 28 Februari 2008.

Gambar 3.1. Tabel genealogi partai AKP



B. Tokoh-tokoh AKP

Di tubuh partai AKP terdapat beberapa tokoh penting yang menjadi ikon penggerak partai ini, tokoh-tokoh yang ada di internal partai merupakan orang-orang yang sejak awal memiliki komitmen kuat untuk mendirikan partai dan berjuang atas nama keyakinan ideologis mereka dengan didukung oleh kesamaan pandangan di antara mereka, di antara tokoh-tokoh itu tiga orang tokoh penting

yang memiliki peran dominan yakni Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gul dan Bulen Arinc.

Recep Tayyip Erdogan, lahir pada tahun 1954 di Kasimpasa, sebuah kawasan penduduk kelas menengah ke bawah kota Istanbul.⁸³ Ayahnya adalah seorang nahkoda sebuah Agen Kelautan milik negara dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Untuk membantu pemasukan keluarga Erdogan kecil adalah penjual lemon, rempah-rempah, roti dan juga air minum di jalanan. Sehingga ia cukup familier dengan kehidupan rakyat kecil dengan beragam kesusahan yang ada di dalamnya, sekaligus kelak menjadi salah satu kantong suara yang membawa diri dan partainya memenangi pemilihan kepala daerah.⁸⁴ Inspirasi hidupnya banyak dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: Ayah, Kasimpasa, Guru dan Sufisme.

Sebelum memasuki dunia politik Erdogan termasuk beruntung karena mengenyam pendidikan modern dengan karir cemerlang. Setelah menyelesaikan pendidikan di Imam Hatip School (setingkat SMA di Indonesia), ia meraih gelar B.A. dari jurusan Ekonomi dan Perdagangan Universitas Marmara di Istanbul tahun 1980. Selain menguasai bahasa ibu, ia juga dikenal mampu berbahasa Arab dan Inggris. Ia pernah bekerja sebagai Eksekutif Manajer di beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang penjualan makanan.

⁸³ Martin Heper dan Sule Toktas, "Islam, Modernity," hlm. 157; "Recep Tayyip Erdogan (Istanbul 1957-)" terdapat juga pada tulisan Burak Sansal dalam <http://www.allaboutturkey.com>, akses tanggal 21 Maret 2008.

⁸⁴ *Ibid.*

Ketertarikannya dengan dunia politik dan bisnis berawal sejak ia masih sangat muda, pada usianya yang ke 15 pada tahun 1969 Erdogan telah bergabung dengan National View Association (*Milli Gorus Teskilati*), sebuah lembaga *underbow* aktor intelektual baik untuk Partai Orde Nasional (PON)/ National Order Party ataupun Partai Keselamatan Nasional (PKN)/National Salvation Party (MSP). Tidak lama berselang ia kemudian dipercayakan untuk memimpin divisi pemuda partai MSP untuk daerah atau distrik Beyoglu di Istanbul. Pada tahun 1984, ia menjadi ketua umum Partai Kesejahteraan/Welfare Party (Refah Partisi) Cabang Beyoglu. Pada tahun berikutnya ia dipercayakan untuk menduduki jabatan administratif Partai Kesejahteraan di tingkatan provinsi Istanbul. Pada tahun 1986, Erdogan terpilih menjadi ketua umum Partai Kesejahteraan/Refah di Istanbul. Pada tahun 1989 ia dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah pemilihan Beyoglu dengan motor politiknya Partai Refah, meski kalah namun bagi Partai Refah adalah sebuah kemenangan tertunda dengan indikasi perolehan suara yang meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Pada pemilihan kepala daerah tahun 1994, Erdogan kembali dicalonkan untuk jabatan yang lebih tinggi yakni walikota kota metropolitan Istanbul. Dengan keyakinan tinggi akhirnya Erdogan bersama Partai Refah mampu mengungguli kandidat lain dari tokoh penting nasional.

Kemampuannya pada bidang manajemen cukup membantu dalam membenahan partai yang dipimpinnya, ia selalu berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Ia berhasil membawa angin segar perubahan pada tubuh partai baik pada struktur politik maupun kultur yang

bersih yang ingin dibangun. Termasuk ketika menjabat sebagai walikota Istanbul, Erdogan mampu mengubah kota itu menjadi lebih cerah, bersih berkembang pesat dengan infrastruktur memadai.

Pada tahun 1998 oleh Komisi Pemilihan Umum (Superior Election Board) membekukan kekuasaannya sebagai kepala daerah karena dianggap telah berbuat inkonstitusional di depan publik, ia dituduh menebar kebencian bernuansa SARA, "menebar kebencian keagamaan" di muka umum, "kejahatan melawan negara". Dalam pidatonya, ia mengutip puisi karangan Ziya Gokalp, "bapak nasionalisme Turki" yang mengatakan "the mosques are our barracks, the domes are our helmets, the minarets our bayonets, and faithful our soldiers" ("masjid adalah barakku/ kubah adalah topi bajaku/menara bayonetku/ dan iman adalah serdaduku.,⁸⁵ meskipun di Turki kutipan seperti ini banyak ditemukan di buku-buku pelajaran sejarah. Akibat perbuatan tersebut Erdogan yang juga pernah menjuarai lomba debat di sekolah dan menjuarai lomba membaca puisi di Istanbul tahun 1973 kemudian dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh bulan dan tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas politik, namun tidak lama setelah itu, sekitar empat bulan, ia dibebaskan karena dianggap telah beriktikad baik selama menjalani hukuman. Di penjara, Erdogan banyak bergaul dengan para narapidana mendiskusikan banyak hal tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan untuk membawa Turki lebih baik, di sana ia juga bagaikan seorang martir sejarah dengan dukungan ribuan pendukung, di penjara tanpa ada rasa

⁸⁵ Cemal Karakas, *Turkey: Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics, and Society* (Frankfurt: Peace Research Institute Frankfurt, 2007), hlm. 31.

sedih ia kemudian mengidentikan dirinya sebagai "Nelson Mandela milik Turki."⁸⁶

Setelah keluar dari penjara tidak membuat bapak dari empat anak ini lunak, ia malah semakin berani namun tetap elegan, bermain politik secara jantan menunjukkan kepada publik bahwa ia adalah politisi sejati yang selalu taat akan aturan hukum. Sikap taat hukum tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh karakter yang terbangun sejak usia muda. Erdogan yang juga pemain bola profesional ketika masih muda, saat diminta untuk ikut melakukan aksi protes terhadap pemerintah, ia menolak karena menurutnya hal itu tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.⁸⁷

Dari riwayat hidupnya, terekam bahwa ia adalah sosok dengan karakter keislaman yang kuat, ia mencoba menegaskan identitas diri sebagai muslim dan dalam batas-batas tertentu mengikuti alur pemikiran elit sekulerisme, Nuran Yildiz dari Universitas Ankara memiliki kesan terhadap Erdogan sebagai sosok yang "berteman dengan surga, hidup dengan hati nurani, hatinya terisi penuh dengan puisi-puisi, dan menjadi wacana simbolis."⁸⁸ Ia seringkali menggunakan terminologi Islam atau kalau tidak substansi Islam untuk mengekspresikan kehidupan sehari-harinya. Kepindahan bersama ayahnya dari kawasan Laut Hitam bagian utara Turki ke Istanbul diasosiasikan sebagai sebuah hijrah (*hicret*)⁸⁹,

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Martin Heper dan Sule Toktas, "Islam, Modernity, and Democracy.." hlm. 164.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang menceritakan tentang hijrah Rasul dapat dilihat seperti dalam surat An-Nisaa' ayat 97, 98, 99; al-Ankabut 56; al-Baqarah 218. Lihat dalam Departemen Agama, *al-Qur'an dan Tejemahannya* (Semarang : Penerbit As-Syifa').

emigrasi seorang nabi (Muhammad) dari Mekkah ke Madinah 622 SM untuk menghindari serangan musuh-musuh. Ketika menjabat sebagai walikota Istanbul, ia mengumumkan dirinya sebagai seorang imam kota itu. Ketika dikritik oleh sejumlah kalangan ia menepisnya dengan alasan (bagi seorang *imam* dalam kesehariannya di Turki adalah sebuah proses ibadah seorang pemimpin), Erdogan menegaskan, "Ketika anda mendengar kata *imam*, anda hanya berfikir tentang seseorang yang memimpin ibadah sholat di masjid. Dalam Islam, *imam* adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengatur atau memimpin". Tidak hanya itu, dalam setiap awal sesi pembukaan di kantor administrasi walikota acara selalu dibuka dengan menggunakan *Fatihah*. Aneksasi simbol-simbol Islam terkadang oleh banyak pihak disalahartikan dan disalahgunakan untuk memahami karakter Islam Erdogan.⁹⁰

Abdullah Gul, lahir di Kayseri pada tahun 1950.⁹¹ lulus dari Istanbul University menyanggah gelar B.A. pada bidang ekonomi tahun 1971, kemudian meraih gelar Ph.D. dari universitas yang sama pada tahun 1983. Ia juga menyempatkan menempuh ilmu di di Exter dan London.

Pada yayasan Sakarya University Industrial Engineering Department. Ia mengajar mata kuliah bidang ekonomi antara tahun 1980-1983. Dari tahun 1983 sampai 1991 ia bekerja sebagai pakar ekonomi di Islamic Development Bank,

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Burak Sansal, "Abdullah Gull," dalam <http://www.allaboutturkey.com>, akses tanggal 21 Maret 2008.

Jeddah. Ia juga termasuk salah satu anggota Associate Professor on International Economics tahun 1991.

Tahun 1991, ia terpilih sebagai salah satu anggota Parlemen dari Partai Refah. Menjadi anggota Komisi Perencanaan dan Penganggaran di parlemen. Pada tahun 1993, ia ditunjuk sebagai Deputy Ketua Partai Refah untuk urusan Luar Negeri (Foreign Affairs). Pada tahun 1995 ia kembali terpilih menjadi anggota parlemen. Menjadi anggota komisi urusan luar negeri. Dari tahun 1996 sampai tahun 1997, dipercaya memegang jabatan Menteri Negara dan Pemerintah merangkap Juru bicara.

Pada tahun 1999, ia terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi anggota parlemen namun dari partai Kebajikan (Virtue Party). Dari tahun 1992 sampai tahun 2001 menjabat sebagai Anggota Komisi Parlemen Dewan Eropa (Parliamentary Assembly of the Council Europe). Menjabat selaku anggota Komite Parlemen bidang Kebudayaan, Pendidikan dan Politik untuk Dewan Eropa (Committee on Culture and Education and Political Committee of the Council of Europe Parliamentary Assembly).

Pada tahun 2001 ia dianugrahi Penghargaan Pro-merito oleh Dewan Eropa dan menjadi anggota Kehormatan pada Assosiasi Perhimpunan Parlemen Dewan Eropa.

Pada bulan Agustus, bersama Erdogan ia mendirikan Partai AKP. Ia ditunjuk oleh presiden Ahmet Necdet Sezer menjadi Perdana Menteri Turki yang baru pada tanggal 16 November 2002. pada tanggal 19 November 25 anggota kabinetnya dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pemerintahan yang baru meraih

kemenangan dengan suara meyakinkan di Parlemen Turki (TBMM) pada 28 November.

Setelah larangan untuk melakukan aktifitas politik bagi rekannya Erdogan, Gul kemudian meletakkan jabatan Perdana Menteri. Selama di lingkaran Pemerintahan ke 59 Turki, ia pernah menduduki jabatan Menteri Luar Negeri, Anggota Parlemen, Dewan Pimpinan AKP bidang politik dan hukum dan termasuk salah satu anggota Perhimpunan Parlemen NATO.

Pada bulan Agustus 2007, ia dipilih oleh mayoritas Parlemen sebagai Presiden Republik Turki ke 11. Berbeda dengan Erdogan, Gul termasuk sosok yang memiliki karir cemerlang di bidang politik, ia tidak banyak mendapat sorotan dan permusuhan berlebihan jika dibandingkan dengan yang dialami Erdogan, namun keduanya memiliki kesamaan pandangan dalam hal modernisasi nilai-nilai keislaman dalam konfigurasi perpolitikan di negeri yang telah menyalahartikan dan menyalahgunakan konsitusi warisan Kemalisme-Turkisme oleh sebagian besar elit mereka.

Bulent Arinc,⁹² lahir pada tahun 1948 di Bursa, Turki. Ia pernah mengklaim bahwa Dervis Mehmet, salah seorang pemimpin revolusi partai di Menemen Incident yang dipimpin langsung oleh Kubilay, adalah kakek Arinc. Namun klaim tersebut oleh beberapa kalangan di parlemen disanggah yang kemudian menyatakan bahwa kakek Arinc bukanlah Darvis Mehmet, melainkan Ahmet Efendi.

⁹² "Bulent Arinc" dalam <http://en.wikipedia.org/w/index.php>, akses 19 Mei 2008.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Manisa, ia melanjutkan studinya pada University of Ankara, meraih gelar Bachelor of Laws (Sarjana Hukum) pada tahun 1970. Disamping menekuni aktifitas pendidikan ia juga aktif bekerja di salah satu kantor pengacara freelance di Manisa.

Bulent Arinc menikah dengan dikarunai dua orang anak, satu di antaranya meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.

Ia mulai tertarik bergelut dengan dunia politik sejak berada di lingkungan universitas, Bulent Arinc memulai karir politik dengan menjadi kepala daerah di Manisa pada pemilu tahun 1995, dan kemudian menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Turki melalui partai Refah (Welfare Party). Ia juga menjadi salah satu petinggi di partainya, dan di parlemen duduk pada komisi bidang hukum atau yurisdiksi.

Ketika partai Refah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 februari 1998, ia pindah ke Fazilet Partisi (Virtue Party / partai Kebajikan). Arinc kembali terpilih sebagai kepala daerah Manisa pada pemilihan umum tahun 1999, kali ini diusung oleh Fazilet Partisi. Ia menjadi salah satu anggota komisi bidang luar negeri di parlemen.

Mahkamah Konstitusi kemudian juga membekukan Partai Fazilet pada tanggal 22 Juni 2001. Bulent Arinc, yang juga dekat dengan Recep Tayyip Erdogan, menjadi salah satu pelopor berdirinya partai AKP pada tahun yang sama pada bulan Agustus tanggal 14. Setelah memenangkan pemilu para kader partai AKP yang duduk di parlemen kemudian menunjuknya sebagai Juru Bicara Parlemen (Ketua Parlemen).

C. Karakteristik Partai AKP

Partai AKP memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan varian partai-partai Islam sebelumnya, AKP menjadi arus baru yang menawarkan alternatif perkawinan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi. AKP sangat menjunjungtinggi nilai moral dan taat akan aturan main yang dibuat pihak negara yang *notabene* anti-Islam.

Tidak hanya itu, pendekatan politik yang digunakan pun sangat moderat tanpa terbawa oleh ideologi kaku yang tertanam pada kader partai Islam sebelumnya, yang cenderung bersifat simbolis, AKP menjadi ruang bagi banyak orang, baik yang Islamis maupun sekuleris sangat setuju dengan tawaran politik serta format politik bangunan Erdogan dan rekan-rekannya. Seperti disebutkan Carolyn Fluehr-Lobban bahwa mereka, para elit AKP, menolak dicap sebagai "Islamis" dan tidak mengedepankan isu penerapan syari'at sebagai hukum negara, akan tetapi mereka mencitrakan diri sebagai partai Muslim moderat.⁹³

Mengenai ideologi yang mereka anut, AKP memang mengakui berada pada garis kanan-tengah, menamakan ideologinya sebagai Konservatif Demokrat "conservative democracy" yang sangat disukai Erdogan, ia bahkan menganjurkan bangsa lain (lebih-lebih kepada negara-negara muslim, khususnya negara-negara

⁹³ Carolin Fluehr-Lobban, *Islamic Societies in Practice*, edisi kedua (Florida: University Press of Florida, 2004), hlm. 226-227.

tetangga Timur Tengahnya yang masih terkungkung dalam lingkaran feodalisme untuk mengikuti ide itu, dalam bahasanya Erdogan⁹⁴:

“this political party of which I am leader, AK Party, represents a new political style and understanding in Turkish political life. I believe that this new approach, based on a political identity I call “conservative democrats,” has a significance that goes beyond the borders of Turkey. One observes that, like in the case of socialism, liberalism and conservatism, all political movements are going through a substantive process of interaction with each other. We know witness not a differentiation and polarization ideologies with sharp and bold lines of division between them, but the formation of new political courses accompanying the pervasiveness of different ideologies. We have before us, therefore, a more colored and multidimensional picture rather than a sharp black-and-white image. We in Turkey believe that, based on this reality, it is important to renew and strengthen politics and governance through the understanding of conservative democracy.”

Langkah untuk memilih konservatif demokrasi merupakan opsi sadar intelektualisme generasi baru Turki yang menginginkan sebuah mainstream politik beraliran moderat yang menghargai universalisme versi mayoritas bangsa di dunia dengan tanpa menapikan atau bahkan menghilangkan sama sekali nilai-nilai lokalitas warisan sejarah, "i belief of universalism that accept localism, an understanding of rationalism that does not disregard the spiritual meaning of life, and a choice for change that not fundamentalist. The concept of conservative democracy is, in fact, and answers to this desire of the Turkish People."⁹⁵

⁹⁴ Recep Tayyip Erdogan, "Conservative Democracy and the Globalization of Freedom," dalam M. Hakan Yavuz, (ed.), (Salt Lake: University of Utah Press, 2006), hlm. 334. Tulisan Erdogan yang ada dalam lampiran buku Hakan Yavuz ini merupakan bahan pidatonya pada presentasi di Amerika, pada American Enterprise Institute, 29 Januari 2004.

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 335.

AKP juga bukan hanya sebagai partai para kelas pekerja, namun ia juga menjadi wadah partai elit Muslim yang baru,⁹⁶ seperti upaya petinggi partai atau figur partai AKP mendukung hak perempuan untuk mengenakan cadar baik di lingkungan universitas maupun di lingkungan Parlemen. Mereka juga mengedepankan isu Hak Asasi Manusia Universal, civil society, dan demokrasi yang akan diimplementasikan dengan "bantuan Allah."⁹⁷

Ketika Erdogan ditetapkan sebagai Ketua Umum partai, dalam sambutannya ia mengatakan, "...nothing will be like the old" (tidak ada lagi seperti yang dahulu"). Pada latar belakang pertemuan saat deklarasi dilaksanakan diiringi dengan sebuah lirik lagu *The Conquest of Paradise*, sebuah soundtrack film tahun 1942, yang berkisah tentang discovery Amerika. Dalam sambutannya juga, ia mengutip perkataan Voltaire salah seorang filosof dan negarawan Perancis ternama di Era Pencerahan, "I do not agree with you, but i would do everything I can so that you would be able to express your views freely"." Saya tidak sepakat dengan anda, akan tetapi saya akan melakukan segala sesuatu yang dapat saya lakukan sehingga anda dapat mengekspresikan ketidaksetujuan anda secara bebas".⁹⁸ Dari simbolisasi yang digunakannya, partai ini menggunakan Bola Lampu yang terang benderang sebagai lambang partai, lampu terang benderang bagi mereka adalah lambang kekuatan untuk keluar dari cahaya gelap menuju

⁹⁶ Jika melihat orang-orang yang duduk di jajaran elit AKP yang kebanyakan dari unsur professional, seperti dosen bahkan rector di perguruan tinggi, pengacara, pebisnis, bos media, dan beragam profesi menengah lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa partai ini secara SDM sangat moderat dan cukup membantu dalam proses percepatan transformasi dan moderasi gagasan Islam moderat di Turki.

⁹⁷ Carolin Fluehr-Lobban, *Islamic Societies*, hlm. 226-227.

⁹⁸ Martin Heper dan Sule Toktas, *Islam, Modernity.*, hlm. 177.

jalan terang benderang, "We Are open to Light and Closed to the Darkness"⁹⁹, kemudian pada bendera-bendera dalam setiap pertemuan dilatar belakang dengan bendera Turki sekaligus photo tokoh bersejarah Turki, Musthafa Kemal Attaturk, semua itu ditujukan untuk menyakinkan publik dan pemerintah Turki bahwa AKP adalah partai pembaharuan yang komitmen untuk mengeluarkan bangsa Turki dari persoalan ekonomi yang saat itu mengalami krisis, selalu menjunjungtinggi moralitas dan komitmen atas Sekulerisme-Attaturkisme.

Dalam kapasitas sebagai bagian dari partai AKP, Erdogan yakin bahwa demokrasi adalah pilihan yang tepat, ia percaya bahwa rakyat yang satu akan mencintai yang lainnya, karena hanya dengan menerima nilai yang ada, yakni nilai ketuhanan secara ikhlas. Tujuan dari politik, baginya, adalah untuk mengeluarkan masyarakat dari kesusahan dan kondisi buruk, sehingga pemerintahan di Turki harus menguatkan nilai republik, menyeimbangkan antara pragmatisme global dengan prinsip-prinsip republik. Pertama-tama Turki membutuhkan landasan ekonomi yang kuat dan demokrasi mapan, ia percaya akan republik yang sekuler, sebuah demokrasi berdasarkan supremasi hukum, dan politik yang berorientasi pada publik, terdapat nilai-nilai integritas individu paling tinggi. Ia juga mengutamakan pentingnya antara demokrasi, moralitas, modernitas, dan humanitas. Menyebut diri sebagai seorang demokrat. Dan lagi-lagi dalam posisi demikian ia selalu mengembalikan segala referensi hidupnya kepada sistem nilai-nilai normatif dari mistis Islam.

⁹⁹ *Ibid.*

D. Manifesto Politik Partai AKP

Sejak awal berdirinya, Partai AKP diproyeksi untuk menjadi "bayi" baru dengan baju baru, menghadirkan warna politik baru dengan kekuatan moral yang tertanam pada ideologi dan kader partai. Dalam *test case* politiknya, ternyata kehadiran partai AKP memiliki cukup daya tawar di pentas perpolitikan Turki. Perolehan 34 persen suara pada pemilihan umum November 2002, kontes politik pertama yang diikuti sejak pertama kali berdiri, menjadi sinyalemen positif bahwa partai AKP telah memiliki tempat dihati rakyat Turki (pemilih), baik yang Islamis maupun sekuleris.

Mereka mencoba ramah dan berpikiran positif atas keberlangsungan hukum sekuler yang berlaku di Turki, ideologi partai AKP sangat menghargai demokrasi dan sekulerisme, mereka tidak lagi melihat pelarangan hal-hal yang bersifat keagamaan dalam hal-hal tertentu sebagai penindasan atas Islam, melainkan peran negara sebagai penengah atas semua kelompok, netralitas agama vis a vis semua agama.

Usaha elit partai AKP kepada publik adalah, meyakinkan publik dalam nalar sekulerismenya bahwa AKP bukanlah partai yang mentah-mentah mengusung agenda Islam, seperti yang digembar-gemborkan Erbakan sejak tahun 1970-an dengan "brand" syari'ahnya, elit AKP berusaha mengesampingkan wacana seputar agenda Islamisasi, mereka lebih mengedepankan aspek kepentingan publik secara umum.

Upaya pencitraan partai dengan garis moderatnya diupayakan juga oleh komposisi wajah-wajah baru dari para pemimpin AKP, Erdogan, Abdullah Gul dan pimpinan Parlemen Bulen Arinc.¹⁰⁰

Pencitraan merupakan agenda penting dalam komunikasi politik di berbagai negara yang telah mapan dengan demokrasi, AKP termasuk partai moderat dalam mengkonsep partainya, ia mampu memposisikan diri tidak hanya sebagai partai pengusung agenda Islam semata tetapi ia juga mendeklarasikan diri sebagai partai yang bersih¹⁰¹ (hal itu juga ditunjukkan dengan identitas partai, nama partai dalam akronim *Ak Parti*, yang mana kata *ak* dalam bahasa Turki memiliki makna putih, suci dan moral yang bersih), menjadi daya tarik tersendiri bagi konstituen non-islam. ¹⁰²

Tidak hanya sebatas simbolis kepartaian, namun hal itu dikuatkan dengan pernyataan Erdogan yang menyebutkan bahwa partainya sangat konsisten untuk memperjuangkan nilai keadilan, nama partai mengimplikasikan pada nilai perjuangannya, partai AKP bertujuan untuk menyelamatkan Turki dari berbagai persoalan yang menimpa negeri itu. Ia menerangkan bahwa sistem keadilan di Turki telah teralienasi dari kenyataan bahwa masyarakat secara mendasar tidak sepenuhnya percaya kepada institusi pengadilan dan dalam jangka panjang terhadap keadilan yang nyata. Ia juga mencatat bahwa dalam beberapa tahun,

¹⁰⁰ Soner Cagaptay, *Secularism and Foreign Policy in Turkey: New Elections, Troubling Trends* (Washington: Washington Institute for Near East Policy, 2007), hlm. 20.

¹⁰¹ AKP cukup diuntungkan dengan kondisi ekonomi tahun 2001, saat itu Turki sedang mengalami penurunan dalam bidang ekonomi, mereka dilanda krisis hal itu juga disebabkan oleh maraknya tindakan korupsi di kalangan pejabat dan tidak sedikit dari kalangan partai, AKP mencitrakan diri sebagai partai bersih dan anti korupsi.

¹⁰² Soner, hlm. 20.

rakyat Turki telah menderita oleh pukulan telak inflasi dan pengangguran sehingga persoalan ekonomi tersebut membutuhkan jalan keluar secara seksama.

Prinsip yang mereka pegang dan perjuangkan terdomentasi dalam butir-butir manifesto mereka¹⁰³ :

1. Partai AKP sangat menghargai perubahan dalam berbagai tingkat organisasi kepartaian, termasuk ikatan dengan pimpinan partai, dengan periode kepemimpinan maksimal. sekali.
2. Partai AKP mengadopsi satu model organisasi yang membuka diri atas pengetahuan, pengalaman, teknologi mutakhir dan beragam kesempatan yang ada.
3. Partai AKP memiliki iktikad dalam organisasi dengan mengadopsi model pembukaan komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat dan para intelektual dalam negeri dan selalu terbuka.
4. Partai AKP mengadopsi konsep kepemimpinan yang berbasis pada pelibatan seluruh partisipasi pemikiran kolektif anggota.
5. Partai AKP sangat menghargai kebebasan individu sebagai sebuah kemutlakan dan tidak dapat dicabut dari semua manusia.

¹⁰³ "Priciples," dalam <http://www.akparti.org>

6. Partai AKP mengadvokasi hak-hak manusia yang tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dicabut yang diberikan sejak ia dilahirkan.
7. Partai AKP melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, berfikir dan berekspresi, bagi perusahaan dan hak untuk berorganisasi sebagai sebuah prinsip yang tidak dapat dicabut dalam berbagai platform.
8. Partai AKP menjunjungtinggi netralitas dan kemandirian pada dunia peradilan.
9. Partai AKP menjunjungtinggi sebuah masyarakat yang demokratis sebagai jaminan untuk mampu hidup bersama-sama.
10. Partai AKP menjunjungtinggi prinsip tindakan yang didasarkan pada keadilan, kompetensi, kepatutan dan meyakini dengan segala hormat atas kepercayaan di ruang publik. menolak segala bentuk sikap berat sebelah dan segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan kekuasaan.
11. Partai AKP menjalankan organisasi dengan konsep memiliki prinsip dasar, jujur, beretika dalam politik dan tabah.

12. Partai AKP mendukung negara hukum yang berpegang pada keadilan, hak dan kebebasan.

13. Partai AKP menjunjung tinggi kemandirian negara, dan integritas tak terpisahkan dari negara dan bangsa, sebagai satu prinsip pokok.

Dari butir-butir manifesto perjuangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partai AKP berada dalam garis moderat Islam yang berupaya untuk meletakkan nilai-nilai moralitas Islam dalam kombinasi sekulerisme moderat, hal itu dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan diri dengan kultur dan perilaku politik mayoritas penduduk Turki yang telah terlanjur menikmati iklim yang ada.

BAB IV

KIPRAH AKP DALAM DUNIA PERPOLITIKAN TURKI

A. Kiprah AKP Dalam Pemerintahan

Segera setelah melalui pemilu bulan November 2002¹⁰⁴ dengan kemenangan dan berhak menduduki beberapa jabatan penting di parlemen, lantas partai AKP mengambil langkah sistemik untuk menjalankan misi perjuangan yang mereka bangun atau mereka yakini dalam manifesto perjuangan partai. Para punggawa AKP yakin akan kemenangan itu, dengan kemenangan telak tersebut mereka berharap berbuat banyak bagi Turki, membawa Turki lebih baik dari keadaan sebelumnya. Malam sesudah pemungutan suara dilaksanakan Erdogan kepada wartawan melakukan jumpa pers, Erdogan mengatakan akan mengutarakan kekhawatirannya tentang masa depan Turki, yang juga dirasakan oleh pihak militer yang dianggap sebagai pelindung status sekuler Turki. "Partai kami siap melakukan kewajiban kami untuk membangun keinginan politik yang menghormati gaya hidup seluruh warga negara kami, dan menuju masa depan dengan dasar pandangan dunia yang membiarkan rakyat hidup agar negara ini

¹⁰⁴ Pemilu tahun 2002 dilaksanakan 18 bulan lebih awal setelah koalisi pemerintah bubar akibat pertikaian internal dan sakitnya Perdana Menteri Bulent Ecevit. Sekaligus merupakan langkah awal atau permainan perdana partai AKP dalam dunia perpolitikan Turki setelah deklarasi tahun 2001. Prestasi yang sama ditunjukkan dalam kontestasi kedua dalam Pemilu Tahun 2007 yang juga meraih mayoritas suara di parlemen dan kini menempatkan Abdullah Gul dalam posisi strategis, yakni Presiden Turki, salah satu jabatan penting dalam upaya menjalankan visi dan misi partai.

juga dapat hidup," kata Erdogan.¹⁰⁵ Dalam jangka pendek partainya juga akan melaksanakan janji-janji politiknya, "Mulai tanggal 4 November (tahun 2002) mereka yang mengharapkan pekerjaan dan makanan akan melihat sebuah solusi."¹⁰⁶ Hal tersebut diutarakan karena era pemerintahan sebelumnya telah gagal mensejahterakan rakyat Turki, rakyat Turki marah atas pemerintah dan dianggap bertanggungjawab atas krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir (puncak krisis tahun 2001 saat penyelenggaraan pemilu dipersiapkan), disamping maraknya korupsi yang melibatkan elit pemerintah menjadikan Turki semakin terpuruk. Kemenangan tersebut juga tidak membuat kader AKP larut dalam selebrasi kemenangan, segera setelah memenangi kontestasi politik mereka langsung mempersiapkan *road map politics* (peta perjalanan politik) kebijakan-kebijakan yang hendak dilaksanakan untuk mengawal perubahan di Turki ke depan. Di pundak mereka menunggu beragam persoalan yang harus segera diselesaikan, baik menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial-kemasayarakatan dan hal-hal lain untuk kepentingan publik sekaligus dalam batas tertentu para konstituen partai.

Tuntutan dari kalangan sekuler juga turut membayangi langkah mereka, sebab sejak kemernangan itu diraih kalangan sekuler telah memberi sinyalemen kehati-hatian, mengharapkan AKP agar mematuhi sekulerisme, salah satunya diutarakan petinggi Partai Demokratik Kiri, Bulen Ecevit yang saat itu menjabat Perdana Menteri, menurut laporan partainya hanya mendapat 1% suara, ia

¹⁰⁵ "Partai Baru Menang di Turki" dalam <http://www.bbcindonesia.com/htm>, akses tanggal 06 Juni 2008.

¹⁰⁶ *Ibid.*

menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa Partai AKP yang berbasis Islam akan mengancam kelompok sekuler di Turki "Saya berharap partai ini akan menghormati kaum sekuler dan demokrat," kata Ecevit¹⁰⁷. Kekhawatiran oleh kalangan sekuler itu merupakan hal yang wajar karena melihat basis massa partai AKP yang memang berbasis Islam, respon atas kekhawatiran itu pun ditanggapi dengan bijaksana oleh Erdogan selaku ketua partai seperti dalam komentar di atas menyangkut komitmen partainya dalam menghargai sekulerisme Turki. AKP ingin menunjukkan kepada semua pihak bahwa mereka merupakan partai baru dengan kemasan yang lebih "segar", beraliran politik moderat, menjawab kekhawatiran dan keraguan kalangan lain dengan prestasi-prestasi yang hendak diukir dengan program kerja yang sebetulnya telah dipublikasikan semasa kampanye pemilu.

1. Politik

Dalam bidang politik ada beberapa hal yang dianggap menjadi skala prioritas, untuk urusan luar negeri mereka telah mempersiapkan secara maksimal lamaran untuk menjadi salah satu anggota penuh Uni Eropa (UE), UE juga merupakan salah satu program kerja yang dicantumkan sedari awal oleh partai ini, mereka memiliki prediksi bahwa dengan menjadi anggota UE Turki akan menjadi lebih baik, baik dalam hal kesejahteraan maupun kebebasan dalam berpolitik yang

¹⁰⁷ *Ibid.* Kemenangan AKP untuk kedua kalinya dapat juga diartikan sebagai kemenangan atas sekulerisme yang telah kehilangan posisi di hati masyarakat Turki, namun demikian hal itu tidak menjadi alasan utama, bagi elit AKP yang terpenting adalah kehadiran partai mampu memberikan warna tersendiri bagi pemerintahan dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi sepenuhnya.

selama ini dikebiri oleh elit Kemalis (terutama militer) yang berpikiran sempit menyangkut sekulerisme. Dalam bidang politik UE dianggap akan memberikan dampak signifikan dalam membangun kultur politik yang lebih moderat dan lebih akomodatif bagi kepentingan semua pihak. Sedangkan pada aspek ekonomi tentunya prestasi ekonomi UE sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi dunia tidak diragukan lagi.

Menjadi anggota penuh UE tentunya menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi AKP untuk menunjukkan eksistensinya dalam mengatur pemerintahan di bawah kendali AKP. Untuk menjadi anggota penuh UE kriteria yang harus dipenuhi adalah Copenhagen Criteria¹⁰⁸ yang berisi :

1. *“...stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, kepastian hukum, hak asasi manusia dan menghargai dan melindungi kalangan minoritas*
2. *“...eksistensi pasar ekonomi seperti kapasitas untuk berkompetisi di bawah tekanan dan kekuatan pasar di antara anggota perserikatan.*
3. *“...dalam keanggotaan mensyaratkan kemampuan kandidat untuk menanggung konsekuensi atau kewajiban dalam keanggotaan termasuk*

¹⁰⁸ Mengenai Copenhagen Criterian lebih lengkap bisa dilihat dalam Michael Emerson, “Has Turkey Fulfilled the Copenhagen Political Criteria?,” CEPS Policy Brief No. 48/April 2004 (<http://www.shop.ceps.be>); “The Copenhagen Criteria,” European Commission : Strategy Paper and Report 2003, http://www.fifoost.org/EU/strategy_en_2002/node3.php.

*kesetian menyangkut aspek politik, ekonomi dan moneter dalam spirit perserikatan.*¹⁰⁹

Menindaklanjuti Copenhagen Criteria sebagai upaya menjadi anggota tetap UE, elit AKP dengan dikomandoi Erdogan selaku Perdana Menteri memulainya dengan langkah impresif¹¹⁰ : pemerintah memberikan abolisi kepada terpidana mati, membatasi keterlibatan militer dalam politik (atau melakukan demiliterisasi tentara dalam urusan politik dengan mengembalikannya ke barak dalam arti luas) dan mengurangi pembatasan atas pengamalan bahasa dan budaya Kurdi.¹¹¹

Kriteria di atas sekaligus menjadi batu loncatan bagi partai AKP untuk melakukan reformasi sistemik di berbagai lini birokrasi, agenda paling mendesak tentunya adalah merestorasi militer agar dijauhkan dari aktifitas politik, para jenderal diupayakan berhenti mengintervensi secara berlebihan aktifitas politik negara itu demi terwujudnya demokratisasi, Copen Hagen Criteria memang sangat menganjurkan proses demokratisasi di negara-negara kandidat anggota tetap hal

¹⁰⁹ Kebijakan memberlakukan prasyarat keanggotaan penuh bagi kandidat UE tersebut diputuskan oleh Dewan Eropa di Copenhagen pada 21-22 Juni 2003 .

¹¹⁰ Owen Matthews dan Sami Kohen, "The True Turkish Believer," *Newsweek*, Februari 18, 2008. Hlm, 39-40.

¹¹¹ Sementara Turki berupaya keras untuk melengkapi prasyarat yang ditetapkan UE, terdengar suara kontra dari salah satu elit UE yakni Perancis, melalui presiden Nicolas Sarkozy yang menyatakan bahwa tidak memungkinkan bagi Turki untuk menjadi anggota tetap UE karena Turki sendiri merupakan negara Asia, lebih realistis kalau Turki suatu saat menjadi bagian dari Mediterranean Union (Perserikatan Kawasan Mediterania). Berbeda dengan Perancis, Jerman sendiri melalui Kanselirnya Angela Merkel malah sebaliknya yang optimis dalam hal keanggotaan tetap Turki di UE, bahkan ia menawarkan opsi "privileged partnership" (mitra istimewa) bagi Turki yang mengarah pada anggota tetap, *Ibid.* Dalam sampul/cover depan majalah *Newsweek* edisi Februari 18, 2008 itu juga dituliskan "Turkey's Western Soul, France Can Say No, But Turkey Aims To Build a Society Europe Can't Refuse." Yang menggambarkan upaya serius pemerintah Turki untuk urusan UE.

tersebut dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi negara anggota sebagai komitmen bersama membangun kultur perserikatan yang modern dan demokratis dalam berbagai hal (dengan berpedoman pada statuta Uni Eropa).

Awalnya, banyak pihak di Turki melihat kemenangan AKP pada pemilu pertamanya akan membawa agenda-agenda yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat keislaman, seperti mengurus pemberian izin mengenakan jilbab di tingkatan universitas dan urusan-urusan internal lainnya,¹¹² akan tetapi asumsi tersebut dimentahkan oleh para petinggi AKP yang duduk di parlemen dan pemerintahan. Pada awal-awal memerintah partai AKP dihadapkan pada persoalan pemulihan krisis ekonomi (2000-2001) yang sangat parah dalam sejarah negeri itu, relasi Turki dengan negara-negara lain bisa dikatakan tidak harmonis, sehingga dibutuhkan upaya intensif untuk mencairkan kembali hubungan yang telah dijalin, tes pertama bagi elit AKP adalah perang Irak, di satu sisi Irak merupakan salah satu sekutu kawasan Turki untuk urusan Timur Tengah, di sisi lain Amerika Serikat yang memiliki pengaruh di IMF memiliki program pemulihan krisis bagi Turki, sangat diharapkan. Di sini Turki dihadapkan pada dilema, dalam skala lebih luas, untuk invasi Irak, tiga koalisi Turki-Inggris-Amerika Serikat, maka Turki lah yang akan dianggap sebagai pengatur skenario itu dan akan menjadikan negara-negara Arab tidak simpati lagi bahkan cenderung akan mengisolasi Turki dalam berbagai hal.

¹¹² Mehmet Ozkan, "Turkish Activism In The Middle East After The 1990s: Towards a Periodization of Three Waves," *Foundation for Middle East and Balkan Studies*, t.t. Hlm 157-185.

Pada spektrum politik, AKP diharapkan oleh konstituennya, dan pada sisi lain kalangan oposisi, untuk mampu menyeimbangkan antara politik dalam negeri dan politik luar negeri.

Pada bidang politik luar negeri, Turki sejak pemerintahan berada di tangan AKP memang berorientasi pada kepentingan nasional dan kadang-kadang menggunakan kartu Islam sebagai alat untuk memeperkuat pengaruh pada kebijakan luar negeri. UE sebagai prioritas dalam hal ini sangat menguras tenaga mereka untuk melobi Dewan UE agar sesegera mungkin menegosiasikan kemajuan-kemajuan yang ada setelah lamaran di layangkan. Berbagai upaya dilakukan Turki untuk mempermudah urusan dengan UE. Di sini kharisma Amerika Serikat juga turut membantu dalam mempermudah urusan.

Gambar 4.1. Kunjungan Kerjasama Turki-Iran Pada 2006 di Teheran



Sumber: The Washington Institute

2. Ekonomi

Menggandeng Uni Eropa merupakan rencana jangka panjang Republik Turki, Turki berharap bisa bergabung menjadi salah satu komunitas yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan grafik perkembangan signifikan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Pembangunan kapal-kapal, mobil, Van belakangan menjadi pemandangan biasa di Turki. Menurut pemerintah investasi merupakan salah satu prioritas pembangunan dan didukung dengan agen promosi bidang investasi, hal itu dilakukan sejak tiga tahun lalu, sehingga Turki saat ini menjadi produsen kapal terbesar urutan kedelapan dunia.¹¹³ Dan jika Turki telah menjadi anggota tetap UE maka ia akan menduduki peringkat keenam dalam perkembangan di bidang ekonomi dan dalam kelompok UE termasuk berada pada peringkat ketujuh belas dunia.

Karakteristik partai AKP yang kini memimpin pemerintahan membuka keran selebar-lebarnya untuk investor yang ingin menanamkan modal atau membeli saham di bidang ekonomi, khususnya investor asing, telah ada beberapa daftar investor asing yang diberikan izin untuk bermain di arena ekonomi Turki.¹¹⁴

¹¹³ James Drummond, "Open Economy Woos Investors," *Financial Times*, 21 November 2007.

¹¹⁴ *Ibid.*

Pada tahun 2006 Vodafone salah satu perusahaan telekomunikasi asal Inggris membeli sejumlah saham operator GSM Telsim sekitar \$4.7bn.¹¹⁵ Pada tahun yang sama Citigroup membeli 20 persen saham pada Akbank untuk \$3.1bn dan National Bank of Greece, dan terdapat juga pembeli saham yang bernuansa politis untuk membeli Finansbank. Citigroup juga membeli Opus Securities, sebuah cabang bank lokal.

Promosi intensif juga terus dilakukan pemerintah Turki, seperti yang juga dilakukan Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, saat menghadiri konferensi pada bulan Oktober di London, dalam konferensi tersebut Erdogan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Turki pada bidang-bidang yang telah dirancang pemerintah, seperti membuka railway, jalan-jalan, proyek metro, perumahan rakyat dan bandar udara.

Di mata investor asing Turki bukanlah dalam kategori buruk dalam urusan perizinan dan kerjasama, cukup teratur dalam urusan pekerja. Cukup sehat dalam parameter dunia bisnis permulaan bagi pihak asing. Ranking yang relatif redah merefleksikan urutan ke 53 yang disematkan oleh World Economic Forum's indeks dalam persaingan global—walaupun peringkat itu merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada urutan ke 58. Menurut forum tersebut kenaikan ranking disebabkan karena kemampuan mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sekaligus mampu membaca peluang ekonomi secara intensif. Namun demikian forum tetap mengkritisi standar infrastruktur, kepedulian atas pendidikan dasar dan kesehatan.

¹¹⁵ *Ibid.*

Merespon hal tersebut pemerintahan AKP kemudian menciptakan tiga resep untuk pengembangan dengan basis tiga zona untuk investasi. Pemerintah membagi zona ekonomi negaranya menjadi 81 kawasan tujuh di antaranya dalam kategori "kawasan pembangunan"—Istanbul, Kocaeli, Ankara, Ismir, Bursa, Adana dan Antalya; 20 kawasan dalam kategori pembangunan "normal"; dan 54 dalam kategori "prioritas".

Pada masing-masing provinsi terdapat parkir berteknologi (technoparks) dan kawasan bebas perdagangan, dimana disana tidak terdapat pajak perusahaan. Pada technoparks, para investor dimanjakan dan dipuaskan dari segi pelayanan oleh para agen pemerintah yang telah memiliki kemampuan ilmu dan teknologi tingkat tinggi.

Menurut Korkmaz yang juga seorang pejabat pemerintah menyebutkan bahwa pemerintah Turki sedang dalam tahap mempersiapkan berbagai aturan baru, direncanakan akan selesai dalam waktu enam bulan, dalam rangka mendukung inovasi, penelitian dan pengembangan bagi kemajuan Turki.

Optimisme terus dipupuk oleh Erdogan untuk mengawal perkembangan negeri itu, menurutnya seperti dikutip Vincent Boland,¹¹⁶ tidak ada alasan untuk Turki untuk tidak maju melangkah menjadikan tingkat produk domestik (GDP) \$1,000bn di bidang ekonomi (pada tahun 2006 GDP \$410 bn). Ia juga berusaha untuk menaikkan tingkat GDP tahunan perkapita menjadi \$10,000 pada tahun 2013, dari yang saat ini hanya \$6,000.¹¹⁷

¹¹⁶ Vincent Boland, "Policy Follow Trade Abroad," *Financial Times*, 21 November 2007.

¹¹⁷ *Ibid.*

Kursan Tuzman, menteri perdagangan saat itu, juga memiliki ambisi yang sama untuk meningkatkan grafik GDP nasional sesuai dengan parameter perkembangan pembangunan modern, meskipun tingkat impor lebih tinggi yang ditujukan untuk memasok kebutuhan dalam negeri, namun di sisi lain impor merupakan parameter perkembangan ke arah yang lebih baik, sebab hal itu juga disandingkan dengan tingkat ekspor terus-menerus yang juga meningkat merupakan upaya positif pemerintah yang memiliki kebijakan pro-bisnis sejak tahun-tahun yang lalu. "Ketika ekspor kita melebihi \$100bn dalam setahun maka kita dapat melihat diri kita sebagai bagian dari frame negara-industri," kata Tuzman.¹¹⁸

Turki, tentu saja, melanjutkan upayanya untuk menjadi pasar yang potensial, namun demikian menteri memiliki point lain. Negara memiliki kekuatan di bidang industri yang terus bergerak dengan basis produksi di bidang industri seperti industri otomotif, tekstil, bidang kimia, permesinan, dan produksi makanan.

Sektor tersebut berpotensi mendatangkan investasi sekaligus mampu menyerap lapangan pekerjaan dalam jumlah yang tidak sedikit dan fleksibel, dan berdampak positif juga pada nilai tukar mata uang Turki, Lira, tentunya menjadi lebih mahal.

Sekitar 55 persen ekspor Turki ditujukan kepada negara-negara UE, dimana Turki telah mendapatkan previlis (keistimewaan) sejak 1996. Namun Tuzman menyebutkan sejak tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Turki justru

¹¹⁸ *Ibid.*

meningkat saat mempromosikan produk-produknya kepada negara-negara tetangga seperti di Asia dan Afrika. Sejak tahun 2003 juga, ekspor ke Bulgaria dan Rumania meningkat menjadi \$3bn dan \$5bn, dan ekspor ke negara-negara tetangga meningkat dari 7 persen menjadi total 33 persen. Ekspor ke Rusia meningkat dari \$10bn menjadi \$25bn.

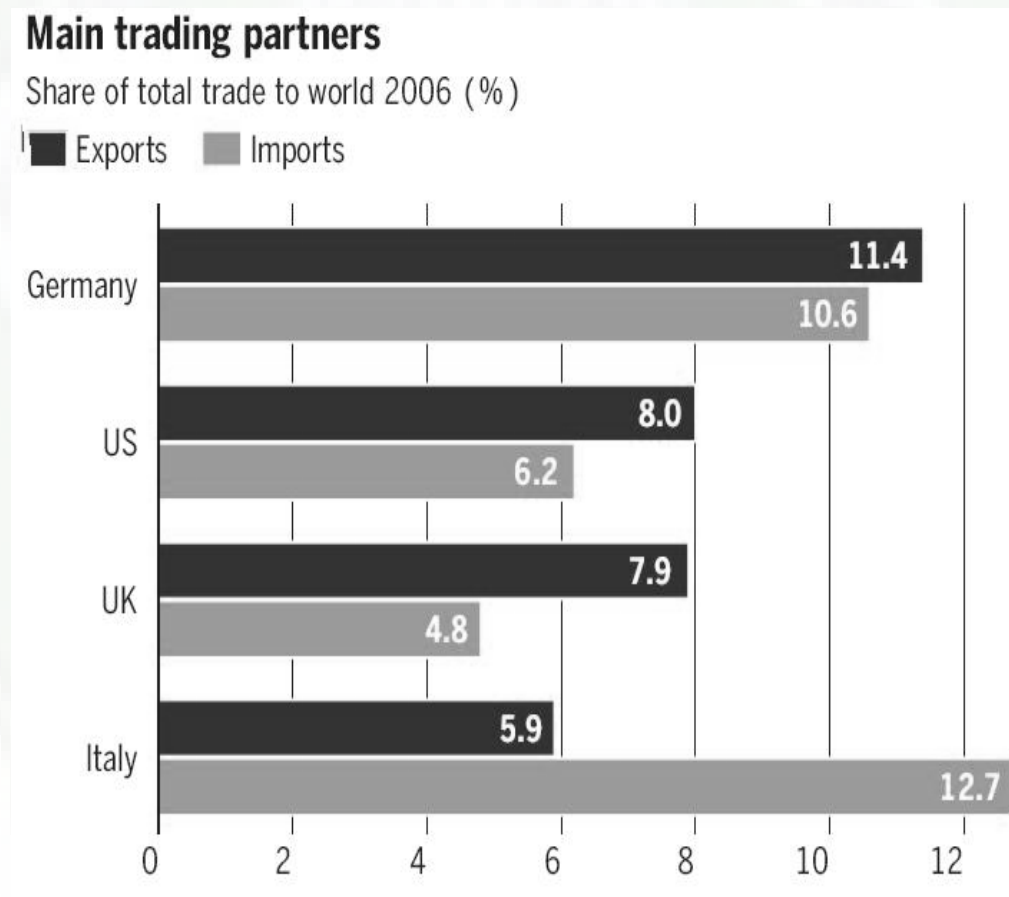
Kebijakan "Pertetanggaan (neighbourhood)" menjadi pusat perhatian pemerintah khususnya di bidang ekonomi. Erdogan telah membujuk para investor kawasan Teluk, yang berminat untuk menuangkan investasinya di beberapa aset yang dimiliki Turki. "It is very important for the politics of Turkey and for our foreign policy," kata Tuzman menilai kebijakan ekspor. Ia melihat misi diplomatik bidang luar negeri memiliki dampak positif terhadap urusan bisnis atau komersial. "Foreign policy now follows foreign trade policy, (Hari ini kebijakan politik luar negeri mengikuti kebijakan perdagangan luar negeri)."

Ambisi lainnya adalah menargetkan peningkatan ekspor: \$200bn pada tahun 2013 dan \$500bn tahun 2023. Untuk meraih hasil itu, Tuzman mengatakan, perekonomian akan tumbuh pada tiap tahunnya 5 sampai 6 persen. Antara tahun 2002 dan 2006 ekonomi Turki terus merangkak tiap tahunnya mencapai 7,4 persen.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan Tuzman menyebut beberapa point yang akan menjadi resep pemulihan atau peningkatan kemajuan yang telah dicapai di antaranya adalah mereformasi bidang mikro-ekonomi, memperbaharui infrastruktur Turki, melanjutkan privatisasi, mengembangkan pelabuhan—terutama Mersin, di kawasan Mediterania—dan memperbaharui infrastruktur bidang

ekspor dan impor. Hal lain yang menjadi kendala bagi para eksekutif dan pelaku bisnis Turki adalah visa perjalanan yang tentunya menghabiskan waktu untuk mengurusnya ketika berada di kawasan UE, sedangkan para eksekutif UE ketika datang ke Turki diberi kemudahan untuk meraih visa. Oleh karena itu pemerintah Turki mencoba melobi Brussel untuk mempermudah atau menekan kerjasama (MoU, *Memorandum of Understanding*) yang memberikan kemudahan kepada semua pihak. Hal itu bukan lagi menjadi persoalan ketika Turki telah resmi menjadi anggota penuh UE.

Gambar 4.2. Grafik kerjasama Turki dengan pihak luar negeri



Sumber: Financial Times, 2007

3. Sosial-Keagamaan

Dalam urusan sosial, partai AKP selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Turki. Jilbab sendiri merupakan salah satu isu sensitif di Turki, bagi elit Kemalis jilbab adalah simbol perlawanan agama tertentu (Islam) terhadap negara, Jilbab dianggap sebagai simbol Islamis yang dikhawatirkan akan membahayakan sekulerisme Turki. Keputusan untuk menghilangkan simbol keagamaan dari ruang publik seperti disebutkan pada bab dua. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata aturan yang diyakini sebagian besar elit Kemalis termasuk militer tentang Undang Undang yang ada sangatlah impresif, seperti perlakuan mereka terhadap banyak orang. Jilbab secara tegas ditentang dan dilarang terutama di tempat-tempat tertentu, seperti sekolah, universitas dan gedung-gedung pemerintah. Bahkan semua itu berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu.¹¹⁹

Ada tiga isu sensitif yang terus diperjuangkan oleh kalangan Islamis, termasuk oleh partai AKP, yakni Isu Jilbab, Imam Hatip School, Kursus Pengajaran Al-Qur'an.

Isu Jilbab, mengenakan jilbab merupakan tindakan terlarang di Turki, ia menjadi isu sangat sensitive setidaknya pasca tahun 1980. Para Mahasiswi yang mengenakan Jilbab dikeluarkan dari universitas oleh Dewan Pendidikan Tinggi (YOK, sejenis Dikti di Indonesia).

¹¹⁹ Sebelumnya banyak kalangan mahasiswi muslimah di universitas menanggalkan jilbab untuk menaati undang-undang agar bisa melanjutkan pendidikan. Bahkan, seperti disebutkan Ahmad Syahidah mengutip seorang professor, Dr Zailan Moris, seorang nenek pun harus melepaskan jilbab jika ingin memasuki sebuah universitas. Satpam kampus memaksa sang nenek meskipun yang terakhir bersikeras untuk tetap memakainya. Sehingga potret seperti ini jelas-jelas menunjukkan sebuah warna fundamentalisme sekuler. Lihat Ahmad Syahidah, "Jilbab dan Politik Islam di Turki," dalam <http://www.republika.co.id>, akses tanggal 07 Mei 2008.

Upaya partai AKP¹²⁰ untuk memberikan kebebasan kepada para mahasiswi khususnya, untuk mengenakan jilbab dengan beragam cara. Erdogan sendiri memilih dua inisiatif dalam kasus ini. Pertama ia mengusulkan agar pembatasan dan pelarangan penggunaan jilbab diberlakukan di sekolah negeri sedangkan pada tingkatan universitas hal itu diperbolehkan. Akan tetapi usulan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari kalangan Kemalis, tidak mendapatkan respon, Erdogan kemudian menawarkan opsi lain yakni agar pembatasan tersebut berlaku hanya di universitas negeri sedangkan pada universitas swasta larangan dihilangkan alias diperbolehkan. Namun upaya ini juga tidak berhasil.¹²¹

Isu jilbab bisa juga diibaratkan bagaikan dua sisi mata pedang bagi partai AKP. Di satu sisi, para konstituen partai AKP yang mayoritas muslim taat (salah satu indikasinya dalam hal mengenakan jilbab) berharap banyak agar AKP mampu menyelesaikan persoalan ini. Disamping, mayoritas para elit partai AKP yang duduk di parlemen maupun pemerintahan (seperti Erdogan, Arinc dan Gul) memiliki istri dan saudara-saudara perempuan yang juga mengenakan jilbab. Sedangkan di sisi lain, AKP tidak serta merta mampu menyelesaikan persoalan ini secara gampang karena persoalan jilbab juga merupakan isu sensitif yang selama ini sering membahayakan partai-partai Islam di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konsitusi telah beberapa kali membekukan partai Islam karena alasan jilbab ini,

¹²⁰ Memberikan kebebasan untuk mengenakan jilbab di universitas juga mendapat dukungan dari partai lain, seperti partai kalangan kanan, seperti TPP.

¹²¹ Meskipun AKP sejak tahun 2002 menguasai mayoritas kursi Parlemen namun pada masa-masa awal menduduki jabatan tersebut mereka tidak memiliki daya tawar politik yang begitu kuat sehingga memilih untuk tidak terlalu frontal dengan elit Kemalis yang memiliki kewenangan lebih luas dari segi akumulasi kekuasaan.

sebut saja Partai Refah atau Partai Fazilet. Namun demikian tindakan elit Kemalis yang cenderung berfikiran negatif secara perlahan dicoba oleh para pemimpin AKP untuk terus melakukan upaya-upaya lain untuk menyelesaikan persoalan jilbab. Hal yang sama juga dialami oleh AKP ketika berhadapan dengan isu Imam Hatip School dan Kursus Pengajaran Al-Qur'an, mereka lagi-lagi dihadapkan pada dilema dalam berpolitik pada tingkatan domestik.

Perlahan AKP mencoba menggunakan pendekatan yang lebih logis dan moderat dalam mengadvokasi tiga di antara sekian banyak persoalan yang harus diselesaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban partai AKP atas kepercayaan yang diberikan oleh para konstituennya. Isu-isu yang seperti ini banyak diselesaikan di parlemen dengan menggunakan jalur legislasi, dan keterangan lebih rinci pada halaman selanjutnya.

Gambar. 4.3. Presiden Gul Bersama Istri Dalam Sebuah Acara Resmi



Sumber: www.bbc.com

B. AKP vis a vis Partai Politik Lain

Kultur politik di Turki tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain yang sedang membangun budaya demokrasi di era transisi. Evolusi dari satu partai kemudian menjadi banyak partai tentunya bisa dilihat sebagai proses demokrasi ke arah yang lebih moderat dan demokratis. Keputusan untuk memberikan peluang bagi semua warga negara oleh pihak yang berkuasa (pemerintah) berpartisipasi dalam politik dengan memberikan hak mendirikan partai politik sebagai sinyal komitmen membangun negara dengan pendekatan universal dan moderat.

Kemenangan AKP sebetulnya tidak begitu diinginkan oleh kalangan sekuler, meskipun jauh-jauh hari partai AKP telah mengkampanyekan diri sebagai partai non-agama namun tetap saja kalangan sekuler menganggap AKP sebagai partai agama, kalangan sekuler bahkan menganggap AKP sebagai Ottoman baru yang melakukan reinkarnasi di era modern. Sentimen ini kemudian terbawa ke ranah kepentingan antara kedua belah pihak, di dalam bernegara dengan struktur mapan dikenal logika trias politika, konsekuensi dari adagium ini kemudian melahirkan relasi biner antara pihak oposisi dan pemerintah. AKP saat ini, lebih tepatnya sejak tahun 2002, menduduki wilayah pemerintahan dengan wewenang untuk mengeksekusi segala hal yang dibutuhkan untuk menjalankan negara dengan kebijakan-kebijakan dari inisiatif kader AKP. Sementara kalangan oposisi akan terus mengontrol kebijakan yang dikeluarkan.

Sejauh ini, AKP dan partai-partai lain memiliki hubungan yang lumrah sebagaimana terjadi dalam kultur perpolitikan di negara-negara yang sedang mengembangkan pola suksesi kepemimpinan lewat jalur pemilihan umum. Banyak negosiasi dilakukan AKP dengan partai-partai lain yang tidak menentu dalam pendirian politiknya. Partai Rakyat Republik mungkin salah satu partai dengan pengaruh penting di beberapa lini, PRR sendiri yang menjadi saingan kuat AKP memiliki pengaruh karena ia secara tegas mengkapanyekan diri sebagai partai pendukung sekulerisme, partai ini mewarisi nama besar Mustafa Kemal yang juga menjadi pendiri sekaligus orang yang ditokohkan di PRR, partai ini juga sangat lama memegang jabatan eksekutif sehingga memiliki pengaruh di kalangan birokrasi dari pusat sampai ke daerah.

Sentimen PRR atas AKP sepiintas bisa dilihat secara gamblang ketika salah seorang elit PRR yang juga mantan presiden mengomentari kemenangan AKP dengan nada sinis, seakan kemenangan AKP adalah bencana bagi masa depan sekulerisme Turki, ia sangat khawatir akan manuver politik AKP yang bisa jadi sangat kontras dengan kebiasaan politik pemerintah yang biasa-biasa saja dan cenderung mempertahankan budaya sekulerisme warisan Mustafa Kemal, itupun kalau benar-benar memahami konsepsi sekulerisme ala Mustafa Kemal atau malah mengklaim sebagai penafsir tunggal atas Sekulerisme warisan Mustafa Kemal.

C. Posisi AKP vis a vis Golongan Sekuler

Menguraikan lapis sosial di Turki tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain yang memilih sekulerisme sebagai jalan hidup. Ideologi sekuler melahirkan lapis sosial yang beragam dan secara sadar masyarakat terbentuk ke dalam kultur sekulerisme kemudian membela kultur tersebut berdasarkan prinsip yang diyakini.

Kategorisasi golongan yang kelihatannya sangat setia terhadap nilai-nilai sekulerisme antara lain adalah : Birokrasi (Militer lebih dominan, disusul para hakim senior di lembaga yudikatif), Media Massa, Cendekiawan.

Militer termasuk elit Kemalis lapis tertinggi dalam membela warisan Kemal Attaturk, warisan dalam arti menjaga dan menginterpretasikan produk masa lalu dalam bentuk undang-undang, segala hal atau pihak-pihak yang dianggap bertentangan dengan warisan sekulerisme maka mereka berada di garis depan membela mati-matian warisan tersebut. Kendati mereka banyak dikritik karena terlampau menghamba pada produk sekulerisme masa lalu, namun mereka tetap berada pada pendiriannya. Upaya untuk membentengi undang-undang tersebut menggunakan jalur legislasi. Mahkamah Konstitusi dimanfaatkan seefektif mungkin untuk menghambat hal-hal yang memiliki kecenderungan menggeser konsepsi sekulerisme. Legislasi Jilbab misalnya, menjadi polemik berkepanjangan dalam wacana politik di Turki. Menggunakan jilbab di ruang publik milik pemerintah, di sekolah-sekolah dan universitas-universitas sangat dilarang karena dianggap sebagai Islam politik dan menghina nilai turkisme.

Fakta lain yang bisa dijadikan rujukan dalam melihat kasus jilbab ini secara holistik adalah seperti pada akhir tahun 1980-an ketika parlemen dikuasai partai Tanah Air pimpinan Turgut Ozal mengusulkan legislasi pembebasan mengenakan berbagai macam pakaian, termasuk pakaian yang mengandung unsur keyakinan, seperti jilbab di universitas-universitas. Akan tetapi usulan tersebut diveto oleh presiden Kenan Evren, ia memveto usulan tersebut dengan alasan: kebebasan mengenakan pakaian sangat bertentangan prinsip-prinsip dan reformasi Attaturk, pemikiran modern, sekulerisme, dan prinsip-prinsip kesamaan. Parlemen kemudian menawarkan opsi lain pada 1988 agar larangan yang ketat tersebut diringkankan menjadi membolehkan mengenakan pakaian yang menutup leher dan kepala bagi wanita untuk menjalankan keyakinan keagamaan. Evren kemudian merespon usulan tersebut dengan melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Turki, yang mengklaim legislasi parlemen inkonstitusional. Mahkamah pun memutuskan kebenaran ada di pihak Evren dan menganggap legislasi tersebut memang inkonstitusional dengan menjadikan prinsip-prinsip sekulerisme sebagai alasan utama. Menurut Mahkamah, legislasi yang memberikan izin mengenakan jilbab di universitas, bisa jadi menimbulkan konflik keagamaan, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan merusak tatanan masyarakat. Mahkamah juga beralasan, "Isu pakaian sangat dibatasi oleh Revolusi Turki dan Prinsip-prinsip Attaturk dan hal itu bukanlah isu kebebasan berkeyakinan..." Hakim Mahkamah sendiri dalam hal ini tidak berada dalam satu kesepakatan bulat karena dari sepuluh hakim hanya satu yang mengajukan

(*dissenting opinion*)¹²², yakni Mehmet Cinarli.¹²³ Cinarli memiliki empat alasan: (1) melarang menggunakan jilbab adalah bentuk perlawanan terhadap kebebasan setiap individu yang dilindungi oleh Konstitusi; (2) Konstitusi memberikan otoritas kepada parlemen untuk membatasi kebebasan untuk kepentingan publik; jika parlemen memutuskan untuk membeberikan beberapa kebebasan, maka pihak kehakiman tidak memiliki otoritas untuk membatasi keputusan mereka (parlemen); (3) pidato-pidato Attaturk dan Hukum-hukum Revolusi tidak menyebutkan secara eksplisit segala sesuatu yang melarang penggunaan jilbab; dan (4) Kesimpulan Mahkamah yang menyatakan atau mendefinisikan bahwa menggunakan jilbab adalah bagian dari simbol politik dan keterbelakangan tradisi tidak merefleksikan realitas yang ada; menurut surat edaran Diyanet (Departemen Agama), mengenakan jilbab adalah kewajibab keagamaan dan banyak di antara para mahasiswa yang mencoba untuk melaksanakan kewajibab tersebut.

Legislasi menyangkut urusan jilbab dari parlemen seakan terkatung-katung dalam waktu yang panjang, selain durasinya panjang proses legislasi seringkali mendapatkan hambatan di tangan presiden, sebab presiden memiliki hak veto dalam urusan legislasi jika menurut presiden draf yang diusulkan parlemen tidak sesuai atau melanggar konstitusi (dalam batas tertentu tidak sejalan dengan keinginan elit Kemalis).

¹²² Yakni hak setiap hakim untuk menyatakan ketidaksepatannya dalam memutuskan suatu perkara.

¹²³ Ahmet T. Kuru, *Reinterpretation of Secularism in Turkey*, dalam Hakan Yavuz, *The Emergence...*, hlm. 147-148.

Pada tahun 2004 presiden Turki kala itu Ahmet Necdet Sezer¹²⁴ memveto usulan parlemen mengenai pembebasan bagi wanita mengenakan jilbab, veto itu sempat mendapat kritik keras dari sejumlah media Barat, seperti editorial yang diturunkan New York Times (NYT)¹²⁵ berjudul "Mosque and State in Turkey," dalam editorial tersebut NYT melihat bahwa tindakan presiden Turki sama sekali tidak mencerminkan iktikad baik dalam menjaga demokrasi Turki, demokrasi seyogyanya memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan keyakinannya tanpa ada kontrol berlebihan seperti dilakukan elit kemalis, apalagi hal itu menyangkut urusan hak mendapatkan pendidikan yang setara dan layak bagi setiap warga negara Turki. NYT juga menganalisa kecenderungan sekulerisme berdampak negatif bagi masa depan lembaga pendidikan keagamaan di Turki yang berjumlah tidak kurang dari 536 buah, belum lagi studi Qur'an, yang juga mengajarkan kurikulum yang sama dengan sekolah-selolah non-agama. Kemudian editorial itu diakhiri dengan meratapi masa depan 64, 500 siswa yang kelak akan menjadi penerus Turki dikontrol secara berlebihan oleh negara dengan cara-cara yang kurang edukatif bahkan memberikan stigma buruk bagi sekolah-sekolah agama atau para siswa wanita yang mengenakan jilbab berpotensi menggeser ideologi sekulerisme negara dan melahirkan para fundamentalis

¹²⁴ Ahmet Necdet Sezer menjabat sebagai presiden sejak 16 Mei 2000 sampai 28 Juli 2007 selama tujuh tahun kemudian digantikan oleh Abdullah Gul untuk masa jabatan lima tahun, durasi lima tahun merupakan hasil amandemen beberapa pasal dengan jalur referendum pada 21 Oktober 2007.

¹²⁵ *New York Times* yang berpusat di Amerika Serikat merupakan salah satu media massa mapan dan memiliki pengaruh kuat dalam mempengaruhi wacana publik internasional. Pemberitaan ini termasuk menjadi point penting bagi AKP, sebab dalam editorial tersebut NYT juga memberikan apresiasi besar kepada AKP yang mampu menumbuhkan demokrasi Turki, menjawab pertanyaan masyarakat internasional (lebih dominan masyarakat Barat) selama ini tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi. Sebuah simpati pers Barat atas partai berbasis Islam yang tidak diperoleh partai-partai Islam lain sebelumnya.

Islam—NYT juga memberikan masukan bahwa se-sekuler apapun kurikulum pemerintah tidak akan pernah mampu meredam fundamentalisme, sebab tidak ada kaitannya antara pendidikan dengan menggunakan aksesori keagamaan dengan nalar fundamentalis Islam-- , padahal mereka semua adalah anak dan saudara sesama bangsa Turki.

Ketegangan antara kalangan Islamis dan sekuler seakan tidak pernah usai, seperti pada awal bulan Februari tahun 2008,¹²⁶ sejumlah demonstran dari kalangan sekuler menentang rencana pemerintah untuk memperbolehkan wanita mengenakan jilbab di ruang publik seperti kantor pemerintah, universitas-universitas, sekolah-sekolah. Larangan mengenakan jilbab sendiri paling tidak telah berlangsung selama dua dasawarsa sejak pelarangan secara ketat oleh pemerintah pada tahun 1980-an.

Parlemen Turki yang mayoritas di dalamnya diduduki oleh kader AKP telah menyetujui dua amandemen konstitusi,¹²⁷ yang akan memungkinkan kaum wanita diperkenankan mengenakan jilbab di universitas. Pemerintah Turki mengatakan, larangan berjilbab yang saat ini berlaku menghalangi ribuan wanita menjalani pendidikan tinggi. Langkah ini mendapat dukungan luas dari masyarakat (para pendukung gagasan ini meyakinkan publik Turki secara umum bahwa alasan mereka --para wanita-- mengenakan jilbab semata-mata karena keyakinan keagamaan mereka, sama sekali bukan bertendensi politis seperti yang

¹²⁶ “Ribuan di Turki Tentang Jilbab,” dalam <http://www.bbcindonesian.com>, demonstrasi berlangsung di Ankara tanggal 2 Februari 2008, kemudian persetujuan parlemen pada tanggal 09 Februari 2008.

¹²⁷ “Turki Kendurkan Cekat Jilbab,” dalam <http://www.bbcindonesia.com>, akses tanggal 29 Mei 2008.

selalu distigmatisasi oleh kubu sekuler), meski sebelumnya ribuan penentang berunjukrasa di ibukota, Ankara.

Kalangan sekuler sendiri yang menentang usulan pemerintah bersama parlemen beralasan bahwa legislasi yang memperbolehkan penggunaan jilbab bagi wanita merupakan salah satu di antara sekian banyak agenda AKP untuk menggantikan sekulerisme dengan Islam, salah seorang dari mereka adalah Ural Akbulut, yang rektor salah satu perguruan tinggi ternama Turki, Universitas Teknis Timur Tengah di Ankara. "Kami menilai ini bukan hak, tapi memaksakan keyakinan keagamaan ke dalam hukum kami, ke dalam konstitusi kami," katanya. "Kami katakan ini akan menghancurkan faham sekuler kami. Begitu anda lakukan itu - kami yakin anda merusak demokrasi," tambah Akbulut. Hal seperti merupakan pemandangan yang biasa dalam publik Turki, tarik ulur antara kalangan sekuler dengan kalangan Islamis.

D. Konfigurasi Politik Pasca Kehadiran AKP di Panggung Politik Turki

Secara umum, kehadiran AKP di puncak kekuasaan menjadi antiklimaks dari episode sekulerisme radikal (ketat) warisan Mustafa Kemal, sebelumnya elit sekuler memonopoli kekuasaan eksekutif dengan tanpa melibatkan partisipasi dalam arti yang sebenarnya dari kalangan agama (dalam hal ini Islam) untuk memutuskan sebuah kebijakan.

Lapis sosial di Turki dengan berbagai latar belakang kelompok sosial: ada yang merasa diuntungkan dan ada juga yang merasa posisinya tidak lagi aman seperti sedia kala. Lapis sosial itu barangkali bisa dibagi menjadi tiga lapisan golongan yakni: Islamis, Sekuleris, Sentralis. Bagi kalangan Islamis kemengangan AKP adalah angin segar yang menghembuskan kemengangan besar dalam kancan demokrasi modern, terbersit sejuta harapan melambung dalam diri mereka, karena selama ini mereka telah dibelenggu oleh format perpolitikan yang dimonopoli dan dihegemoni oleh elit sekuler. Sekulerisme seakan menjadi hantu yang gentayangan membayangi kehidupan kalangan Islam di berbagai ruang publik.

Bagi kalangan sekuleris, hal ini menjadi ancaman tersendiri, sebab kebiasaan dengan kultur pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya kebanyakan diisi oleh para penganut sekulerisme memberikan jaminan kehidupan ala sekulerisme secara artifisial. Mereka telah mapan dengan budaya sekulerisme dan sangat jauh secara waktu dengan warisan nenek moyang mereka yang juga Islamis, Turki Utsmani, mereka kini adalah homo kemalikus yang sedang menikmati kehidupan ala Kemalisme. Kekhawatiran yang membayangi adalah kemungkinan AKP menggantikan sekulerisme dengan Islam, menjadikan Islam sebagai ideologi negara sekaligus menjadikan syari'at Islam sebagai pedoman dalam yuridiksi.

Sedangkan bagi kalangan sentralis tidak ada bedanya antara eskektif dari kalangan Islamis atau bukan, karena mereka cenderung pasif. Mereka ini adalah para kelas menengah yang duduk di birokrasi dengan suara politik yang besar

namun tidak begitu terdengar dalam kancah perpolitikan (*silent politics member*) dalam kancah politik.

Meski demikian, di tengah pesimisme elit sekulerisme, para kader AKP terus menerus bekerja keras untuk menjawab kekhawatiran tersebut dengan program-program yang diproyeksikan sebagai fundamen kemajuan Turki, AKP kelihatannya tidak ingin larut dalam perdebatan yang melelahkan tentang ideologi, tarik ulur Islamis-Sekuleris, dengan memfokuskan pada akomodasi sekian banyak konflik internal Turki untuk diselesaikan secara seksama sebagai prasyarat penting bagi keanggotaan Turki di Uni Eropa.

Dalam melaksanakan program kerja AKP jarang terlihat mengedepankan simbolisasi Islam jika berada di ruang publik, seperti dalam membuat aturan-aturan, mereka seringkali menggunakan terminologi universal: pada tingkat daerah Erdogan saat menjadi walikota Istanbul pernah mengeluarkan peraturan daerah yang melarang meminum minuman keras dengan alasan minuman keras sangat berbahaya bagi kesehatan dan aturan serupa di beberapa tempat di Eropa diberlakukan; untuk urusan jilbab yang menjadi polemik bagi para wanita yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (universitas), elit AKP tidak mengedepankan bahwa jilbab adalah keharusan bagi umat Islam sebagaimana diatur dalam syari'at, melainkan AKP mengedepankan aspek pendidikan adalah hak bagi semua warga negara dan negara juga menjamin keyakinan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan keyakinan yang diyakini tanpa ada seorangpun boleh melanggar hak itu (sembari mengutip sumber-sumber dari PBB), AKP juga semakin yakin akan tindakannya mengadvokasi kepentingan

warga negara yang mengenakan jilbab, sebab pada pengadilan Uni Eropa, menyangkut persoalan Jilbab, dimenangkan oleh Layla Sahin karena, menurut hakim pengadilan hal itu sangat bertentangan dengan HAM--walaupun awalnya aturan-aturan itu mendapat protes namun perlahan bisa diterima dengan akal sehat, padahal sebenarnya elit AKP dari awal mendesain untuk memasukkan nilai-nilai Islam pada ranah yang tepat untuk kemajuan Turki--. Pendekatan ini nyatanya mampu meredam gejolak secara anggun dalam skala luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah dengan kajian literatur pada penelitian ini, untuk kasus Turki dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mengarah pada eksistensi Islam sebagai ideologi yang diinterpretasikan oleh pemeluknya berbentuk nilai-nilai moralitas dalam medium politik (Islam politik) modern.

Oleh karena itu pilihan yang paling sesuai adalah mengakomodasi ideologi lainnya dalam bingkai inklusifitas karena hal tersebut juga merupakan semangat zaman yang terus berubah disamping pentingnya membangun relasi positif dengan medium demokrasi, atau mengutip istilahnya Ziauddin Sardar yang menghendaki agar syari'at secara substansial menjadi metologi pemecahan sekian banyak persoalan kehidupan, sehingga harus selalu akomodatif, ulasan mengenai hal itu dapat diurai menjadi beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Secara garis besar Muslim Turki dapat dicitrakan sebagai masyarakat yang mengalami proses modernisasi dalam jangka waktu yang cukup panjang setidaknya pasca deklarasi Republikanisme 1924, sebuah proses bernegara yang memiliki proyeksi-proyeksi dan harapan besar untuk melahirkan generasi-generasi baru produk budaya Republik Turki yang dekat dengan kebudayaan Barat (Eropa), sebagaimana diimpikan pendiri Republik, Mustafa Kemal Attaturk. Akan

tetapi di tengah arus utama proses penciptaan manusia baru, dengan langkah represif dan restriktif pemerintah dibantu militer dan alat negara lainnya yang bernaung di bawah undang-undang ditandai dengan pelarangan aktifitas bernuansa agama di ruang publik--untuk menyebut beberapa contoh seperti, para wanita dilarang untuk mengenakan jilbab di sekolah-sekolah, universitas-universitas dan di kantor-kantor pemerintah--secara massif dan terencana itu, tercipta komunitas-komunitas imajiner yang menentang proses represifitas dengan berbagai jalur, salah satunya adalah melalui jalur politik. Jalur inilah yang kemudian menjadi latar belakang berdirinya salah satu partai berbasis massa Islam Partai AKP.

2. Berdirinya Partai AKP juga merupakan proses dialektis antar partai politik yang sebenarnya memiliki akar yang sama, yakni membawa bendera Islam, namun karena beberapa tokoh atau petinggi partai memiliki pemikiran politik berbeda. Sehingga menyebabkan lahirnya faksi-faksi alternatif. Seperti partai AKP yang dari sudut pandang paradigma dan sikap politik jauh lebih akomodatif jika dibandingkan dengan partai lain atau partai pendahulunya, semisal partai Refah, yang cenderung vulgar dalam menciptakan ketegangan dengan kelompok lain (kalangkesuluhan Partai AKP dalam skala luas dalam dua kali pemilu sejak pertama kali berdiri tahun 2001 tidak terlepas dari kondisi yang ada di Turki. Kegagalan pemerintah sebelumnya yang tidak mampu membawa perubahan berarti dalam pemerintahan, disamping citra negatif dengan mentalitas koruptif para pejabatnya, yang kemudian benar-

benar ambruk secara pencitraan karena krisis yang melanda Turki pada tahun 2001. Partai AKP lantas memanfaatkan momentum itu untuk melakukan manuver politik secara elegan dengan menawarkan program-program masa depan, seperti upaya keras untuk bergabung dengan Uni Eropa, meyakinkan rakyat Turki dengan paradigma moderat dalam sikap politik. Hal semacam itu sangat membantu dalam mendongkrak citra positif AKP di mata publik Turki, baik kalangan Islamis maupun sekuler.

4. Partai AKP sendiri dapat direpresentasikan sebagai salah satu partai politik dengan akar keislaman yang memiliki atau memilih cara sendiri untuk mengeluarkan muslim Turki dari masalah (tekanan negara dalam menjalankan keyakinan) di negeri itu. Partai AKP yakin akan tujuan mereka untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman moderat dengan menggunakan medium modern, yakni demokrasi. Bagi mereka (AKP) Islam sebagai keyakinan adalah suatu keniscayaan, namun untuk menjalankan keyakinan itu secara nyaman dan tanpa tekanan dituntut pula untuk bernegosiasi dengan iklim politik yang berkembang, oleh karena itu mereka menganggap demokrasi sebagai rel dan infrastruktur politik modern juga tidak kalah pentingnya.

5. AKP dalam kiprah politiknya berhasil meyakinkan masyarakat internasional akan komitmennya membangun Turki secara moderat tanpa mengedepankan Islam formalis, terbukti dengan minimnya gejolak dalam wacana masyarakat internasional mengenai relasi Islam-Barat (sebab saat partai Refah menang dalam pemilu, negara-negara Barat

terutama Eropa dan Amerika Serikat memasang sinyal kecurigaan bahkan mencoba membangun skenario untuk segera menurunkan pemenang pemilu itu secara paksa, mengenai kudeta militer atas kekuasaan partai Refah tahun 1995 hanyalah skenario kecil) pasca kemenangan AKP dalam berbagai pemilihan, baik pada ajang pilkada maupun pemilihan umum.

6. AKP bisa dilihat sebagai partai dengan akar keislaman yang sangat menjunjung tinggi aspek kebangsaan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah anak bangsa Turki yang dituntut untuk mempertahankan identitas nasionalisme mereka berbaur dengan identitas nasionalisme bangsa lain. Mereka mencoba mengkombinasikan antara artikulasi dan substansi nilai-nilai Islam dalam masyarakat Turki yang sedang menuju ke arah masyarakat Eropa (Eropanisasi) lebih tepatnya menjadi bagian dari masyarakat Uni Eropa, baik secara kultur maupun struktur (infrastruktur) kenegaraan.

B. Saran-Saran

Penyusun menyadari bahwa akhir dari penelitian ini tidaklah sesempurna yang penyusun bayangkan dari awal, sebab kendala seperti kelemahan penyusun dalam memahami bahasa Turki yang *notabene* merupakan bahasa dari objek material skripsi ini—sehingga banyak menggunakan literatur berbahasa asing selain bahasa Turki---. Disamping untuk mengkaji politik Turki kontemporer akan lebih menarik kalau dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Mengingat

beberapa pertimbangan tersebut di atas kiranya perlu untuk memperhatikan beberapa hal sebagai saran dari penyusun :

1. Penelitian mengenai politik Turki kontemporer yang mengkaji dinamika pepolitikan Turki dengan membatasi pada salah satu partai (AKP) dengan menggunakan studi kepustakaan kelihatannya tidaklah sebaik andaikata menggunakan penelitian lapangan, oleh karena penyusun berharap ada penelitian lainnya melanjutkan penelitian ini dengan menempuh jalur penelitan lapangan.
2. Turki sebagai kawasan studi kelihatannya akan tetap menarik untuk dijadikan sebagai laboratorium penelitian, karena warisan sejarah keislaman, keunikan Turki sebagai negara di pusaran negara-negara Eropa dan terlintasi oleh jalur beragam ideologi serta pertimbangan lainnya, maka perlu untuk para *stake holder* (baik pemerintah maupun para peneliti tanah air) untuk memperhatikan kemungkinan untuk menekuni studi kawasan khusus Turki. Hal ini penting disamping untuk sumbangan pengetahuan (*contribution to knowledge*) dengan spirit keingintahuan yang tinggi juga sebagai langkah untuk memahami beragam negara-bangsa dalam rangka memahami dan menindaklanjuti dengan kerjasama atau kemitraan dengan negara yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir al-Qur'an*, Semarang: Assyifa, 1998.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmad An-Na'im, Abdullahi, *Islam dan Negara Sekuler : Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, Bandung : Mizan Pustaka, 2007.

Arkoun, Muhammed, *Rethinking Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LPMI, 1996.

Esposito, Jhon L., *Islam dan Politik*, alih bahasa H.M. Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Sardar, Ziauddin, *Kembali ke Masa Depan, Syari'at Sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Helmi Musthopa, Jakarta: Penerbit Serambi, 2005.

C. Kelompok Lain-lain

Abdullah, Taufik (eds.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, 7 Jilid, Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Ahmad, Feroz, *The Making of Modern Turkey*, London: Routledge, 1993.

Aziz, Abdul, *Politik Islam Politik : Pergulatan Ideologis PPP menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Azmi, Rafiullah, "The Rise of the AKP : A Challenge before Turkey," *Islam and the Modern Age*, 2002.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme*, Jakarta : Penerbit Paramadina, 1996.

Boland, Vincent, "Policy Follow Trade Abroad," *Financial Times*, 21 November 2007.

- Cagaptay, Soner, *Secularism and Foreign Policy in Turkey: New Elections, Troubling Trends*, Washington: Washington Institute for Near East Policy, 2007.
- Cinar, Menderes, "Turkey's Under the AKP Rule," *The Muslim World*, 2006.
- Dosyalar, Ozel, "Turkey: 22 July 2007-Election Results," <http://www.bbc.turkish/election/Results.htm>, akses tanggal 17 Maret 2008.
- Drummond, James, "Open Economy Woos Investors," *Financial Times*, 21 November 2007.
- Eickleman, Dale F., dan James Piscatori, *Politik Muslim, Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Emerson, Michael, "Has Turkey Fulfilled the Copenhagen Political Criteria?," CEPS Policy Brief No. 48/April 2004 (<http://www.shop.ceps.be>), akses 05 Juni 2008.
- Erdogan, Mustafa, *Islam Dalam Politik Turki: Pencarian Demokrasi Tanpa Islam*, Atila Yayla, (ed.), Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar, Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2004.
- Erdogan, Recep Tayyip, "Conservative Democracy and the Globalization of Freedom, dalam M. Hakan Yavuz, (ed.), Salt Lake: University of Utah Press, 2006.
- Esposito, Jhon L. dan Francois Burgat, ed., *Modernizing Islam, Religion in the Public Sphere in the Middle East and Europe*, London: Hurst 7 Company, 2002.
- European Commission, Directorate-General for Communication Publication, *The EU in the World, the Foreign Policy of the European Union*, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007.
- Fluehr-Lobban, Carolyn, *Islamic Societies in Practice*, second edition, Florida: University Press of Florida, 2004.
- Gerges, Fawaz A., , *Amerika dan Islam Politik, Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan*, terj. Hamid Basyaib, Jakarta: Alfabet, 2002.
- Gokalp, Ziya, *The Principles Of Turkism*, trans. Robert Devereux, Leiden : E.J.Brill, 1968.

Heper, Martin, dan Sule Toktas, "Islam, Modernity, and Democracy in Contemporary Turkey: The Case of Recep Tayyip Erdogan," *The Muslim World*, Vol 93, 2003.

<http://www.akparti.org.turk/eng>

<http://www.bbc.turkish.com>

Karakas, Cemal, *Turkey: Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics, and Society*, Frankfurt: Peace Research Institute Frankfurt, 2007.

Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik, Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan "Islam Politik" di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Buana, 1980.

Komarudin Hidayat dalam Binnaz Toprak, *Islam Dan Perkembangan Politik di Turki*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Kusmanto, Dede, *Respon Ulama Terhadap Pembaharuan di Turki Usmani (1839-1909)*, Skripsi S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Maesaroh, Siti, *Peranan Midhat Pasha Dalam Pembentukan Konstitusi 1876*, Skripsi S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Majalah Azzikra, No 20 tahun 2, Juli 2006

Majalah Azzikra, No 21 tahun 2, Agustus 2006.

Majalah Tempo Edisi. 27/XXXIII/27 Agustus - 02 September 2007.

Matthews, Owen dan Sami Kohen, "The True Turkish Believer," *Newsweek*, Februari 18, 2008.


Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007.

Mohamad, Goenawan, Catatan Pinggir, "Turki," *Majalah Tempo Edisi. 27/XXXIII/27 Agustus - 02 September 2007.*

Mulia, Musdah, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001.

- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (2 Jilid), Jakarta: UI-Press, 1985, cet.ke-5.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Social*, cet ke-11, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Newsweek*, Februari 18, 2008.
- Nirwan Ahmad Arsuka (ed.), *Bentara Esei-esei 2002*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Onis, Ziya, "The Political Economy of Turkey's AKP," dalam Hakan Yavuz (ed.), *The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Party*, Salt Lake City: University of Utah Press, 2006..
- Ozkan, Mehmet, "Turkish Activism In The Middle East After The 1990s: Towards a Periodization of Three Waves," *Foundation for Middle East and Balkan Studies*, tt.
- Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Putra, Bahas Haddy, *Gerakan Turki Usmani Muda dan Kontribusinya Dalam Pembaruan di Turki Pada Tahun 1865-1883*, Skripsi S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Raharjo, Imam Toto K. (ed.), *Bung Karno dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2001.
- Rahman, Budi Munawar (ed.), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jakarta: Penerbit Paramadina dan Mizan, 2007.
- Rivero, Oswaldo de, *Mitos Perkembangan Negara*, alih bahasa. M. Sya'roni Rofii, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rokhimah, Siti, *Tanzimat di Turki Tahun 1839-1871*, Skripsi S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002
- Sagiv, David, *Islam Otentisitas Liberalisme*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Sarantakos, Satirios, *Sosial Research*, Melbourne: Mac millan Education Australia Pty Ltd, 1993.

- Syahidah, Ahmad, "Jilbab dan Politik Islam di Turki," <http://www.republika.co.id>, akses tanggal 07 Mei 2008
- Toprak, Binnatz, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*, terj. Karsidiningrat, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Yavuz, M. Hakan, (ed.), *The Emergence of a New Turkey, Democracy and the AK Parti*, Salt Lake, Utah : The University of Utah Press, 2006.
- Zurcher, Erik J., *Sejarah Modern Turki*, alih bahasa. Karsidiningrat, Jakarta: Gramedia, 2003.
- "Mosque And State in Turkey," *Editorial New York Times*, 6 Juni 2004, <http://www.nytimes.com>, akses 20 Maret 2008.
- "The Copenhagen Criteria," European Commission : Strategy Paper and Report 2003, http://www.fifoost.org/EU/strategy_en_2002/node3.php, akses 20 Maret 2008.
- "Partai Baru Menang di Turki," <http://www.bbcindonesia.com/htm>, akses tanggal 06 Juni 2008.
- "Political Parties and Election System," <http://www.turkishembassy.org>., akses tanggal 20 Maret 2008.
- "Political Parties in Turkey", <http://www.allaboutturkey.com>, akses tanggal 20 Maret 2008.
- "Results of Parliamentary Election 3 Novemver 2002," <http://www.eng.akp.org>, akses tanggal 20 Maret 2008.



LAMPPIRAN

LAMPIRAN I**TERJEMAHAN**

Hlm	FN	Terjemah
		Bab III
69	53	<p>"..partai politik yang saat ini saya sebagai pimpinannya, AK Party, merepresentasikan sebuah trend baru dalam berpolitik yang mulai dipahami dalam kehidupan berpolitik di Turki. Saya percaya akan pendekatan baru ini, didasarkan pada identitas politik yang saya sebut dengan "conservative democracts," sangat penting dan mampu menembus sekat-sekat melewati Turki. Jika diperhatikan, sebagaimana kasus sosialisme, liberalisme, dan konservatisme, semua gerakan politik seringkali didasarkan pada proses relasi substantif interfaksi dengan yang lain. Kita saat ini menyaksikan sendiri tidak ada perbedaan dan polarisasi garis ideologi yang tajam dan tebal pada masing-masing di antara mereka, akan tetapi formasi dari wacana politik yang baru memabawa pengaruh penting bagi ideologi berbeda. Sudah lama sebelum kita, dihadapkan pada warna dan gambar yang beragam dan multidimensional lebih dari sekedar hitam-putih. Kita di Turki percaya bahwa, didasarkan pada kenyataan seperti ini, adalah penting untuk memperbaharui dan menguatkan politik dan pemerintahan melalui pemahaman atas konservatif demokrasi."</p>

LAMPIRAN II

PROFIL TURKI

Republik Turki adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.

Ibu kotanya berada di Ankara namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul. Kawasan yang terdiri dari Turki modern telah menyaksikan kelahiran peradaban-peradaban utama, termasuk Kekaisaran Bizantium dan Kekhalifahan Turki Utsmani. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua buah peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur tanah di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang semakin tumbuh.

Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu. Sistem politiknya didirikan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, akibat Perang Dunia I. Sejak itu, Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri Persatuan Bangsa-bangsa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), OECD, dan OSCE, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara

Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia.

Nama	: Republik Turki
Populasi	: 74.8 juta jiwa (PBB, 2007)
Ibu Kota	: Ankara
Kota Terbesar	: Istanbul
Luas Wilayah	: 7779,452 km (300,948 mil)
Bahasa Mayoritas	: Turki
Agama Mayoritas	: Islam
Harapan Hidup	: 69 tahun (bagi laki-laki), 74 tahun perempuan (PBB)
Mata Uang	: Lira
Ekspor Utama	: Pakaian dan tekstil, buah-buahan dan sayur-sayuran, besi dan baja, kendaraan sepeda motor dan permesinan, minyak dan oli.
GNI per kapita	: US \$4,710 (Bank Dunia, 2006)
Domain Internet	: .tr
Kode Panggil internasional	: +90

PETA TURKI



LAMPIRAN III

Turki: Dalam bentang waktu

Kronologi tahun-tahun penting:

1923-Majelis Permusyawaratan mendeklarasikan Turki sebagai negara Republik dan menetapkan Kemal Ataturk sebagai presiden.

1928-Turki menjadi sekuler: dengan menghilangkan Islam sebagai agama negara dalam konstitusi.

1925- Adopsi atas kalender Gregorian. Melarang penggunaan jubah.

1938 – Presiden Ataturk meninggal dunia, digantikan oleh Ismet Inonu.

1945 – Netral selama Perang Dunia II, Turki menyatakan perang atas Jepang dan Jerman, namun tidak ikut dalam perang. Bergabung bersama PBB.

1950 –Republik Turki untuk pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum, kemenangan diraih oleh Partai Demokratik yang juga berhaluan oposisi.

Kudeta militer

1952 – Turki meninggalkan kebijakan netralist Ataturk dan bergabung bersama NATO.

1960 – Kudeta militer melawan partai berkuasa Partai Demokratik.

1961 – Konstitusi yang baru membentuk dua sisi parlemen (bikameral).

1963 – Penandatanganan kerjasama asosiasi dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC).

1965 – Suleyman Demirel menjadi perdana menteri – sebuah posisi yang didudukunyi sebanyak tujuh kali

1971 – Angkatan bersenjata memaksa Demirel melepaskan jabatan setelah melakukan kekerasan dengan jalur politik.

1974 – Tentara Turki menyerang Cyprus bagian utara.

1976 – Gempa bumi yang menewaskan sekitar 5,000 orang di bagian barata provinsi Van.

1978 – Embargo dagang AS sebagai akibat dari invasi penulungan minyak.

1980 – Kudeta militer diikuti kebuntuan politik dan ketidakpercayaan publik. Penyalahgunaan pungutan pajak dari undang-undang perang.

1982 – Konstitusi yang baru menyetujui tujuh tahun masa jabatan presiden, dan menyempitkan parlemen ke dalam sistem satu kamar.

1983 – Pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai milik Turgut Ozal, Partai Tanah Air (Motherland Party, ANAP).

Perang PKK

1984 – Pengakuan Turki “Cyprus Bagian Utara menjadi bagian dari Republik Turki”.

Partai Pekerja Kurdistan menyatakan diri sebagai separatis dan melakukan perang gerilya di bagian selatan.

1987-Turki melamar menjadi anggota penuh Masyarakat Uni Eropa (EEC).

1990-Turki mengizinkan AS memimpin koalisi menyerang Irak untuk menerbangkan pesawat tempur dari pangkalan militer Turki.

1992-20,000 pasukan Turki memasuki wilayah Kurdi di Irak dalam rangka operasi anti-PKK.

Turki bergabung bersama Aliansi Laut Hitam.

1993-Tansu Ciller menjadi perdana menteri perempuan pertama Turki, dan Demirel terpilih sebagai presiden.

Gencatan senjata dengan PKK berlangsung.

1995-Komando militer melepaskan sejumlah tentara untuk memerangi Suku Kurdi di sebelah utara Irak, sejumlah 35,000 tentara.

Koalisi Ciller bubar. Partai Kesejahteraan (Refah, Welfare Party) pro-Islam memenangkan pemilu namun kekurangan dukungan untuk membentuk pemerintahan-dua mayoritas partai beraliran kanan-tengah membentuk koalisi anti-islamisme.

Turki mulai mengikuti percobaan menjadi anggota UE.

1997-Koalisi dibubarkan setelah kampanye yang dilakukan militer, menggantikan dengan koalisi baru yang dipimpin oleh partai Tanah Air beraliran kanan-tengah dan Mesut Yilmaz sebagai Perdana Menteri.

1998 Januari-Partai Refah—mayoritas di parlemen—dibekukan. Yilmaz diganti dengan tuduhan skandal korupsi, digantikan oleh Bulent Ecevit.

1999 Februari-Pemimpin PKK Abdullah Ocalan tertangkap di Kenya.

1999 Juli-mendapatkan vonis hukuman mati, kemudian diganti dengan penjara seumur hidup.

1999 Agustus-Gempa bumi Turki dengan pusat gempa di Izmit setidaknya menewaskan 17,000 orang.

1999 November-Gempa bumi kedua di tempat yang sama menewaskan ratusan orang.

Pada Millenium Baru

2000-Ahmet Necdet Sezer mengambil alih jabatan presiden dari Suleyman Demirel.

2001 Januari-Urusan diplomatik dengan Perancis setelah Majelis Permusyawaratan Perancis menyatakan pembunuhan etnis Armenia di bawah kekuasaan Ottoman Empire sebagai Genosida.

2001 Mei-Pengadilan HAM Uni Eropa menemukan bukti kesalahan Turki sebagai tindakan kekerasan atas hak Yunanani Cyprus selama proses pengambil alihan Cyprus bagian utara.

2001 Juni- Mahkamah Konstitusi membekukan partai oposisi pro-Islam Partai Kebajikan, dianggap sebagai aktivitas anti-sekuler. Partai baru pro-Islam Saadet didirikan oleh para mantan pengurus Partai Kebajikan pada bulan Juli.

2001 November- firma konstruksi Inggris Balfour Beatty dan Impregilo dari Italia mencabut proyek kontroversial bendungan Ilisu. Diikuti Bank Swiss UBS pada Februari 2002.

2002 Januari-Laki-laki Turki tidak lagi dianggap sebagai kepala keluarga dalam pandangan hukum. Hukum memberikan hak penuh yang sama bagi perempuan seperti laki-laki, 66 tahun setelah hak perempuan hanya disimpan dalam buku statuta.

2002 Maret-Pemerintah Turki dan Yunani sepakat untuk membangun pipanisasi sepanjang Turki untuk mensuplai gas ke Yunani.

2002 Juli- Tekanan untuk mempercepat pemilu menyeruak seperti dilakukan delapan menteri termasuk Menteri Luar Negeri Cem mengundurkan diri dari jabatan karena keterpurukan ekonomi, kekacauan politik. Cem mendirikan partai baru yang berkomitmen untuk membangun demokrasi sosial, Keanggotaan Uni Eropa.

2002 Agustus-Parlemen mengusulkan reformasi sebagai upaya untuk mempercepat proses Keanggotaan UE. Hukuman mati mendapatkan abolisi kecuali saat perang dan pelarangan pengajaran Bahasa Kurdi, penyiaran diperbolehkan kembali.

Kejayaan Partai Islam

2002 November-Partai berbasis Islam AKP berhasil memenangkan pemilu. Partai AKP berjanji untuk menjaga prinsip-prinsip konstitusi sekulerisme. Pimpinan partai Abdullah Gul ditunjuk sebagai Perdana Menteri.

2002 Desember-Perubahan Konstitusi mengizinkan pemimpin partai yang memerintah AKP, Recep Tayyip Erdogan, duduk di parlemen, dan kemudian menjadi Perdana Menteri. Ia telah dilarang melakukan aktifitas di kantor pemerintah karena tindakan kriminal yang sebelumnya dilakukan menyangkut keyakinan.

2003 Maret-Pemimpin AKP Recep Tayyip Erdogan memenangkan kursi di parlemen. Sebelumnya jabatan perdana menteri dipegang Abdullah Gul kemudian diberikan kepada Erdogan.

Parlemen tidak mengizinkan tentara AS menggunakan seluruh wilayah Turki untuk invasi Irak namun mengizinkan untuk menggunakan ruang udara Turki. Otoritas mereka menghendaki pengiriman pasukan ke kawasan Kurdi sebelah utara Irak.

2003 Mei-Lebih dari 160 orang, mereka kebanyakan adalah anak-anak sekolah terperangkap di dalam asrama, meninggal dunia karena gempa bumi di daerah Bingol.

2003 Juni-Juli- melihat/merumuskan masa depan keanggotaan UE, parlemen mengamandemen hukum-hukum yang bersifat restriktif terhadap kebebasan berbicara, hak bahasa mengembangkan bahasa Kurdi, dan mengurangi ketelibatan militer dalam politik.

Serangan ke Istanbul

2003 November-25 orang terbunuh dan 200 diantaranya luka-luka saat dua bom mobil meledak dekat synagog utama Istanbul. Beberapa hari kemudian dua pembunuhan dengan pengeboman terjadi di konsulat dan bank Inggris di kota menewaskan 28 orang.

2004 Januari- Turki menandatangani protocol penghapusan hukuman mati dalam segala hal, langkah ini diterima oleh lingkaran UE.

2004 Februari-lebih dari 60 orang tewas saat blok apartemen di kota Konya ambruk.

2004 Maret-sedikitnya dua orang tewas terbunuh dan disangka melakukan bunuh diri di rumah penginapan Masonic di Istanbul.

2004 Mei-PKK mengatakan rencananya untuk mengakhiri gencatan senjata karena apa yang disebut dengan operasi anihilisasi pasukan mereka.

2004 Juni-Siaran Televisi negara untuk pertama kalinya menampilkan program berbahasa Kurdi.

Empat aktifis, termasuk MP Leyla Zana, dibebaskan dari penjara.

Para pemimpin NATO berkumpul di Istanbul.

2004 Juli-Tiga tewas dalam serangan bom mobil di sebelah selatan kawasan Van. Otoritas setempat menganggap PKK bertanggungjawab atas kejadian itu.

2004 September-Parlemen menyetujui reformasi hukum yang lebih ketat untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan penyiksaan. Usulan controversial mengenai kriminalitas kedewasaan.

Pembicaraan UE

2004 Desember-Para pemimpin UE bersepakat untuk membuka dialog terkait akses Turki dalam UE pada tahun 2005. Keputusan, akan ditentukan pada pertemuan Brussels, diikuti dengan kesepakatan antara Turki dan UE mengakui Siprus sebagai bagian dari anggota UE.

2005 Januari-Mata uang Lira yang baru diperkenalkan dengan nilai tukar enam angka kosong mengakhiri era sebelumnya, dimana banknote disebut jutaan.

2005 Mei-Parlemen menyepakati amandemen aturan yang ada (kode penal) setelah mendapat keluhan bahwa hukum yang ada membatasi kebebasan media. UE menyambut baik upaya tersebut namun perlu perbaikan lebih jauh agar sesuai dengan cita-cita HAM.

2005 Juni-Parlemen menggugat veto kalangan sekuleris Presiden Sezer—dengan tujuan untuk mengawal draf amandemen undang-undang yang nantinya memberikan kemudahan dalam pengajaran al-Qur'an.

2005 Juli-Enam orang terbunuh dalam serangan bom di stasiun kereta api timur. Pemerintah menuduh pelaku adalah PKK.

Ledakan di minibus di kawasan resort Kusadasi menewaskan setidaknya empat orang.

2005 Oktober- Negosiasi keanggotaan UE secara resmi dibuka setelah proses panjang tawar menawar diplomasi.

2005 November – Multi-billion-dollar Blue Stream pipanisasi mengalirkan gas dari Rusia melalui Laut Hirmen menuju Turki dengan membuka pelabuhan Samsun.

2006 Maret – 14 pemberontak Kurdi tewas oleh pihak keamanan.

2006 April – Sedikitnya dua belas orang terbunuh saat terjadi bentrok antara demonstran Kurdi dan pihak keamanan di bagian Tenggara. Beberapa orang terbunuh dalam jangka waktu bedekatan di Istanbul.

2006 Mei- Penembak jitu mengarahkan tembakan ke Pengadilan Tinggi, membunuh satu orang hakim dan melukai empat lainnya. Ribuan demonstran mengutuk serangan itu dan menganggap serangan tersebut berasal dari kalangan fundamentalis Islam.

2006 Juni – Parlemen menunda persetujuan hukum anti-teror yang dikhawatirkan UE dan oleh sejumlah kelompok pengkritik yang dianggap berpotensi penyiksaan.

2006 Juli – Baku-Tbilisi-Ceyhan pipanisasi membukan acara peresmian di Turki.

2006 Agustus-September – Para pengebom menjadikan Istanbul dan sejumlah tempat peristirahatan sebagai sasaran. Kelompok samara-samar separatis Kurdi Kurdistan Freedom Falcon (TAC) mengklaim bertanggungjawab atas sejumlah serangan dan memperingatkan akan menjadikan Turki membara “Turki ke Neraka.”

2006 30 September - Kelompok separatis Kurdi, PKK, menyatakan kesepakatan untuk melakukan operasi melawan militer.

2006 Desember- UE secara parsial membekukan pembicaraan tentang keagotaan Turki karena kegagalan Ankara dalam membuka pelabuhan dan bandara menuju lalu lintas Cypriot.

2007 Januari – Jurnalis dan pemimpin komunitas Armenia Hrant Dink tewas dibunuh. Pembunuh dianggap melakukan provokasi atas hubungan Turki dan Armenia. Perdana Menteri Erdogan mengatakan satu peluru telah menyakiti demokrasi dan kebebasan berekspresi.

2007 April – Puluhan ribu pendukung sekulerisme berkumpul di Ankara, mereka mendesak Perdana Menteri Erdogan untuk tidak ikut dalam bursa pemilihan presiden karena latar belakang keislamannya.

Partai berkuasa AKP mencalonkan Menteri Luar Negeri Abdullah Gul sebagai kandidat presiden setelah Erdogan menyatakan tidak maju dalam bursa pilpres. Hal itu juga disebabkan karena kekalahan pada ronde pertama.

2007 Mei – Parlemen memajukan pemilu nasional menjadi 22 Juli sebagai upaya untuk meredam ketegangan antara kalangan sekuleris dan islamis mengenai penentuan siapa presiden berikutnya.

Parlemen menyetujui perubahan konstitusi yang memberikan peluang bagi presiden dipilih langsung oleh rakyat, namun amandemen tersebut diveto oleh Presiden Sezer.

Ketegangan terjadi pada perbatasan Turki-Irak spekulasi menyebutkan hal itu terjadi karena pemberontakan Kurdi.

Ledakan bom di Ankara menewaskan enam orang dan 100 lainnya luka-luka. PKK dianggap bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

2007 Juli – Partai AKP memenangkan pemilihan anggota parlemen.

2007 Agustus – Abdullah Gul terpilih menjadi presiden.

2007 Oktober – Intensifikasi diplomasi dengan AS setelah kongres AS menyepakati bahwa pembunuhan etnis Armenia di bawah kekuasaan Turki Utsmani (Ottoman Empirer) sebagai genosida.

Parlemen menyetujui operasi militer di Irak sebagai upaya untuk membasmi pemberontak Kurdi.

Para pemilih dalam referendum berharap kedepan pemilihan presiden dipilih oleh rakyat dan tidak lagi oleh parlemen.

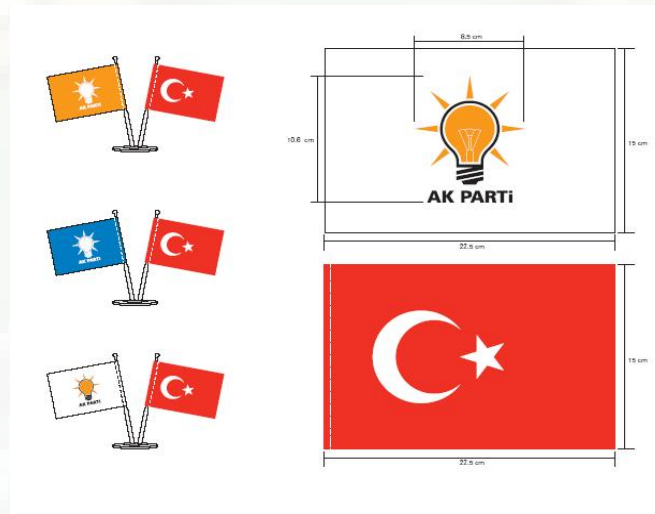
2007 Desember – Turki memutuskan untuk melakukan serangan udara atas para pemberontak Kurdi dengan gerakan PKK yang berada di Irak.

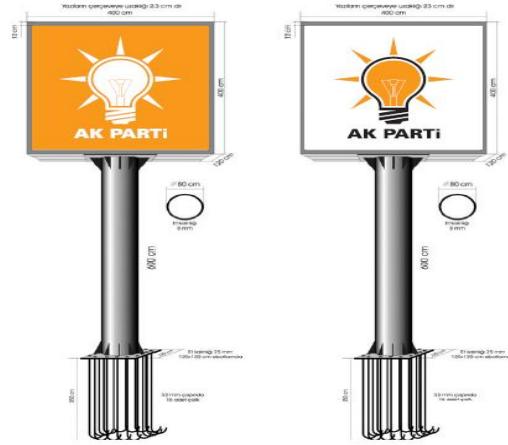
2008 Februari – ribuan demonstran menuntut diberikannya izin bagi perempuan mengenakan Jilbab di universitas.

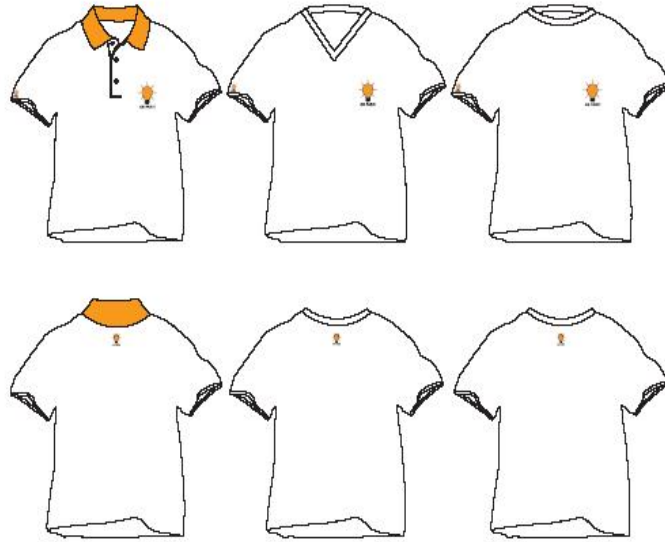
Dewan perwakilan rakyat menyetujui amandemen konstitusional yang akan memberikan jalan bagi perempuan diijinkan untuk memakai Jilbab Islam di universitas.

2008 Mahkamah Konstitusi menerima surat tuduhan melawan hukum oleh partai pemerintah AKP dan 71 petinginya, termasuk Presiden Gul dan Perdana Menteri Erdogan, atas tuduhan pencarian untuk menjadikan Turki sebagai negara Islam.

Sumber: [www.bbc.com/english version](http://www.bbc.com/english/version)

LAMPIRAN IV**Atribut-atribut Kampanye Partai AKP**





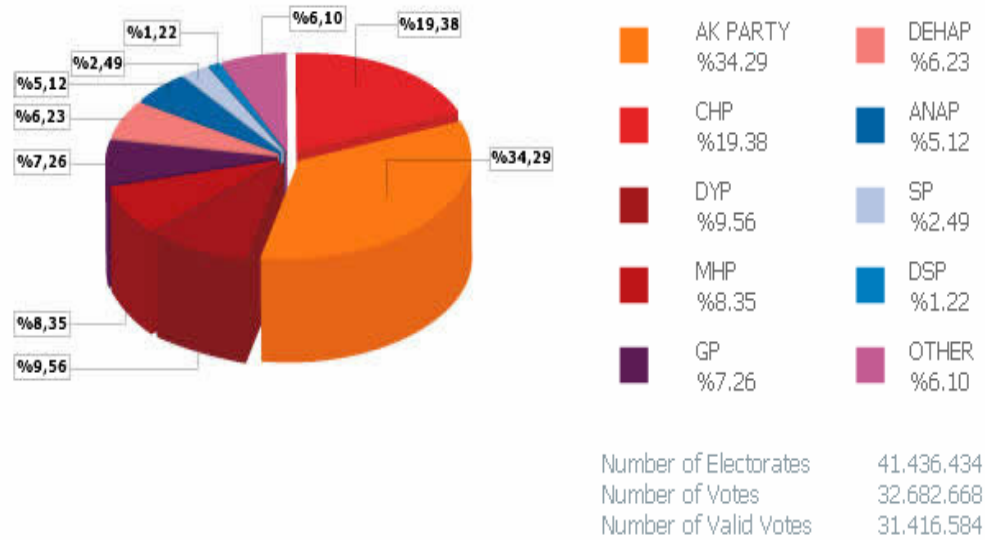
LAMPIRAN V**Daftar Peserta Pemilu 2007 dan Perolehan Suara AKP****22 JULY 2007 ELECTIONS: PARTICIPATING POLITICAL PARTIES**

AKP: Justice and Development Party (Governing party since 2002)	HYP: People's Ascent Party
ATP: Enlightened Turkey Party	İP: Workers' Party
BTP: Independent Turkey Party	LDP: Liberal Democratic Party
CHP: Republican People's Party (Main opposition since 2002)	MHP: Nationalist Movement Party
DP : Democratic Party	ÖDP: Freedom and Solidarity Party
EMEP: Labour Party	SP: Felicity Party
GP: Young Party	TKP: Turkish Communist Party

BAĞ: Independent candidates

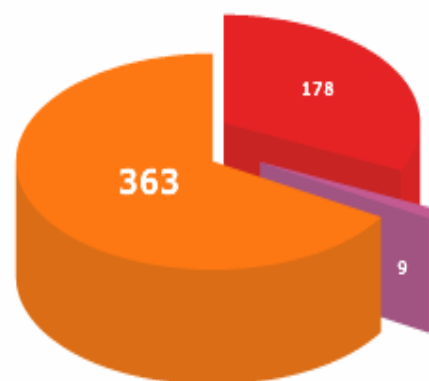
Source: BBCTurkish.com

RESULTS OF THE PARLIAMENTARY ELECTIONS 3 NOVEMBER 2002



Hasil perolehan suara pada pemilu 2002, menempatkan AKP pada urutan pertama. Sumber: <http://www.akparti.org.tr>.

2002 PARLIAMENTARY ELECTIONS



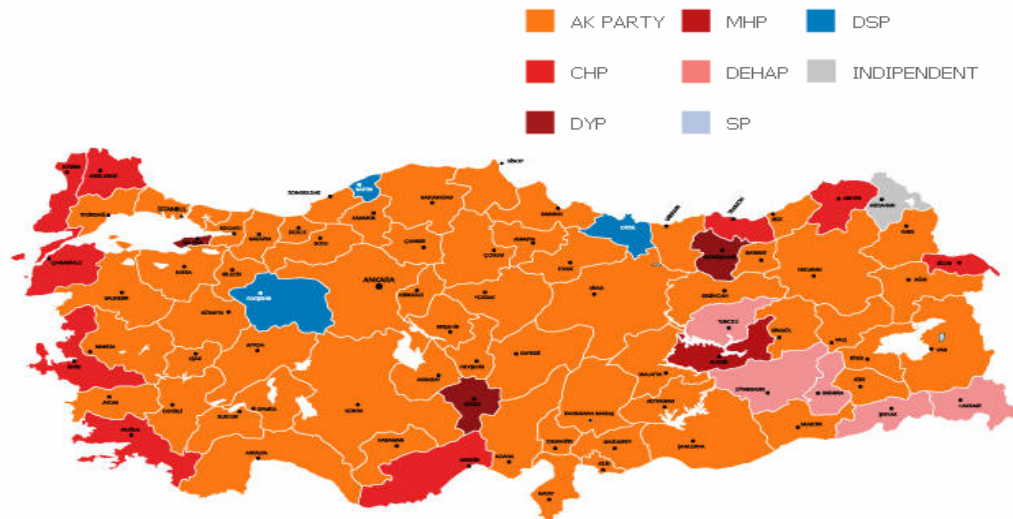
COMPARISON BETWEEN THE PORTIONAL RESULTS OF THE PARLIAMENTARY ELECTIONS IN 2002 AND LOCAL ELECTIONS IN 2004



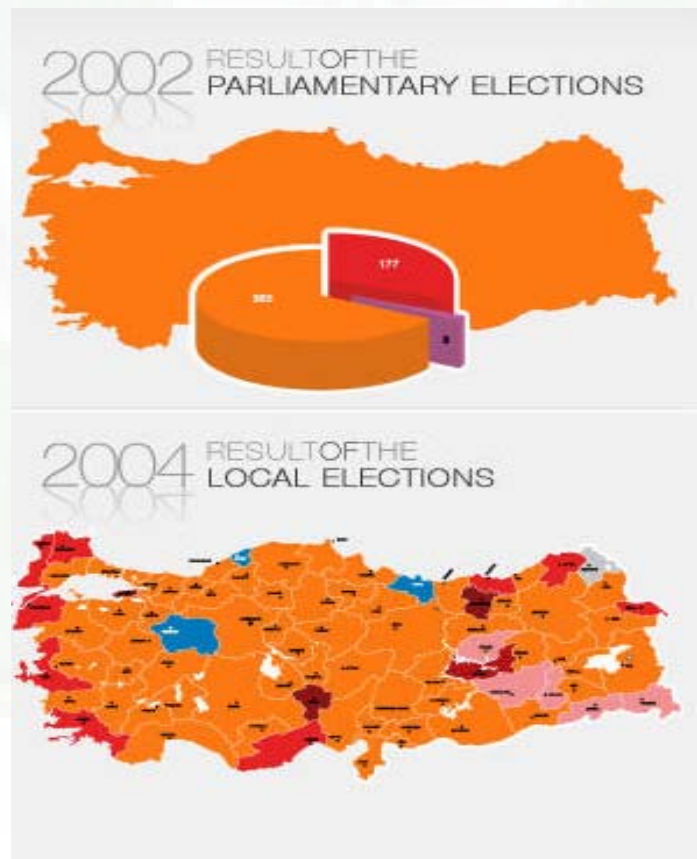
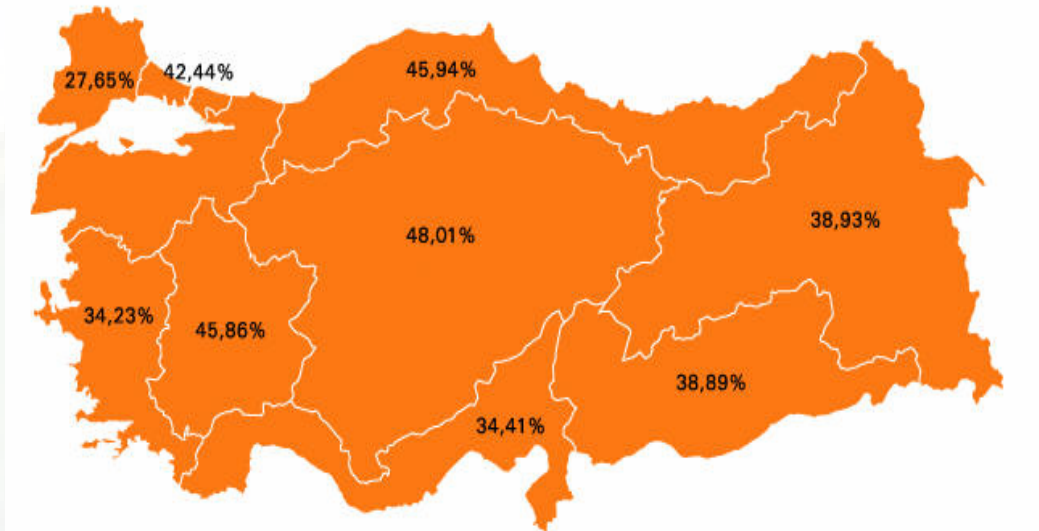
Perolehan suara pada pilkada lokal tahun 2004

Perolehan Suara Pada Pilkada 2002 dan 2004

RESULTS OF THE LOCAL ELECTIONS ON 28 MARCH 2004



REGIONAL SHARES OF AK PARTY IN THE LOCAL ELECTIONS ON 28 MARCH 2004



RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Sya'roni Rofii

TTL : Lombok Timur, 9 Agustus 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Orang Tua : - Bapak : Drs. Anhar, M.Pd,

: - Ibu : Hasanah, S.Pd,

Pekerjaan Orang Tua : - Bapak : PNS

- Ibu : PNS

Alamat Orang Tua : Desa Kabar, Kec. Sakra, Lombok Timur, NTB

Pendidikan :

- SDN 02 Kabar, Lombok Timur 1993-1999
- MTSN Model Selong, Lombok Timur 1999-2002
- MAKN/MAN 2 Mataram, NTB 2002-2005
- S1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk 2005

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus DPC PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Yogyakarta (2007-2008);
- Sekretaris Umum Lembaga Pers Mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2009);
- Wakil Direktur Lembaga Studi Agama dan Negara (LeSAN) JS/Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2008), Redaktur Jurnal LeSAN (2007-2008);
- Kepala Biro Konsultasi Hukum PSKH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2009);
- Pengurus HMI-MPO Komisariat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2007, 2007-2008);
- Pengurus Daerah PII (Pelajar Islam Indonesia) Kota Mataram (2004-2005).

Publikasi:

- Oswaldo de Rivero, *Mitos Perkembangan Negara*, sebagai penerjemah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Agustus 2008).